

**PEMIKIRAN POLITIK TAUFIQ KIEMAS TENTANG
GAGASAN KEBANGSAAN DI INDONESIA**



SKRIPSI

**Diajukan Untuk Melengkapi Salah Satu Syarat Guna
Memperoleh Gelar S.Sos Sarjana S1 Dalam Ilmu Politik
Program Studi Ilmu Politik**

OLEH:

Siti Nabila Humairah

NIM : 1720702047

PROGRAM STUDI ILMU POLITIK

FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI RADEN FATAH

PALEMBANG

1442 H/2021

PERSETUJUAN PEMBIMBING

Kepada Yth.
Bapak Dekan Fak. Ilmu Sosial dan
Ilmu Politik UIN Raden Fatah Palembang
di-
Palembang

Assalamualaikum Wr. Wb.

Setelah mengadakan bimbingan dengan sungguh-sungguh, maka kami berpendapat bahwa Skripsi saudara Siti Nabila Humairah dengan NIM : 1720702047 yang berjudul *Pemikiran Politik Taufiq Kiemas Terhadap Gagasan Kebangsaan di Indonesia*, sudah dapat diajukan dalam Sidang Munaqosah Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik UIN Raden Fatah Palembang. Demikian, Terima Kasih.

Wassalamualaikum Wr. Wb.

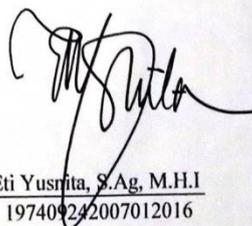
Palembang, 16 Agustus 2021

A. w. Pembimbing ij (Cekta Justru)
Ka Prodi Ilmu Politik

Pembimbing I



Dr. Kun Budianto, M.Si
NIP. 19762072007011010



Dr. Eti Yusnita, S.Ag, M.H.I
NIP. 197409242007012016



Universitas Islam Negeri Raden Fatah Palembang
Fakultas Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik

Jln.Prof. KH Zainal Abidin Fikri KM 3,5 Telp. (0711) 353347, Fax. (0711) 354668, Website: <http://radenfatah.ac.id>,
Email: fisip_uin@radenfatah.ac.id

PENGESAHAN SKRIPSI MAHASISWA

Nama : Siti Nabila Humairah
NIM : 1720702047
Jurusan : Ilmu Politik
Judul : Pemikiran Politik Taufiq Kiemas Tentang Gagasan Kebangsaan Di Indonesia

Telah dimunaqasyahkan dalam sidang terbuka Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik UIN Raden Fatah Palembang pada :

Hari / Tanggal : Senin, 6 September 2021
Tempat : Secara Online menggunakan Zoom

Dan telah diterima sebagai salah satu syarat untuk memperoleh Gelar Sarjana Program Strata I (SI) pada Jurusan Ilmu Politik.



TIM PENGUJI

KETUA,

Dr. Eti Yumnita, S.Ag, M.H.I
NIP.197409242007012016

SEKRETARIS,

Ryllian Chandra, M.A
NIP. 198604052019031011

PENGUJI I,

Ainur Rofik, M.Si
NIP.197906192007101005

PENGUJI II,

Yulion Zalfa, M.A
NIP. 198807072019031011

SURAT PERNYATAAN KEASLIAN

Yang bertandatangan di bawah ini :

Nama : Siti Nabila Humairah
Tempat & Tanggal Lahir : Palembang, 28 April 2000
NIM : 1720702047
Jurusan : Ilmu Politik
Fakultas / Jurusan : FISIP / Ilmu Politik
Judul Skripsi : Pemikiran Politik Taufiq Kiemas Terhadap Gagasan
Kebangsaan di Indonesia

Menyatakan dengan sesungguhnya bahwa :

1. Seluruh data, informasi, pembahasan, dan kesimpulan yang disajikan dalam Skripsi ini kecuali yang disebutkan sumbernya adalah merupakan hasil pengamatan, penelitian, pengolahan, serta pemikiran saya dengan pengarahan dari pembimbing yang telah ditetapkan.
2. Skripsi yang saya tulis ini adalah asli dan belum pernah diajukan untuk mendapat gelar akademik, baik dari Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik UIN Raden Fatah Palembang maupun di Perguruan Tinggi lainnya.

Demikian pernyataan ini dibuat dengan sebenar-benarnya apabila dikemudian hari ditemukan adanya bukti ketidakbenaran dalam pernyataan tersebut di atas, maka saya bersedia menerima sanksi akademik berupa pembatalan gelar akademik yang saya peroleh melalui pengajuan skripsi ini.

Palembang, 16 Agustus 2021

Yang Membuat Pernyataan



Siti Nabila Humairah

NIM : 1720702047

MOTTO DAN PERSEMBAHAN

MOTTO

“Menang atau kalah tidak masalah yang penting menghargai perjuangan yang telah dicapai”

“Pendidikan mempunyai akar yang pahit tetapi buahnya manis”

PERSEMBAHAN

Dengan rasa syukur yang mendalam, karya tulis ini kupersembahkan kepada:

1. Orang Tuaku yang saya sayangi ayahanda Prof. Dr. H. Paisol Burlian, SH, M.Hum dan Ibunda Dra. Hj. Sumiria, M.Si, terima kasih atas semua bantuan, motivasi dan tidak henti-hentinya selalu berdoa untuk kelancaran proses kuliahku
2. Kakakku Karina Ayuni Eka Putri, SP, M.Si dan suami Aldi Priansyah, ST yang selalu memotivasi semangat.
3. Bapak Dr. Kun Budianto, M.Si selaku pembimbing 1 dan Almarhumah Ibu Vita Justisia, SH, MH, MKn selaku pembimbing 2 penyusunan skripsi.
4. Ibu Reza Aprianti, MA selaku pembimbing Akademik.
5. Serta teman-teman Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik UIN Raden Fatah Palembang, terkhusus untuk teman-teman kelas Ilmu Politik C (3) angkatan 2017 senang jumpa dengan kalian, karena dengan berbagai latar belakang dan wawasan di bawa ke ruang kuliah dan memberi warna pada kajian keilmuan yang kita lakukan.
6. Serta sahabatku Dewi Pinarsi, Melati Ady Hardiyanti, Nonik, dan Yunani

KATA PENGANTAR

Puji syukur kehadirat Allah Swt, yang telah memberikan kekuatan fisik dan mental, lahir dan batin, sehingga Skripsi yang berjudul “Pemikiran Politik Taufiq Kiemas Terhadap Gagasan Kebangsaan Di Indonesia” ini selesai penulisannya. Shalawat teriring salam, penulis sampaikan dan sanjungkan kepada nabi Muhammad Saw beserta keluarganya, sahabat-sahabatnya, dan pengikut-pengikutnya sampai akhir zaman. Karena, beliaulah yang telah membawa manusia kepada kehidupan yang penuh rahmat dan pancaran nur Ilahi di muka bumi ini.

Adapun tujuan penulisan Skripsi ini adalah untuk memenuhi syarat guna mendapatkan gelar Sarjana Sosial (S.Sos) pada Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik UIN Raden Fatah Palembang. Dalam penyelesaian Skripsi ini, penulis telah banyak mendapatkan bantuan dan bimbingan dari berbagai pihak. Oleh karena itu, penulis menyampaikan ucapan terima kasih kepada:

1. Ibu Prof. Dr. Hj. Nyayu Khodijah, S. Ag, M.Si sebagai Rektor UIN Raden Fatah Palembang.
2. Bapak Prof. Dr. Izomuddin, MA sebagai Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik UIN Raden Fatah Palembang.
3. Bapak Dr. Yen Rizal, M.Si sebagai Wakil Dekan I, Bapak Ainur Ropik, M.Si sebagai Wakil Dekan II dan Dr. Kun Budianto, M.Si sebagai Wakil Dekan III Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik UIN Raden Fatah Palembang.
4. Ibu Dr. Eti Yusnita, S.Ag.,M.Hi sebagai Ketua Prodi Ilmu Politik FISIP UIN Raden Fatah Palembang.

5. Bapak Rylia Chandra Ekaviana, MA. Sebagai Sekretaris Prodi Ilmu Politik FISIP UIN Raden Fatah Palembang.
6. Ibu Reza Aprianti, MA selaku pembimbing Akademik.
7. Bapak Dr. Kun Budianto, M.Si selaku pembimbing 1 dan Almarhumah Ibu Vita Justisia, SH, MH, MKn selaku pembimbing 2 penyusunan skripsi.
8. Bapak Ainur Ropik, M.Si selaku penguji Utama dan Bapak Yulion Zalpa, MA selaku penguji kedua.
9. Seluruh dosen Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik UIN Raden Fatah Palembang yang telah dengan ikhlas berbagi ilmu pengetahuan, terima kasih atas bimbingan dan ilmunya. Serta seluruh Staff Pegawai Administrasi FISIP UIN Raden Fatah Palembang.

Mudah-mudahan segala amal kebajikan yang bersangkutan dalam memberikan bantuan dan bimbingan kepada penulis dapat bernilai ibadah disisi Allah Swt. Akhirnya, penulis berharap semoga skripsi ini dapat bermanfaat untuk semua pihak yang terkait.

Palembang, 25 Agustus 2021

Penulis,

Siti Nabila Humairah

DAFTAR ISI

Halaman Judul.....	i
Halaman Nota Persetujuan Pembimbing.....	ii
Halaman Pengesahan.....	iii
Halaman Pernyataan.....	iv
Motto dan Persembahan.....	v
Kata Pengantar.....	vi
Daftar Isi.....	viii
Abstrak.....	xi
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Perumusan Masalah.....	10
C. Tujuan Penelitian.....	10
D. Kegunaan Penelitian.....	10
a. Kegunaan Teoritis.....	10
b. Kegunaan Praktis:.....	10
E. Tinjauan Pustaka.....	11
F. Kerangka Teori.....	12
G. Metodologi Penelitian.....	14
1. Jenis Penelitian.....	14
2. Pendekatan/Metode Penelitian.....	15
3. Jenis Data.....	16
4. Metode Pengumpulan Data.....	16
5. Uji Validitas Data.....	17
6. Teknik Analisis Data.....	18
BAB II LANDASAN TEORI.....	19
A. Teori Empat Pilar Kebangsaan.....	19
1. Nilai Ketuhanan.....	19
2. Nilai Kemanusiaan.....	21
3. Nilai Persatuan.....	22
4. Nilai Kerakyatan Permusyawaratan/Perwakilan (Demokrasi).	24

5. Nilai Keadilan Sosial	25
B. Teori Nasionalisme	26
C. Teori Pancasila.....	27
a. Defenisi Pancasila versi Para Ahli	28
b. Sekelumit kelahiran Pancasila	29
c. Pancasila Merupakan Dasar Negara	32
D. Teori Pemikiran Politik.	33
a. Pemikiran	33
b. Pemikiran Politik	35
E. Nilai Fundamental Empat Pilar Kebangsaan dalam Perspektif Politik.....	50
1. Nilai ketuhanan	50
2. Nilai Persatuan dan Kesatuan	52
3. Unsur Kemanusiaan	54
4. Berkeadilan Sosial	55
5. Nilai musyawarah dan Perwakilan/ emokrasi.....	57
6. Nilai Toleransi	62
BAB III BIOGRAFI TAUFIQ KIEMAS.....	66
A. Di Tengah Kancah Revolusi Kemerdekaan	66
B. Menjadi Seorang Nasionalis	68
C. Biografi Taufik Kiemas	72
D. Mendampingi Megawati.....	73
E. Terjun ke Partai Demokrasi Indonesia (PDI).....	74
F. Mendirikan PDI Perjuangan.....	76
G. Di Puncak Kekuasaan	78
BAB IV HASIL DAN PEMBAHASAN	81
Pemikiran Taufiq Kiemas Terhadap Konsep Gagasan Kebangsaan di Indonesia	81
a. Pilar Pancasila.	82
b. Pilar Undang-Undang Dasar 1945	90
c. Pilar Bhinneka Tunggal Ika	93
d. Pilar Dari Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI).....	96

A. Pancasila dan Kebangsaan	101
B. Empat Pilar Satu Indonesia	108
C. Kebudayaan NKRI (Negara Kesatuan Republik Indonesia).....	109
D. Kaitan Pemikiran Taufiq Kiemas Tentang Gagasan Kebangsaan Dengan Teori Nasionalisme.....	113
BAB V PENUTUP.....	120
A. Kesimpulan.....	120
B. Saran	123
Daftar Pustaka	124
Lampiran.....	129

ABSTRAK

Penelitian ini berjudul “Pemikiran Politik Taufiq Kiemas tentang Gagasan Kebangsaan di Indonesia”. Indonesia adalah Negara yang majemuk dengan segala hal, baik suku, agama, ras, etnik, dan lain-lain. Di dalam kehidupan bermasyarakat sering diberitakan mengalami konflik dengan dalih keberagaman tersebut. Oleh karena itu skripsi mengangkat Pemikiran Taufiq Kiemas tentang gagasan kebangsaan yang merupakan solusi dari permasalahan itu. Adapun yang menjadi permasalahan yaitu bagaimanakah pemikiran Taufiq Kiemas terhadap konsep gagasan kebangsaan di Indonesia? dan tujuannya yaitu untuk lebih mengetahui tentang pemikiran Taufiq Kiemas terhadap konsep gagasan kebangsaan di Indonesia. Selanjutnya teori yang digunakan yaitu teori Nasionalisme Menurut Taufiq Kiemas yaitu bertolak kepada nilai-nilai bangsa, bicara persoalan bangsa berarti bicara persoalan perasaan, soal keinginan untuk kebersamaan, nasib sepenanggungan, misalnya dalam masalah bersama. Metode penelitian ini menggunakan jenis penelitian *library research* (kepustakaan). Yaitu bentuk penelitian yang dilakukan di perpustakaan guna mengumpulkan dan menganalisis data yang bersumber dari literatur. Pendekatannya menggunakan kualitatif, dan menggunakan metode deskriptif analisis. Jenis data yang digunakan yaitu: bahan primer berupa buku Gelora Kebangsaan Tak Kunjung Padam yang mengupas tentang pemikiran Taufiq Kiemas, bahan sekunder berupa dokumen-dokumen yang berkaitan serta yang mempunyai titik kesamaan permasalahan, misalnya referensi mengenai kebangsaan, buku Nasionalisme dan sebagainya, dan bahan tersier, berupa ensiklopedia, koran, majalah, kamus, dan lain-lain. Hasil temuan dari penelitian ini yaitu pemikiran Taufiq Kiemas Terhadap Konsep Gagasan Kebangsaan di Indonesia yaitu 4 pilar dalam hidup berbangsa dan bernegara merupakan nilai-nilai yang tinggi dan luhur, menjaadi pedoman dalam sistem ketatanegaraan Indonesia menuju masyarakat dan Negara yang adil, makmur, sejahtera, berharkat dan bermartabat. Empat pilar itu Pancasila, UUD 1945, NKRI, dan Bhinneka Tunggal Ika.

Kata Kunci: pemikiran, Taufiq Kiemas, Gagasan Kebangsaan, dan 4 pilar.

ABSTRACT

This research is entitled "Taufiq Kiemas Political Thoughts on National Ideas in Indonesia". Indonesia is a pluralistic country with all things, be it ethnicity, religion, race, ethnicity, and others. In social life, it is often reported that there are conflicts under the pretext of such diversity. Therefore, this thesis raises Taufiq Kiemas' thoughts on the idea of nationality which is the solution to that problem. As for the problem, how do Taufiq Kiemas think about the concept of nationalism in Indonesia? and the aim is to find out more about Taufiq Kiemas' thoughts on the concept of nationalism in Indonesia. Furthermore, the theory used is the theory of Nationalism According to Taufiq Kiemas, which is based on the values of the nation, talking about national issues means talking about feelings, about the desire for togetherness, the fate of sharing, for example in joint problems. This research method uses the type of research library research (library). That is a form of research conducted in the library to collect and analyze data sourced from the literature. The approach uses qualitative, and uses descriptive analysis method. The types of data used are: primary material in the form of the book Nationality Movement Never Ends, secondary material in the form of related documents and those that have a common point of problem, for example references to nationalism, Nationalism books and so on, and tertiary materials, in the form of encyclopedias, newspapers, magazines, dictionaries, etc. The findings of this study are Taufiq Kiemas' thoughts on the concept of nationalism in Indonesia, namely the 4 pillars in the life of the nation and state are high and noble values, which serve as guidelines in the Indonesian constitutional system towards a just, prosperous, prosperous, and dignified society and state, and dignified. The four pillars are Pancasila, the 1945 Constitution, the Unitary State of the Republic of Indonesia, and Bhinneka Tunggal Ika.

Keywords: thought, Taufiq Kiemas, National Idea, and 4 pillars

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Seperti yang telah kita ketahui bahwa Indonesia adalah negara yang memiliki kepulauan terluas dan terbesar di muka bumi ini dengan jumlah penduduk 250 juta lebih jiwa. Disamping itu juga menempati tingkat empat di dunia. Wilayahnya tercatat dua juta km² lebih yang terbentang dengan menyentuh garis khatulistiwa. Indonesia memiliki pulau-pulau yang berjumlah 17.000, baik pulau yang besar maupun yang kecil, dengan penduduknya yang berbeda (*heterogeny*), bahkan memiliki dari 200 suku bangsa lebih dan yang membanggakan dengan memiliki lebih kurang 300 bahasa. Selain dari itu, daerah Papua saja memiliki ratusan suku dan bahasa. Data di atas mengindikasikan bahwa betapa majemuknya Indonesia (Musdah Mulia, 2019:4).

Kehidupan berbangsa dan bernegara yang majemuk di Indonesia sering ada istilah *guyonan* (dalam bahasa Palembang disebut *penesan*) masyarakat Indonesia dengan bangga mengenalkan asal daerahnya, suku maupun sukunya. Meskipun beaneka ragam ras, suku, etnis, maupun agama tidak pernah terjadi konflik yang tidak diinginkan. Hal ini disebabkan bangsa Indonesia memiliki semboyan melalui sumpah pemuda yaitu satu nusa satu bangsa (Rumadi, 2011: 9). Sikap ini terus dipertahanan dengan melepaskan dari status beretnis apapun. Selanjutnya menanamkan sikap siapapun dan dari manapun serta dimana dia dibesarkan dalam wilayah NKRI dia adalah anggota komunitas sama.

Merujuk dari penjelasan Ernest Renan dalam perkuliahan, dimana mengilustrasikan dengan bangsa merupakan sebuah plebisit sehari-hari guna menjelaskan identitas bangsa selalu bergantung pada pengakuan anggota terhadap satu sama lain sebagai memiliki ingatan, tradisi, dan lain-lain yang sama (Musdah Mulia, 2019:12). Sehubungan dengan itu, yang menjadi dasar pembentukan yang sama telah merasakan hiruk pikuk penjajahan di Indonesia yang merusak tatanan agama, suku, etnik, ras, golongan, serta budaya, tentunya bertentangan dengan peri kehidupan masyarakat yang majemuk.

Selama penjajahan berlangsung tentunya bangsa yang memiliki nasib yang sama sehingga dengan semangat kebersamaan yang kuat dapat menuju kemenangan dalam mengisi pembangunan menuju kehidupan yang baik dalam satu bingkai yaitu NKRI. Kebersamaan dalam berbangsa itu populer dengan sebutan persatuan (Nasionalisme). Menurut Soekarno, bahwa itu merupakan identitas bangsa Indonesia dengan semangat persatuan bangsa dan konsep persatuan (nasionalisme) tersebut merupakan iktikad yaitu kesadaran dari rakyat dimana masyarakat itu bersifat tunggal, yaitu “bangsa” (Soekarno, 2005: 3).

Salah satu kemahakuasaan Tuhan Yang Maha Esa menjadikan makhluknya seperti kelompok orang dengan berbentuk suku, bermasyarakat dengan adanya perbedaan yang tujuan saling kenal mengenal. Sebenarnya bangsa Indonesia sudah memahami tentang konsep pluralisme dan multikulturalisme. Konsep pluralism ini sebenarnya telah muncul ada selogan Bhinneka Tunggal Ika temuan Empu Tantular, selanjutnya dikutip oleh pemuda dengan sumpah pemuda pada tahun 1928 sebagai ikrarnya, bahkan semboyan ini dicantumkan dalam semboyan

Bhineka Tunggal Ika pada burung Garuda Pancasila (Rumadi, 2005: 13). Tentang pluralisme Allah SWT telah berfirman dalam Al- Qur'an dalam surat Al-Hujurat ayat 13, yang berbunyi:

يَا أَيُّهَا النَّاسُ إِنَّا خَلَقْنَاكُمْ مِنْ ذَكَرٍ وَأُنْثَىٰ وَجَعَلْنَاكُمْ
شُعُوبًا وَقَبَائِلَ لِتَعَارَفُوا ۗ إِنَّ أَكْرَمَكُمْ عِنْدَ اللَّهِ أَتْقَاكُمْ ۗ
إِنَّ اللَّهَ عَلِيمٌ خَبِيرٌ

“Hai manusia, sesungguhnya Kami menciptakan kamu dari seorang laki-laki dan seorang perempuan dan menjadikan kamu berbangsa-bangsa dan bersuku-suku supaya kamu saling kenal-mengenal. Sesungguhnya orang yang paling mulia diantara kamu disisi Allah ialah orang yang paling takwa diantara kamu. Sesungguhnya Allah Maha Mengetahui lagi Maha Mengenal”. (Surat al-Hujurat ayat 13)

Bangsa Indonesia merupakan masyarakat heterogen yang berkembang, barangkali mengalami kesulitan untuk menumbuh kembangkan keberagaman bahasa ibu, etnis, suku dan kebudayaannya. Sehingga akan terjadi tidak sikap saling pengertian satu sama lain. Bentuk interaksi yang berkembang itu tentu dengan sendirinya tidak memiliki daya tahan lama terhadap dinamika menuju kemajuan politik, ekonomi, dan sosial budaya, merupakan sebuah kedamaian dengan suasana mudah hancur (Abdurrahman Wahid, 1999:7).

Dalam perkembangannya bangsa ini diperlukan rasa kerukunan dan persatuan mulai bermacam-macam agama, suku, etnis serta budaya dalam kondisi aneka kemajemukan masyarakat nusantara. Sebaliknya bukanlah sikap kekerasan, cerai berai antar bangsa, individu, sekte, dan komunitas (Abdurrahman Wahid, 1998: 77).

Mungkin sikap suka membenturkan agama dalam pluralitas yang sering dibicarakan adalah sikap yang salah dan berdampak fatal dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Dari sisi kemasyarakatan, kaitan antara masing-masing agama sarat dengan berbagai problema, bisa saja bersifat konflik yang muncul. Selain dari itu banyak umat beragama yang dilarang mengklaim agamanya lah yang benar dan masuk surga dan sebaliknya agama orang lain salah dan masuk neraka. Yang benar adalah masing-masing pemeluk agama menguatkan ketaatannya dan pengamalannya masing-masing sesuai dengan agama dan kepercayaannya.

Perlu dipahami oleh pemeluk agama bahwa akibat sempitnya dalam pemahaman agamanya menyebabkan kerusuhan yang bernuansa agama (Achmad Mustholih, 2011: 15). Perbedaan dalam paham agama itu merupakan rahmah yang tidak perlu di perseterukan antar agama dan janganlah bersikap menyalahkan satu sama lain.

Apabila mengikuti berita terakhir ini, Indonesia diberitakan bahwa mengalami konflik dengan dalih keagamaan, sebagai contoh konflik kristen-islam di Poso. Selanjutnya tanggal 1 Juni 2008 adanya serangan dari Front Pembela Islam (FPI) kepada kelompok Aliansi Kebebasan untuk Kebebasan Beragama dan Berkeyakinan (AKKBB) pada Monumen Nasional (Jakarta). Selanjutnya tanggal 27 Juli 2010 di rumah ibadah (masjid) KH. Ali Martaib tepatnya di Desa Lumban Lobu, Kecamatan Tapanuli Utara provinsi Sumatera Utara dihancurkan dengan cara penghangusan yang dilakukan kelompok yang tidak bertanggung jawab. Selanjutnya tanggal 6 Februari 2011 di Cikeusik Pandeglang provinsi Banten

adanya penyerbuan kepada kelompok paham Ahmadiyah dengan mengakibatkan meninggal dunia sebanyak empat jiwa serta dengan menciderai sebanyak lima orang. Di samping itu juga pada tanggal 08 februari 2011 telah terjadi penghancuran 3 Gereja Temanggung provinsi Jawa Tengah oleh kelompok menyebabkan tindakan yang melawan terhadap Antonius Richhmon (terpidana tindak penistaan agama) yang dihukum dengan hukuman lima tahun penjara, dan tak kalah sedihnya yaitu adanya pengrusakan terhadap pesantren di Pasuruan oleh kelompok geng motor yang terjadi pada 15 februari 2001 (Fauzan Dj, 2011: 4).

Sikap yang tak perlu ditiru yang dilakukan oleh kelompok ormas, Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP), anggota TNI, Polisi, dan anggota Masyarakat akan menyelesaikan ketika akan mengeluarkan pemuda Papua dengan mengeluarkan kata-kata yang dinilai rasis sebagai contoh, “babi, monyet, anjing, usir Papua, usir Papua sekarang juga” Dari sikap tersebut berdampak munculnya demonstrasi yang berakhir dengan sebuah kekerasan pada setiap wilayah Papua seteah peristiwa itu di Surabaya dan Malang.

Pertanyaannya apa yang menjadi tuntutan orang papua melakukan demonstrasi besar-besaran itu pada wilayah Papua? Natalis Pigai menjelaskan bahwa “ketika disebut monyet bagi orang Papua, maka itu masuk dalam wilayah redline”. Informasi tambahan dimana demo ini tidak dikordinir tetapi kehendak sendiri karena merasa orang Papua.

Dari sudut politik orang Papua dengan kesadaran sendiri melakukan demo karena didorong oleh semangat kebersamaan mereka untuk bersatu memperjuangkan suku mereka sebagai manusia ciptaan Tuhan.

Menkopolkam dijabat oleh Wiranto ketika itu berjanji akan mencari dan menangkap pemeran utama unjuk rasa yang berakhir pada tidak keberutalan yang melawan hukum. Namun pernyataan tersebut dilawan oleh Natalius Pigai, sikap yang tidak benar dari Wiranto mendapat informasi yang benar, sebenarnya tidak ada aktor. Pemeran utama, yang sengaja mengeluarkan kata-kata yang tidak manusiawi khusus ditujukan kepada orang asli Papua dengan kata “monyet”.

Peristiwa konflik yang diuraikan di atas, termasuk konflik yang mengarah kepada konflik rasial yang disebabkan oleh perilaku yang memiliki mental rasialisme, bahkan bisa menuju kefasisme dalam makna menganggap orang lain rendah tingkatannya.

Kejadian ini pada hakikatnya bukanlah konflik politik, namun bisa dikategorikan kepada konflik sosial yang mengandung kekerasan dan keberutalan. Peristiwa konflik sosial ini berlanjut kepada konflik Papua.

Sebenarnya salah satu penyebab konflik ini yaitu memiliki mental rasialis yang menjadi kambing hitam adalah mahasiswa Papua, secara fisik mahasiswa Papua memiliki perbedaan dengan mahasiswa lain, misalnya berkulit hitam dan memiliki berambut keriting.

Kalau kita menoleh ke belakang peristiwa ini bukanlah yang pertama, dimana pernah terulang dengan objek individu, serta kelompok misalnya Persatuan sepak bola Persipura, Tahun 2017 orang yang kuliah berasal dari Papua ke Yogyakarta menginap di Asrama Kamasan I, Ketika nilai uang senilai Rp. 10.000 yang ada foto Frans Kaisepo dengan sebutan “monyet” di berita harian.

Barangkali sebutan “monyet” untuk orang yang berasal dari Papua dengan

mewakili masyarakat hitam kulitnya seperti orang Afrika dan negara selain itu merasa, sebutan itu sudah mengganggu di masyarakat lain yang memiliki postur yang sama. Hal ini merupakan sebuah ungkapan yang mengakibatkan rasa benci kepada masyarakat yang memiliki suku lainnya.

Apabila dianalisis sebenarnya akar permasalahan di atas adalah oleh karena belum adanya pemahaman tentang slogan Bhinneka Tunggal Ika. Semboyan Bhinneka Tunggal Ika yang tertera pada burung Garuda yang terletak di bawah burung Garuda semestinya menjadi acuan untuk pemersatu bangsa Indonesia yang kaya dengan suku dan penduduk yaitu memiliki 200 lebih jiwa suku bangsa. Salah satunya adalah Papua itu adalah bagian dari kita bukan malah menjadi daerah asing perlu mendapat perhatian dari masyarakat Indonesia secara keseluruhan.

Proklamator Bung Hatta sudah jauh hari mengingatkan kita semua, dimana bangsa Indonesia bukan saja suku melayu, jawa atau sunda dan lain-lain tetapi termasuk Papua. Walaupun Papua berbeda suku dan postur tubuh tetapi mereka adalah bagian dari masyarakat Indonesia dan merupakan wilayah NKRI yang dijajah oleh kolonial Belanda.

Selanjutnya kasus seperti peristiwa di Lampung Selatan, pada tahun 2012 dimana telah terjadi antara perantau dan penduduk local (asli) yaitu lebih jelasnya antara Balinuraga merupakan perantau dan Desa Agom sebagai penduduk lokal (asli) (Thabrani, 2012).

Selaian dari itu juga terjadi di Lampung Selatan terjadi peristiwa konflik yang disinyalir mengangkat isu etnis asal Bali. Dimana etnis Jawa dan Bali ini masuk ke Lampung Selatan melalui program pemerintah yaitu transmigrasi.

Pistiwa ini terjadi antara 2 suku berlainan suku daerah Lampung dan suku Bali (perantau) yang menyebabnya diawali kejadian dimana pemuda pendatang Balinuraga yang membuat keonaran lalu pemuda asli (lokal) merasa tersinggung dalam perjalanan pergaulan anantara perantau/pendatang yang belum taat dan menghormati adat istiadat warga lokal (Noor, Kompleksitas Konflik Lampung, diakses dari <http://nasional.kompas.com>). Konflik ini sebenarnya bukanlah dampak selisih paham yang dilaksanakan dua pihak, namun masalah tersebut adalah sebuah luka lama yang terjadi masa lalu, lalu peristiwa yang mengakibatkan luka lama muncul lagi (Kajian Perdamaian dan Kebijakan The Habibie Center edisi 06, 2014: 15).

Selain dari itu contoh kasus lain konflik yang terjadi di masyarakat yang berkembang pasca vonis pengadilan terhadap terpidana penistaan agama yaitu Antonius Richmord Bawengan selama 5 tahun Penjara, 08 Februari 2011, yang berdampak pada konflik sosial; seperti pembakaran gereja, mobil dan perkantoran. Hal ini memberikan kesan yang negatif kepada masyarakat Indonesia, dimana konflik bisa disebabkan oleh apa saja, kapan pun dan di mana saja.

Kejadian di Temanggung telah memberi pendidikan yang berharga bahwa konflik sosial dengan bentuk beraneka ragam antara lain isu paham dalam agama yang ada terasa akan memunculkan masalah yang tidak sederhana. Hal tersebut dengan mudah terpancing dengan masalah yang kecil. Konflik yang berujung dengan kekerasan di Jawa Timur tepatnya di Temanggung yang mengangkat isu agama adanya labilitas keberagaman di Indonesia, rapuh dan sosial, isu radikalisasi agama, dan kekacauan yang mengganggu jalinan solidaritas

(kebersamaan). Antara lain adanya kehidupan masyarakat yang mengangkat isu kebencian yang akhirnya memunculkan konflik dalam masyarakat. Tetapi sebenarnya isu identitas sosial, seperti ras, agama, etnis, dapat berujung pada konflik sosial yang bisa ada secara cepat.

Selanjutnya 4 Pilar kebangsaan, hal ini Pancasila adalah dasar negara yang kuat dan tidak akan roboh, “demikian pula doktrin Negara Kesatuan Republik Indonesia”. (Trimedya Panjaitan dan Imran Hasibuhan, 2012: 141-142). Konsep yang dikemukakan oleh Taufiq Kiemas adanya ketegasan terhadap kelompok-kelompok yang akan mengganggu dan bahkan mengacaukan pemahaman terhadap Pancasila dan NKRI. Oleh karena itu tepatlah bila dikatakan bahwa Pancasila adalah dasar Negara dalam mempedomani bagaimana cara berbangsa dalam wilayah NKRI.

Penjelasan tentang Gagasan Kebangsaan Taufik Kiemas sangat jelas dan tegas dimana beliau merupakan tokoh nasional di Indonesia yang banyak dikenal orang, memiliki paradigma dalam memahami dan mengaktualisasikan gagasan kebangsaan. Konsep dari Pemikiran Taufik Kiemas tentang gagasan kebangsaan yang diwujudkan dalam bentuk tulisan di media cetak, baik sikap maupun tindakan nyata yang telah praktekannya sebagai politikus ulung yang membuat penulis bersemangat untuk mengangkat dan menulis pemikiran ini. Oleh karena itu peneliti meneliti dengan judul “Pemikiran politik Taufiq Kiemas tentang gagasan kebangsaan di Indonesia”.

B. Perumusan Masalah

Yang menjadi permasalahan dalam penelitian ini dapat dirumuskan ke dalam pertanyaan:

Bagaimanakah pemikiran Taufiq Kiemas terhadap konsep gagasan kebangsaan di Indonesia?

C. Tujuan Penelitian

Penulisan skripsi ini memiliki tujuan yaitu untuk lebih mengetahui tentang pemikiran Taufiq Kiemas terhadap konsep gagasan kebangsaan di Nusantara.

D. Kegunaan Penelitian

Penulisan skripsi ini berguna untuk yaitu:

a. Kegunaan Teoritis

Penelitian dalam skripsi ini dari perspektif ilmu pengetahuan khusus di bidang politik dan menambah buku rujukan tentang konsep gagasan kebangsaan di Indonesia.

b. Kegunaan Praktis:

Penulisan skripsi ini merupakan salah satu syarat dalam mencapai gelar sarjana yaitu gelar Sarjana bidang Ilmu Politik pada Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik UIN Raden Fatah Palembang dan berharap menambah hasanah ilmu dan pemikiran untuk pengembangan ilmu pengetahuan, serta menambah buku pustaka bagi civitas khususnya FISIP UIN Raden Fatah Palembang yang akhirnya dapat meningkatkan pemahaman mahasiswa/I, khususnya terutama Konsep Gagasan Kebangsaan Di Indonesia.

E. Tinjauan Pustaka

1. Thoriq Dwi Alfian. Skripsi dengan judul “Penanaman Nilai Wawasan Kebangsaan Dan Patriotisme Melalui Pembelajaran Sejarah Di SMA Negeri 1 Wonosari Klaten”. Universitas Negeri Yogyakarta pada Fakultas Ilmu Sosial tahun 2014. Temuannya (1) Dimana pembelajaran mata pelajaran sejarah SMA Negeri 1 Wonosari yang telah diajarkan oleh pendidik mata pelajaran ilmu sejarah. Proses pembelajarannya sudah sesuai dengan sistem pendidikan nasional; (2) Upaya strategi dari pendidik dalam membina wawasan kebangsaan dan nilai-nilai kepahlawanan di SMA Negeri 1 Wonosari.

2 Imam Safi’i. Judul Skripsi “Konsep Wawasan Kebangsaan Menurut Kh. Abdurrahman Wahid Dan Implikasinya Dalam Pendidikan Islam”. Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang pada Fakultas Ilmu Tarbiyah Dan Keguruan tahun 2017. Temuannya 1. Dalam menanamkan nilai-nilai wawasan kebangsaan kepada siswa/I terutama dalam menghormati perbedaan-perbedaan misalnya suku, agama, budaya. Disamping itu menumbuhkan rasa kebersamaan sesama masyarakat. 2. Tidak ada dikotomi antara pendidikan umum dan pendidikan agama, selain itu K.H. Abdurrahman Wahid yang penting bisa berinteraksi secara baik sesama anak bangsa.

3. Amelia Azka Fatima. Skripsi dengan judul “Nilai Kebangsaan Dalam Film Soekarno”. Pada IAIN Purwokerto Fakultas Dakwah Program Studi Komunikasi Dan Penyiaran Islam Jurusan Penyiaran Islam tahun 2019. Temuan karakteristik jujur, bertanggung jawab, adil, bijaksana menjadi syarat untuk calon pemimpin bangsa dan mampu menyelesaikan masalah, baik kecil

maupun yang besar. Disamping itu harus berjiwa patriotik, rela berkorban, berwibawa dan memiliki kharismatik serta mementingkan kepentingan Negara dari pada kepentingan pribadi dan golongan.

4. Sitti Sainab. Artikel yang berjudul “Peningkatan Wawasan Kebangsaan Di Bidang Pengembangan Nilai-Nilai Kebangsaan Pada Kantor Kesatuan Bangsa, Politik Dan Perlindungan Masyarakat (Kesbangpol & Linmas) Kota Sorong”. Universitas Muhammadiyah Sorong Universitas Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Pemerintahan Program Studi Sosiologi,2019. Temuannya program penanaman wawasan kebangsaan diselenggarakan melalui sosialisasi serta forum diskusi. Disamping itu adanya keharusan sosialisasi yang melibatkan semua elemen masyarakat dan aparat pemerintahan.

Kaitan dengan penelitian terdahulu dibandingkan dengan penelitian yang akan penulis teliti mempunyai titik kesamaan, yaitu membahas mengenai wawasan kebangsaan, tetapi mempunyai titik beda yaitu penelitian yang akan diteliti memfokuskan tentang pemikiran Taufiq Kiemas terhadap konsep gagasan kebangsaan di Indonesia.

F. Kerangka Teori

Bagi masyarakat Indonesia kata Nasionalisme tidak asing lagi bagi masyarakat Indonesia. Untuk menjawab rumusan masalah mengenai teori, dalam hal teori yang digunakan adalah teori Nasionalisme dari sisi arti banyak memiliki pengertian bahkan memiliki makna yang berbeda-beda. Dalam penelitian ini, teori Nasionalisme Menurut Taufiq Kiemas yaitu bertolak kepada nilai-nilai bangsa, bicara persoalan bangsa berarti bicara persoalan perasaan, soal keinginan untuk

kebersamaan, nasib sepenanggungan, misalnya dalam masalah bersama. Dalam bahasa Inggris kata bangsa bersal dari kata *nation*. Kalau bahasa Latin bersal dari kata *natio* yang dapat diterjemahkan dengan kata kelahiran (Midian Sirait, 1997: 1). Gorsby dalam mendefinisikan bangsa dengan makna hubungan masyarakat (social) yang penuh kesadaran secara bersama-sama (Gorsby, 2011:13).

Sedangkan Otto Bauer mengartikan kata bangsa yaitu sebuah persamaan sifat (karakter) yang berkembang dengan nasib secara bersama-sama (Midian Sirait, 1997: 2). Selanjutnya bangsa adalah sebuah realita yang berkaitan dengan aspek persamaan kejiwaan, ciri khas, sejarah, budaya, dan politik yang berpangkal kepada keinginan masyarakat (Midian Sirait, 1997: 2).

Lahirnya suatu bangsa tidak terlepas dengan proses sejarah yang panjang. (Gorsby, 2011: 9-10). Ernest Renan di tahun 1882 memberikan kesempatan dengan membuka usulan atau saran mengenai pandangan “bangsa”. (Soekarno, 2005: 3) Ditemukan beraneka ragam pandangan mengenai pandangan bangsa yang membuat sikap kehati-hatian dalam menterjemahkannya sehingga menemukan pemahaman yang benar (Atsuko Ichijo dan Gordana Uzelac, 2005: 1). Keberadaan paham nasionalismetak terlepas dari dampak berupa suatu kekuatan yang canggih.

Adapun ciri yang terkandung dari konsep bangsa itu seperti agama, bahasa, ras, dan wilayah (Midian Sirait, 1997: 2). Bahkan bangsa merupakan dasar dari ideologi yang diberi nama Nasionalisme. Istilah lain dari Nasionalisme adalah merupakan ideologi yang lahir dari sejumlah gerakan otonom yang kadangkala termarjinalkan. Sehingga bisa berdampak pada rakyat yang beraneka ragam yang

mengakibatkan adanya interaksi dalam masyarakat yang tersinggung dari kelompok masyarakat lain yang menimbulkan konflik yang tidak diinginkan. Sebagaimana telah diterangkan pada bab sebelumnya. Hobsbawm mengartikan kata nasionalisme sebagai sikap yang berpandangan dimana kelompok politik seharusnya seiring sejalan (*congruent*) (Sardo, 2005:17).

Smith mengartikan kata nasionalisme, beliau menggunakan istilah “gerakan ideologis”. Berlainan dengan John Breuily. John menggunakan istilah “Ideologis dengan politik”. Beliau beralasan akan mengalami kesulitan yang berlaku pada gerakan ideologis untuk rival kata intelektual pada kaitan mempersoalkan peristiwa Indonesia. Tetapi dalam menentukan kebijakan dengan pola budaya yang berbeda serta bahkan suasananya terpaksa oleh karena unsur politik (Sardo, 2005:20). Dengan demikian kata nasionalisme itu bisa saja karena secara kesadaran ataupun terpaksa dalam kaitan dengan bangsa.

G. Metodologi Penelitian

1. Jenis Penelitian

Penelitian ini menggunakan bentuk atau jenis penelitian (*library research*) (kepuustakaan). Yang dimaksud dengan penelitian *library research* (pustaka) adalah bentuk penelitian yang dilakukan di perpustakaan guna mengumpulkan dan menganalisis data yang bersumber dari literatur, baik berupa buku-buku yang berjilid, seperti majalah- majalah ilmiah yang diterbitkan secara berkala, kisah-kisah sejarah, dokumen-dokumen, dan materi literatur lainnya, yang dapat dijadikan sumber rujukan untuk menyusun suatu laporan yang sempurna. (Abdurrahmat Fathoni, 2011: 95-

2. Pendekatan/Metode Penelitian

Studi tokoh merupakan salah satu jenis penelitian kualitatif. Penelitian semacam ini dapat berbentuk studi kasus, multi kasus, multi situs, penelitian historis, penelitian kepustakaan, penelitian ekologi, penelitian fenomenologis, atau penelitian masa depan. Sehingga, kaidah-kaidah yang dibangun dalam studi tokoh mengikuti kaidah penelitian kualitatif. (Syahrin Harahap, 2011: 15)

Penelitian kualitatif didefinisikan sebagai suatu proses yang mencoba untuk mendapatkan pemahaman yang lebih baik mengenai kompleksitas yang ada dalam interaksi manusia. Proses dalam penelitian kualitatif merupakan penekanan dalam penelitian kualitatif. Oleh karenanya, dalam melaksanakan penelitian, peneliti lebih fokus pada proses dari pada hasil akhir (Jonathan Sarwono, 2006: 193).

Sehubungan dengan hal tersebut, pendekatan yang digunakan dalam studi tokoh adalah pendekatan tematis (*typical approach*). Yaitu aktivitas seseorang dideskripsikan berdasarkan sejumlah tema/topik yang menggunakan konsep-konsep yang biasanya dipakai untuk mempelajari suatu bidang keilmuan tertentu, misalnya studi tokoh mengenai pemikiran politik di Indonesia dan sebagainya. Pendekatan ini bersifat analitis, sehingga dapat membedakan antara pemikiran sang tokoh dari pemikiran tokoh lain dalam suatu bidang keilmuan tertentu

3. Jenis Data

Adapun dalam penelitian ini jenis data, yaitu:

a. Bahan primer

Data yang digunakan merupakan data utama yaitu Buku Gelora Kebangsaan Tak Kunjung Padam yang mengupas tentang pemikiran Taufiq Kiemas.

b. Bahan sekunder

Dalam bahan sekunder ditempuh menggunakan literatur yang dikumpulkan berupa dokumen-dokumen yang berkaitan serta yang mempunyai titik kesamaan permasalahan, misalnya referensi mengenai kebangsaan, buku Nasionalisme dan sebagainya.

c. Bahan tersier

Data tersier merupakan data yang bersifat pelengkap dari data primer dan data sekunder yang bersumber berupa ensiklopedia, koran, majalah, kamus, dan lain-lain.

4. Metode Pengumpulan Data

Metode studi dokumenter merupakan suatu cara yang digunakan dalam penelitian. Metode studi dokumenter adalah suatu metode dalam pengumpulan data dengan menghimpun buku-buku dan sumber data lain yang relevan dengan permasalahan yang dibahas, terutama memfokuskan terutama Pemikiran Taufiq Kiemas Terhadap Konsep Gagasan Kebangsaan Di Indonesia.

5. Uji Validitas Data

Validitas eksternal merupakan alat uji validitas data dalam penelitian ini, yaitu hasil penelitian yang kumpulkan misalnya sampel, settingan, serta sampel yang baru dalam generalisasi kualitasnya (Ansem Strauss, 2009: 67).

Adapun uji validitas menggunakan hal-hal sebagai berikut: a) Triangulasi Triangulasi (Lexy. J. Moleong, 2002: 3). Triangulasi adalah suatu teknik penelitian tentang keabsahan dari suatu data dengan membandingkan dengan data yang kumpulkan dengan sumber data yang lain. Teknik Triangulasi dapat dilakukan sebagai berikut:

- Triangulasi sumber, yaitu dengan cara membandingkan apa yang dikatakan oleh subyek dengan dikatakan informan dengan maksud agar data yang diperoleh dapat dipercaya karena tidak hanya diperoleh dari satu sumber saja yaitu subyek penelitian, tetapi data juga diperoleh dari beberapa sumber lain seperti tetangga atau teman subyek.
- Triangulasi metode, yaitu dengan cara membandingkan data hasil pengamatan dengan data hasil wawancara dan membandingkan data hasil pengamatan data hasil wawancara dengan isi dokumen yang berkaitan. Dalam hal ini peneliti berusaha mengecek kembali data yang diperoleh melalui wawancara.

Selanjutnya b) Validitas dalam pengujian berdasarkan kepada kepastian hasil penelitian yang sudah valid dan ketepatan pendapat para ahli/orang, partisipasi, seorang peneliti, istilah dalam penelitian dinamakan dengan kelayakan, keaslian, dan kredibilitas (Ansem Strauss, 2009).

Menurut Sugiono ada dua validitas adalah, validitas yang bersifat internal dan validitas yang bersifat eksternal. Validitas yang bersifat internal membahas mengenai tingkat ketepatan dalam sebuah penelitian yang menjadi target. Validitas yang bersifat eksternal membahas mengenai tingkat ketepatan dari hasil penelitian yang dilaksanakan dengan populasi dan memilih sebuah sampel.

6. Teknik Analisis Data

Adapun tehnik analisis data menggunakan teknik analisis kualitatif, yaitu teknik penguraian data melalui kategorisasi, pencarian dan perbandingan serta menganalisis aneka data dalam mengambil suatu induksi (kesimpulan), ataupun melakukan teknik analisis deduktif (pernyataan umum lalu dikaitkan dengan pertanyaan yang sederhana), yang kemudian mencari dan menetapkan permasalahannya. Di samping itu agar terarah dalam penelitian ini, peneliti mengacu kepada Buku Panduan dalam Penulisan Skripsi yang diterbitkan oleh Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik UIN Raden Fatah Palembang.

BAB II

LANDASAN TEORI

A. Teori Empat Pilar Kebangsaan

Yang dimaksud dengan Empat Pilar Kehidupan Berbangsa dan Bernegara adalah Pancasila, UUD 1945, NKRI dan Bhinneka Tunggal Ika. Merujuk pada konsep Empat pilar kebangsaan yang dipopulerkan oleh MPR RI, dimana Pancasila merupakan dasar dan ideologi negara, UUD 1945 merupakan konstitusi negara Indonesia serta ketetapan MPR, NKRI merupakan bentuk Negara, sedangkan Bhineka Tunggal Ika sebagai slogan Negara (MPR RI Periode 2014-2019: xxiii)

Dari sisi pengamalan sehari-hari Empat pilar tersebut untuk masyarakat Indonesia merupakan konsep yang jelas menuju bangsa yang kuat dan menuju Indonesia yang sifat kepribadian bangsa sendiri. Terhadap pelaksana Negara dan masyarakat Indonesia wajib mempunyai keimanan, dimana nilai-nilai etika masyarakat akan menuju pada tatanan bangsa yang bersatu, merdeka, berdaulat, adil dan makmur. (Pimpinan MPR Dan Tim Kerja Sosialisasi MPR Periode 2014-2019: 8).

Selanjutnya nilai-nilai yang ada pada empat pilar kebangsaan dapat dijelaskan dengan:

1. Nilai Ketuhanan.

Ketuhanan Yang Mah Esa memiliki unsur religius yaitu adanya keimanan kepada Pencipta Alama semesta, Tuhan yang Maha Kuasa yang maha suci dari kelemahan (MPR RI Periode 2014- 2019: 8). Maka Tuhan yang Maha Agung itu,

Zat yang adanya mutlak harus “ada”. Dengan demikian berarti unsur Ketuhanan Yang Maha Esa memiliki makna ketaatan kepada Tuhan Yang Maha Kuasa sebagai sumber, prinsip bernegara (MPR RI Periode 2014- 2019: 97)

Konsep keyakinan terhadap Tuhan Yang Maha Kuasa itu merupakan keimanan yang bersifat tak nyata atau sulit untuk diteliti kebenarannya secara logika, tetapi keimanan yang bersumber pada pemahaman secara tepat dan yang dapat diteliti oleh norma-norma yang ada. Oleh karena itu, implikasi dari itu masyarakat adanya kepercayaan kepada ketuhanan Yang Maha Kuasa (Syahrial Syarbaini, 2012: 39). Pemerintah menjamin semua masyarakat untuk menyembah Tuhan Yang maha Esa.

Walaupun pemerintah sudah menjamin keluwesan semua penganut beragama, dalam melaksanakan kepercayaannya tentulah diiringi sikap menghargai dan sikap saling hormat menghormati pemeluk agama yang lain (Syahrial Syarbaini, 2012: 45). Kebebasan dalam beragama merupakan hak yang mendasar dari hak-hak lainnya, hal ini disebabkan karena keluwesan dalam memilih agama yang diyakinya itu berasal dari harkat dan martabat manusia sebagai makhluk dari sang Pencipta. Konsep keluwesan (kebebasan) dalam memilih agama itu bukanlah semata-mata suatu penghargaan dari Pemerintah/negara atau kelompok, tetapi beralasan pada masyarakat dengan cara sukarela (Syahrial Syarbaini, 2012: 97). Adapun yang telah dijabarkan UUD 1945 itu hanya dari pola kesepakatan bagi serba berkecukupan masyarakat, supaya dapat berdampingan antara satu dengan yang lainnya. Sebagaimana yang telah dijelaskan pasal 29 UUD 1945 yaitu:

“Negara menjamin kemerdekaan tiap-tiap penduduk berhak untuk memeluk agamanya masing-masing dan untuk peribadatan menurut agamanya dan kepercayaannya itu” (MPR RI, 2017: 183).

Berdasarkan prinsip dimana semua masyarakat dapat selalu menghormati nilai religius sesuai kepercayaannya (Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia, 2017: 47). Selanjutnya nilai ketuhanan merupakan dasar dari nilai sila kedua sampai dengan sila kelima (MPR RI, 2017: 93). Dengan istilah lain nilai ketuhanan akan menjiwai dan membimbing menuju Pancasila sila kedua dan sekaligus sebagai bertekad untuk bersatu yang berbentuk Negara kesatuan yang memiliki daulatan dalam permusyawaratan/perwakilan untuk membentuk sebuah keadilan masyarakat untuk setiap rakyat Indonesia (Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia, 2017: 40).

Proklamator Bung Karno, mengatakan dimana Sila pertama menjadi dasar untuk memimpin keinginan negara dalam menyelenggarakan karakter yang baik untuk semua masyarakat. Oleh karena itu dasar ketuhanan yang maha esa, sehingga negara memperoleh dasar nilai moral yang luhur, selanjutnya sila pertama ini akan membimbing kearah jalan yang baik, benar, adil, jujur dan solidaritas (Kaelan, 1999: 86).

2. Nilai Kemanusiaan.

Nilai kemanusiaan dalam sila kedua ini diwarnai sila pertama, dengan demikian sila kedua merupakan sumber nilai dari sila pertama. Oleh karena itu makhluk Tuhan merupakan kelompok manusia yang berasal dari Tuhan Maha pencipta (Kaelan, 1999: 53). Selanjutnya dalam pembukaan UUD 1945 paragraf 1, menjelaskan :

“Bahwa sesungguhnya kemerdekaan itu ialah hak segala bangsa dan oleh karena itu, penjajahan di atas dunia harus dihapuskan, karena tidak sesuai dengan perikemanusiaan dan perikeadilan....”. Perwujudan sila kedua adalah memiliki konsep seperti kelestarian dan keberlangsungan kehidupan secara pribadi dan sosial yang mempunyai derajat dan kedudukan. Sehingga semua orang wajib memperoleh sebuah jaminan hak milik secara pribadi (Kaelan, 1999: 54).

Intinya jika kita mau mengambil pengalaman dan pengamalan dalam kehidupan sehari-hari, akan dapat memahami nilai-nilai kemanusiaan secara sempurna. Sebagai contoh sederhana dalam hubungan sehari-hari, kita wajib menggunakan konsep dimana orang tua mencintai yang masih muda dan yang masih muda menghargai yang sudah tua tanpa membedakan agama, ras, harta, pangkat, warna kulit, jabatan atau kedudukan dan sebagainya. Karena idealnya sikap tersebut yang dikedepankan. Hal ini termuat dalam Al-Quran yang maknanya bahwa manusia dipandang oleh Tuhan yaitu manusia taat dan bertakwa kepada Allah SWT. (Kaelan, 1999: 195).

3. Nilai Persatuan.

Kata persatuan bermakna bulat atau utuh (tidak dapat dipisah-pisah). Kaitan dengan NKRI bermakna bersatu padunya dalam kemajemukan agama, suku, agama, ras, dan sebagainya. (Kaelan, 1999: 100). Apabila dikaitkan dengan sila Persatuan Indonesia, bermakna bahwa persatuan pada bingkai NKRI yaitu persatuan politik, Hankam, ekonomi, dan sosial budaya.

Sila ketiga ini tertera didalam pembukaan UUD 1945 dimana bertujuan melindungi segenap bangsa dan seluruh tumpah darah Indonesia, untuk kemajuan dan kesejahteraan serta kecerdasan bangsa, dan mewujudkan perdamaian dunia

yang abadi dan berkeadilan sosial. Hal ini sesuai dengan alenia keempat pembukaan UUD Dasar 1945 yang berbunyi, “kemudian dari pada itu untuk membentuk suatu pemerintahan negara Indonesia yang melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia”. Sila ketiga merupakan realita ideologi kerakyatan yang dijiwai Ketuhan yang Maha Esa dan Kemanusiaan yang dan Beradab. (Kaelan, 1999: 41).

Pengamalan sila ketiga perlu pembinaan dan pengembangan kontinuitas, agar keberagaman yang bukan merupakan hambatan bangsa menuju persatuan, dalam motto “Bhineka Tunggal Ika”.

Motto bermacam-macam tapi tetap satu bagi rakyat banyak sudah terkenal sejak dulu bahkan sebelum merdeka. Motto ini mengandung makna “bersatu dalam perbedaan dan berbeda dalam persatuan”.

Meskipun rakyat merupakan Negara kaya dengan keberagaman dan perbedaan, namun hal tersebut bukanlah sebuah persoalan bagi masyarakat nusantara mewujudkan pada NKRI (Idrus Ruslan, 2015: 243).

Pengamalan nilai-nilai dalam semboyan persatuan adalah pengamalan persatuan Indonesia. Yang dilakukan dengan sukarela dengan sikap terhadap adanya kemajemukan, sehingga bangsa Indonesia tidak menjadi terpecah belah.

Menurut Idrus Ruslan apabila Bhinneka Tunggal Ika terbentuk sebagai motto lambing pergerakan rakyat Indonesia, sehingga menjadi tantangan bagi bangsa Indonesia, dalam memahami sila ketuhanan yang Maha Esa, Kemanusiaan yang adil dan beradab, serta persatuan Indonesia (Idrus Ruslan, 2015: 244).

Sila ketiga dan motto Bhineka Tunggal Ika merupakan motto kesatuan masyarakat Indonesia, dan ini adalah realita penting dalam membentuk sikap tenggang rasa kepada orang lain.

4. Nilai Kerakyatan Permusyawaratan/Perwakilan (Demokrasi).

Kerakyatan merupakan konsep konstitutif, konsep pembentuk dari negara. Oleh karena itu Negara tidak akan ada apabila adanya kekosongan masyarakat. Oleh karena itu rakyat adalah unsur dari bentuknya. Maka dari itu unsur “kerakyatan” dapat dimaknai kedaulatan ada ditangan rakyat. Dalam hukum tata Negara disebut paham kedaulatan masyarakat atau demokrasi (Idrus Ruslan, 2015: 101).

Artinya, kedaulatan dipegang oleh rakyat Indonesia dalam paham demokrasi. Dalam makna bahwa Demokrasi yang dilakukan dengan cara perwakilan disebut dengan Demokrasi tidak langsung, hal ini dirasakan sangat penting dimana secara teritorial Indonesia adalah Negara yang luas dan padat penduduk. Sedangkan bentuk pelaksanaannya dilaksanakan secara langsung dalam memilih Presiden maupun dengan cara referendum. Sila keempat, bermakna bahwa rakyat memiliki kekuasaan tertinggi. Kalimat hikmat kebijaksanaan dapat bermakna bahwa dengan keadaan fisik yang normal dan pemikiran yang sehat dapat memperhatikan nilai persatuan, mengutamakan masyarakat dari pada kepentingan kelompok atau golongan.

Selanjutnya sifat permusyawaratan dengan berkepribadian ala Indonesia tentu akan dapat bermufakat dengan mempertimbangkan aspirasi rakyat menuju keputusan yang bulat dari hasil mufakat tersebut (Idrus Ruslan, 2015: 42).

Kaitan antara demokrasi dan Pancasila sangat jelas dan terang, namun kata yang digunakan yaitu kerakyatan (Sunoto, 1985: 73). Sehingga sangat jelas, bahwa rakyatlah yang berdaulat. Dengan demikian keadilan bagi seluruh rakyat Indonesia merupakan dasar berdemokrasi. Sekarang ini demokrasi Pancasila yang berlaku, mengandung makna bahwa seluruh sikap dan tindak tanduk bangsa Indonesia wajib dijiwai sila-sila yang lain dalam Pancasila. (Sunoto, 1985: 102).

5. Nilai Keadilan Sosial.

Sila keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia memiliki makna bahwa sebuah keadilan adalah milik bangsa Indonesia apapun latar belakangnya, baik agama, sosial, budaya, politik, ras, serta suku. Sehingga seluruh masyarakat Indonesia dimanapun berdomisili dalam NKRI maupun yang berdomisili diluar negeri. Beranjak dari penjelasan diatas, dapat disimpulkan bahwa seluruh masyarakat Indonesia memiliki hak untuk mendapat keadilan dalam semua sisi kehidupan.

Untuk mewujudkan rasa keadilan bagi masyarakat, wajib diwarnai dan berpedoman kepada Pancasila. Konsep keadilan sosial yang akan dicapai rakyat secara keseluruhan yaitu rakyat yang adil dalam kemakmuran yang mengacu pada nilai-nilai Pancasila dalam bingkai NKRI. Nilai kelima ini merupakan keinginan puncak dan paling nyata. Bahkan nilai ini dijabarkan dalam pembukaan UUD 1945, oleh karena itu tercermin dalam kata “mewujudkan” konsep sial kelima (Sunoto, 1985: 79). Pada perwujudannya perlu ditunjang dengan nilai-nilai moral dan jauh dari perilaku-perilaku yang bertentangan dengan Pancasila.

Dasar keadilan buah hasil dari nilai etika pada sila Ketuhanan, perikemanusiaan, persatuan dan keadilan bagi rakyat. Di lain itu realita keadilan

bagi masyarakat tersebut wajib memperhatikan nilai moral dari nilai-nilai keempat sila lainnya. Menurut Notonagoro sila keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia dijiwai oleh sila pertama yaitu nilai Ketuhanan, kemanusiaan yang adil dan beradab, persatuan Indonesia, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan (Sunoto, 1985: 81).

B. Teori Nasionalisme

Nasionalisme dapat didefinisikan perilaku politik dalam memahami sosial dalam negara yang mempunyai kesesuaian dalam budaya dan wilayah. Perilaku politik dalam memahami sosial merupakan ideologi negara yang modern, Menurut paham Marxis tentang kebangsaan pada intinya adalah titik persinggungan antara politik, teknologi dan transformasi sosial (Hosbawm, 1992: 57).

Pada abad ke-19 teori kebangsaan sudah dikenal dan sudah melalui berkali-kali peralihan dalam makna. Pra 1884, kata *nacion* atau *nation* dimaknai suatu kelompok masyarakat provinsi atau negeri atau bisa juga kerajaan, serta warga Negara asing. Selanjutnya Hosbawm (1992: 58), mengartikan *nation* dengan pemerintahan secara bersama yang tertinggi yang memiliki pengakuan Negara. Disamping itu wilayah dan penduduknya adalah satu kesatuan yang tidak dapat dipisah-pisahkan. Menurut Enciclopedia Brasileira Merito kata *nation* memiliki makna, yaitu;

...komunitas masyarakat dari negara, yang hidup di bawah pemerintahan yang sama dan memiliki sama dalam suatu kepentingan; kelompok dari penduduknya memiliki suatu tradisi, aspirasi dan kepentingan bersama, dan

tunduk kepada kekuasaan pemerintahan pusat dengan bersikap untuk mempertahankan persatuan dan kesatuan.

Menurut Mulyana Kata Nasionalisme juga memiliki makna suatu kemampuan untuk mencintai bangsa dan negara (Martaniah, 1990: 17). Disamping itu juga Mulyana kata nasionalisme memiliki makna suatu kesadaran untuk bernegara. Kata Nasionalisme bukan saja alat perekat dalam pluralistik, tetapi juga memiliki fungsi sebagai wadah yang menjelaskan identitas Indonesia yang bersifat majemuk dalam beraneka budayanya. Adapun tujuan Nasionalisme adalah mewujudkan nilai-nilai dasar yang bertitik tolak pada kepentingan umum dan menjauhi sikap segala kepentingan pribadi yang akan menghancurkan tatanan kehidupan bersama.

C. Teori Pancasila.

Dari sisi bahasa Pancasila memiliki kata dasar "Panca" (berasal dari bahasa sansekerta) yang bermakna lima, sedangkan kata yang kedua adalah kata "Syla" yang bermakna batu sendi. Dengan demikian Pancasila bermakna formula dari kehidupan berbangsa, bernegara dalam wilayah NKRI. Pancasila juga merupakan alat pemersatu yang ampuh dalam mencapai tujuannya serta sebagai sumber dari segala sumber (Idrus Ruslan, 2015: 225).

Sejarah telah mencatat bahwa bagi bangsa Indonesia Pancasila itu bukanlah hal yang baru, tetapi sudah dikenal berabad-abad sejak zaman kerajaan yang berkembang di Indonesia sejak dahulu, misalnya tercatat dalam buku Negarakertagama tulisan Empu Prapanca, selanjutnya tercatat pada karya berupa buku dari Sutasoma yang karang oleh Empu Tantular. Bahkan dijelaskan pada

karya Sutasoma bahwa kata Pancasila memiliki makna “berbatu sendi yang lima”. (Rozikin Daman, 1992: 1).

Lima rumusan yang terdapat dalam Pancasila yang diabadikan pada pembukaan UUD 1945 terdapat lima sila dalam Pancasila. Lima sila di atas secara hukum pengesahannya pada tanggal 18 Agustus 1945 oleh PPKI. Dengan demikian masyarakat Indonesia telah mempunyai ideologi yaitu Pancasila merupakan perekat dan pemersatu bangsa Indonesia yang pluralistik. Selain dari itu Pancasila merupakan kesepakatan nasional yang semua elemen masyarakat menerima atau tidak menolak.

Pancasila merupakan alat yang ampuh untuk menyatukan elemen bangsa dan pedoman yang hidup menuju tujuannya. Dalam kaitan itu, Pancasila adalah dasar kepribadian, jati diri, moralitas, dan arah kedamaian bangsa (MPR RI, 2017: 12).

Selanjutnya defenisi dari Pancasila versi para ahli dapat dijelaskan:

a. Defenisi Pancasila versi Para Ahli

1. Ir. Soekarno

Pancasila yaitu merupakan pilar bagi negara yang mampu mengabadikan bangsa Indonesia dalam bentuk persatuan. (Sukarno, 2017: 98).

2. Muhammad Yamin

Kata Pancasila berakar dari 2 kata yaitu panca dan sila. Kata Panca bermakna 5 dan sedangkan kata sila yang bermakna sendi, sehingga Pancasila adalah 5 sendi yang merupakan dasar dan norma dalam mengatur peri kelakuan bangsa Indonesia menuju kebaikan (Estriana Fiwka, 2017: 4).

3. Kartohadiprodjo

Pancasila adalah Ideologi yang hidup. Disamping itu juga Pancasila merupakan filsafat bangsa itu yang sebenarnya menyatu dengan semangat bangsa (Slamet Sutrisno, 2006: 67).

4. Ruslan Abdulgan

Pancasila adalah filsafat negara yang ada dalam keinginan bersama bangsa bangsa Indonesia. Selanjutnya Pancasila adalah hasil perenungan yang sangat dalam oleh pendiri Negara, lalu dimasukkan pada suatu “sistem” yang tepat.

Selanjutnya Notonagoro, menjelaskan bahwa filsafat Pancasila yang merupakan pengetahuan yang ilmiah, dalam hal ini adalah hakikat Pancasila (Heri Herdiawanto dan Jumanta Hamdayama, 2010: 8).

b. Sekelumit kelahiran Pancasila

Pancasila merupakan fondasi dalam berfilsafat dan merupakan keyakinan dari Negara Indonesia. Lahirnya Pancasila melalui proses yang panjang dalam sejarah bangsa Indonesia (Kaelan, 1999: 53).

Perjuangan bangsa Indonesia menuju cita-citanya bukanlah waktu yang singkat, melalui proses berabad-abad dengan tahapan perjuangan dalam merumuskan Pancasila sebagai dasar negara. Oleh karena itu sepantasnya dicatat oleh sejarah dengan tinta emas, misalnya kejadian-kejadian yang muncul, terutama dalam lahirnya perumusan pancasila.

Terbentuknya negara Indonesia menurut Mr. Muhammad Yamin, tidak terlepas dari kerajaan-kerajaan yang terkenal dan tua di Indonesia. Misalnya kerajaan Sriwijaya di Palembang provinsi Sumatera Selatan sekitar abad VII-XII dan kerajaan Majapahit di Jawa Timur sekitar abad XIII-XVI.

Kedua kerajaan itu adalah awal sejarah bangsa Indonesia dan masyarakat Indonesia ketika itu telah diakui dan sudah memenuhi syarat sebagai syarat memiliki negara. Disamping itu juga kedua kerajaan tersebut telah berbentuk Negara yang berdaulat, bersatu, dan memiliki wilayah yang luas meliputi wilayah Indonesia ini. Kedua kerajaan itu telah mencapai dalam taraf hidup yang sejahtera (Syahrial Syarbaini, 2012: 68).

Pidato Soekarno mengenai terbentuknya Pancasila melalui sidang pertama BPUPKI, 1 juni 1945, kata yang digunakan adalah jembatan Emas (Backy Krisnayuda, 2016: 2).

Kandungan isi dari pidato Soekarno 1 juni yaitu “negara semua buat semua”, negara bukan buat perorangan, dan juga negara bukan buat golongan.

“Baik saudara-saudara yang bernama kaum bangsawan yang di sini, maupun saudara-saudara yang dinamakan kaum Islam, semuanya telah mufakat kita hendak mendirikan suatu Negara ‘semua buat semua’. Bukan buat satu orang baik golongan bangsawan, maupun golongan yang kaya, tetapi ‘semua buat semua’ ” (Backy Krisnayuda, 2016: 30).

Selanjutnya Soekarno menerangkan lebih mendalam mengenai dasar-dasar negara yang disebut Pancasila dan atas dasar lima dasar tersebut bangsa Indonesia membentuk negara Indonesia (Backy Krisnayuda, 2016: 3).

Adapun rumusan lima dasar itu yaitu: Kebangsaan Indonesia, Internasionalisme, atau peri-kemanusiaan, Mufakat atau demokrasi, Kesejahteraan social, dan Ketuhanan yang berkebudayaan.

Ada pertanyaan yang mendasar tentang apakah mampu lima dasar negara dapat menyatukan dan menjadi acuan keindonesiaan itu? Soekarno menjawab angka lima itu mengandung makna yang dalam dan filosofi yang bernuasi spritual. Lebih lanjut Soekarno menjelaskan bahwa rukun Islam itu ada lima. Pandawa dalam bilangan Pendawa ada lima. Selain itu juga dapat dijelaskan, bahwa adat istiadat Jawa itu ada lima larangan dengan simbol kode moral, yang populer dinamakan istilah “Mo-limo” (Backy Krisnayuda, 2016: 32).

Rumusan Pancasila yang diusulkan oleh Soekarno selanjutnya dibahas lewat Panitia Delapan yang didirikan oleh Ketua Sidang BPUPKI, dengan mendirikan “Panitia Sembilan” yang akan melengkapi rumusan Pancasila dari Pidato Soekarno ke dalam rumusan versi Piagam Jakarta pada 22 Juni 1945. Sehingga tanggal 18 Agustus 1945 adanya pengesahan oleh PPKI yang berhasil rumusan terakhir dari Pancasila yang secara konstitusional dapat mengikat dalam kehidupan bernegara (Backy Krisnayuda, 2016: 28).

Rumusan lima sila sebagai dasar tercantum dalam pembukaan UUD 1945 yaitu:

- 1). Ketuhanan Yang Maha Esa.
- 2). Kemanusiaan yang adil dan beradab.
- 3). Persatuan Indonesia.
- 4). Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan.
- 5). Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.

Selanjutnya kelima sila yang merupakan nilai kehidupan masyarakat Indonesia yang luhur dan dasar negara Republik Indonesia (Backy Krisnayuda, 2016: 44).

c. Pancasila Merupakan Dasar Negara

Pancasila merupakan Dasar Negara Indonesia, merupakan dasar falsafah negara, dan juga merupakan ideologi negara. Dapat dipergunakan sebagai alat dan pedoman mengatur pemerintahan negara. Pancasila merupakan dasar negara ini sudah sesuai dengan sejarah terbentuknya yang dipersiapkan sebagai dasar negara. Secara jelas dijelaskan dalam kalimat pada pembukaan UUD 1945 sebagai berikut:

“maka disusunlah kemerdekaan kebangsaan Indonesia itu dalam suatu Undang-Undang dasar negara Indonesia yang terbentuk dalam suatu susunan negara Republik Indonesia yang berkedaulatan rakyat, dengan berdasar kepada: Ketuhanan Yang Maha Esa” (Backy Krisnayuda, 2016: 10).

Penjelasan Notonagoro bahwa Pancasila merupakan dasar negara memiliki tempat tinggi dan istimewa dalam sistem hidup bernegara dan hukum bangsa Indonesia. Berkaitan kebijaksanaan politik dalam maupun luar negeri harus berdasarkan Pancasila. Disamping itu fungsi dasar negara merupakan fungsi pokok dan mendasar. Penjelasan tentang fungsi pokok dari Pancasila yang merupakan dasar negara ini dimasukkan dalam UUD 1945 berupa tafsir resmi dari Pancasila sebagai dasar Negara (Backy Krisnayuda, 2016: 10). Pancasila merupakan dasar negara yang bersumber dari segala sumber hukum Indonesia.

D. Teori Pemikiran Politik.

a. Pemikiran

Kata Pemikiran dalam bahasa Indonesia dapat bermakna mengeluarkan suatu hasil yang berupa kesimpulan berupa pikiran atau akal budi, secara sempurna. Berbeda pengertian menurut Suyahmo (Suyahmo, 2014: 4), dimana pemikiran yaitu suatu proses pergerakan mental menuju keadaan yang lain, dari suatu tempat ke tempat yang lain, dari yang belum ada pindah ke suasana yang ada.

Kegiatan berfikir merupakan ciri khusus manusia yang hidup secara normal. Oleh karena itu salah satu pembeda antara manusia dengan makhluk lain. Selain dari itu Kaelan berpendapat bahwa (Kaelan, 2002: 11), berfikir yang selalu berhubungan dengan berfikir yang dinamis dan yang sebenarnya dalam berfilsafat. Oleh karena itu setiap pemikiran manusia adalah hasil pemikiran manusia dalam berfilsafat.

Hasil dari pemikiran manusia biasanya berhubungan erat dengan berfikir logika. Karena dampak dari lahirnya pemikiran dari manusia akan dipengaruhi oleh logika pemikiran dari yang bersangkutan yaitu dipengaruhi oleh dua faktor. Dua faktor tersebut adalah faktor pemikiran seseorang terhadap suatu obyek tertentu mampu ada atas penafsiran sendiri tanpa intervensi pemikiran orang lain.

Faktor selanjutnya adalah pemikiran seseorang terhadap suatu obyek tertentu dapat dipengaruhi oleh orang lain, dimana letak penafsiran seseorang atas obyek tertentu dapat dipengaruhi oleh faktor-faktor lain yang lebih banyak berpengaruh baik secara langsung atau tidak langsung.

Ada 10 ciri berfikir secara filsafat menurut Kaelan (Kaelan, 2002: 12-19) yaitu sebagai berikut:

1. Bersifat kritis, yaitu senantiasa mempertanyakan segala sesuatu, problema-problema, atau hal-hal lain yang sedang dihadapi oleh manusia sehingga ciri berfikir kefilosofan bersifat diamis.
2. Bersifat mendalam, yaitu pemikiran bukan hanya sampai fakta-fakta yang sifatnya sangat khusus dan empiris belaka namun sampai intinya yang terdalam yaitu substansinya secara universal.
3. Bersifat konseptual, yaitu pemikiran yang berkaitan dengan masalah-masalah yang kongkrit yang dihadapi oleh manusia, kemudian dengan generalisasi dan abstraksi maka sampailah pada suatu kesimpulan yang bersifat konseptual.
4. Koheren, yaitu berfikir secara kefilosofan bukanlah merupakan suatu pemikiran yang acak, kacau, dan fragmentaris. Pemikiran kefilosofan berusaha menyusun suatu bagan yang konseptual dan runtut atau koheren. Tidak terdapat pertentangan dan terdapat suatu hubungan.
5. Bersifat Rasional, yaitu ciri pemikiran yang berusaha menyusun bagan konseptual yang rasional, yaitu bagan yang bagian-bagiannya berhubungan secara logis diantara satu dengan lainnya. Namun, rasional dalam pemikiran kefilosofan adalah terbuka terhadap kritik.
6. Bersifat Komprehensif, yaitu pemikiran kefilosofan bukan hanya berdasarkan pada suatu fakta yang khusus dan individual saja, yang kemudian sampai pada kesimpulan yang khusus dan individual juga,

namun pemikiran harus sampai pada kesimpulan yang sifatnya paling umum, artinya tidak ada sesuatupun yang berada di luar jangkauannya.

7. Bersifat Universal, yaitu pemikiran yang telah sampai pada suatu kesimpulan yang bersifat umum bagi seluruh umat manusia dimanapun, kapanpun, dan dalam keadaan apapun.
8. Bersifat Spekulatif, yaitu pengajuan dugaan-dugaan yang masuk akal yang melampaui batas-batas fakta. Tujuannya adalah penyatu paduan dari semua pengetahuan, pemikiran, dan pengalaman manusia menjadi suatu pandangan yang komprehensif.
9. Bersifat Sistematis, yaitu pemikiran kefilsafatan senantiasa memiliki bagian-bagian dan diantara bagian-bagian tersebut senantiasa berhubungan antara satu dengan lainnya. Hubungan tersebut terjalin dalam suatu kerjasama yang saling ketergantungan.
10. Bersifat Bebas, yaitu berfikir secara bebas untuk sampai pada hakikat yang terdalam dan universal sehingga ciri kreativitas senantiasa ada dalam cara berfikir kefilsafatan.

b. Pemikiran Politik

Kata politik menurut bahasa dapat bermakna cerdas dan bijaksana. (Kencana, 2010: 9). Menurut pandangan sejarah bahwa kata politik sudah ada sejak zaman Yunani, oleh karena itu dalam bahasa arab istilah politik dinamakan siyasah yang juga sudah ada semenjak munculnya Negara islam di Madinah. Kata siyasah dapat diartikan sebuah usaha atau ikhtiar dalam menuju suatu penyelesaian dari suatu masalah. Selain dari itu siyasah bermakna pengelolaan pemerintahan.

Miriam Budiardjo (2008:15) mengartikan kata politik dengan upaya dalam menetapkan aturan-aturan berlaku oleh masyarakat dalam kehidupan yang normal. Dengan politik masyarakat dapat mengambil langkah sebagai sebuah keputusan tentang tujuan yang akan dicapai sistemnya, serta pola-pola yang dilakukan dari tujuan tersebut.

Menurut Ramlan Surbakti (1999:1) menjelaskan dimana politik merupakan hubungan pemerintah dan warga Negara untuk melakukan hasil keputusan yang mengikat mengenai kemaslahatan umum dalam wilayah domisili tertentu.

Penjelasan makna dari politik, dapatlah dibagi beberapa konsep yaitu :

1. Negara

Pengertian Negara menurut Miriam Budiardjo (2008:17), negara adalah sebuah organisasi yang ada dalam wilayah yang mempunyai Negara yang sah dan dijalankan oleh masyarakatnya. Disamping itu Negara mempunyai dasar-dasar yang merupakan syarat berdirinya suatu Negara. Dasar-dasar itu merupakan wilayah, rakyat, pemerintahan yang berdaulat, dan pengakuan dari negara lain.

2. Kekuasaan

Kekuasaan adalah sebuah kekuatan dari seseorang atau kelompok orang dalam mengubah perilaku perorangan atau orang banyak individu yang bertujuan untuk adanya penyesuaian dengan keinginan para pelaku. Selanjutnya dari sisi politik, kekuasaan merupakan semua yang berkaitan dengan capaian untuk mempertahankan kekuasaan yang ada. Kemudian Kekuasaan tersebut dapat berpengaruh terhadap tujuan bersama antara pemerintah dengan masyarakat.

3. Pengambilan Keputusan

Menurut Miriam Budiardjo (2008:17), Pengambilan keputusan merupakan suatu proses yang terjadi sampai keputusan itu tercapai. Pengambilan keputusan tersebut merupakan inti dari politik mengenai keputusan-keputusan yang disepakati secara bersama dan bersifat mengikat setiap warga Negara. Apabila sebuah pengambilan keputusan tidak bisa sepakat maka wajib menempuh jalan yang disebut dengan voting. Pengambilan keputusan bisa berupa kebijakan yang menyangkut dalam mencapai tujuan bersama.

4. Kebijakan Umum

Kebijakan umum adalah rangkaian keputusan yang diambil oleh pelaksana politik yang bersifat perorangan atau kelompok. Kebijakan umum tersebut diputuskan secara bersama dengan mendengarkan keinginan semua pihak yang membuat kebijakan itu. Para pihak tersebut dalam membuat kebijakan adalah pemerintah yang mempunyai wewenang untuk membuat dan menerbitkan sebuah kebijakan.

5. Nilai atau Alokasi

Harold Laswell (1972: 67) berpendapat bahwa alokasi kandungan nilai-nilai yang ada dalam kumpulan orang-orang atau masyarakat. Perspektif politik dikatakan bahwa nilai-nilai tersebut berupa *who, get, what, when, how*. Kadangkala kandungan nilai atau alokasi yang ada pada masyarakat tidak adil.

6. Sistem Politik

Sistem politik berhubungan dengan suasana berupa bagiannya antara satu dengan yang lainnya ditentukan secara fungsional, yang memiliki pembatas

yang ditentukan yang merupakan suatu komponen yang utuh atau bulat. Apabila diantara komponen tersebut berubah, tentu komponen yang lainnya akan mengalami perubahan.

Rahman berpendapat (2002: 2), bahwa sistem politik itu memiliki interaksi dan peranan dalam masyarakat. Kadangkala pelaku yang merupakan sistem politik yang Sama juga bisa memainkan peranan lain juga, misalnya dalam system sosial, ekonomi, budaya dan sebagainya. Selain dari itu kadangkala sistem itu juga dapat dimulai dari tempat satu dan diselesaikan ditempat lain. Apabila dihubungkan dengan sistem politik tidak semudah yang dikatakan, oleh karena sistem politik tidak diatur oleh individu tetapi diatur oleh institusi.

Semua sistem politik dapat dijumpai dari bermacam-macam struktur politik. Struktur politik itu merupakan cara menyusun dan membangun yang saling berkaitan antara orang seorang atau organisasi. Adapun fungsi sistem politik dapat berupa fungsi input dan fungsi output. Antonius Sitepu menjelaskan (Simbolon, 2008: 26), bahwa fungsi input dalam sistem politik merupakan suatu yang menunjukkan berbagai aktivitas dan efektifitas yang menuju sistem yang sudah berjalan pada umumnya diwujudkan lewat dorongan dan tuntutan untuk keberlangsungan sistem politik itu sendiri.

Adapun fungsi output sistem politik merupakan legislasi atau pembuatan peraturan perundang-undangan dan kebijakan dalam sistem politik. Selanjutnya menurut Ramlan Surbakti (1999: 221-232) sistem politik terdiri dari Sistem Politik Demokrasi, Sistem Politik Negara Berkembang, dan Sistem Politik Komunis.

7. Partai Politik

Yang dimaksud dengan partai politik adalah organisasi politik yang memberikan solusi untuk anggota partai untuk berdaya saing dalam memperoleh suara rakyat dalam mengisi pos-pos jabatan politik. Selanjutnya pihak-pihak yang dilamar oleh partai politik dalam mengisi pos-pos jabatan politik, administratif, dan publik, yang berlatar belakang partai dan eksternal partai politik yang memiliki komitmen untuk kemajuan partai politik, paling tidak yang mampu memberikan keuntungan untuk masa depan partai politik (Handoyo, 2010: 143).

Fungsi utama dari partai politik adalah meraih serta mempertahankan kekuasaan untuk mampu melaksanakan program-program partai politik yang mengacu kepada ideologi partai politik. Selanjutnya Surbakti berpendapat (1999: 144-154), dimana fungsi lain dari partai politik adalah:

1. Sosialisasi Politik, yaitu proses pengenalan dan pemahaman dalam rangka membentuk prilaku serta tujuan politik warga Negara, dengan harapan warga Negara mendapatkan prilaku dan tujuan terhadap kehidupan politik yang bersifat dinamis dalam kehidupan masyarakat.
2. Rekrutmen Politik yaitu sebuah proses memilih dan penunjukan kepada perorangan atau kolektif orang untuk melakukan sejumlah tugas dalam kehidupan politik pada masyarakat dan pemegang kekuasaan, menuju sistem yaitu Sistem Politik Otokrasi, Tradisional, dan Totaliter,
3. Partisipasi Politik, yaitu Suatu kegiatan masyarakat dalam ikut dalam proses pembuatan serta pelaksanaan kebijakan umum dan ikut dalam memilih pemimpin pemerintahan.

4. Pemandu Kepentingan, yaitu suatu kegiatan dalam proses menampung, menganalisis, dan menyatukan bermacam-macam aspirasi dan kemauan yang beraneka ragam yang menjadi alternatif kebijakan umum dalam ikut dalam proses pembuatan keputusan politik.
5. Komunikasi Politik, merupakan fungsi dari partai politik dalam proses memberikan masukan dalam keputusan dan kebijakan pemerintah kepada masyarakat sekaligus menyampaikan aspirasi dan kemauan dari bermacam-macam kelompok masyarakat kepada pemerintah.
6. Pengendali Konflik, yaitu merupakan fungsi dari Partai Politik dalam menyelesaikan berbagai konflik yang terjadi dari berbagai pihak yang berkonflik dengan menyatukan dan menampung semua aspirasi dan kemauan kepada institusi DPR sebagai bahan keputusan politik.
7. Kontrol Politik, yaitu fungsi Partai Politik untuk mengkritisi kebijakan produk dan dilakukan oleh pemerintah, mungkin saja ada unsur kesalahan, kelemahan, bahkan penyimpangan. Bentuk dari Partai Politik mempunyai bermacam-macam, misalnya berbentuk demokrasi, otoriter; integratif dan representatif; ideologis dan pragmatis; agamis dan sekuler; demokratis dan revolusioneris; massa dan elit; demokratis dan oligarki. Disamping itu klasifikasi partai politik memiliki sifat biasanya berdasarkan pada banyaknya partai politik. Misalnya bersifat tertutup atau kompetitif; majemuk atau monopolistik; dan orientasi pada isu atau pada klien (Amal, 1988: 29).

8. Perilaku Politik

Perilaku Politik menurut Surbakti (1999: 167), dapat didefinisikan suatu kegiatan yang berkaitan dengan proses pembuatan dan pelaksanaan kebijakan atau keputusan politik. Berkaitan dengan perorangan dalam melaksanakan perilaku politik, adalah perorangan berperan aktor politik, perorangan berperan aktivis politik, dan perorangan berperan warga negara biasa. Selanjutnya menurut Smith (Surbakti, 1991: 169), ada 4 faktor yang dapat mengubah perilaku politik seorang aktor politik yaitu:

1. Lingkungan sosial politik yang tidak langsung misalnya sistem sosial, sistem politik, sistem ekonomi, sistem budaya, dan media massa.
2. Lingkungan sosial politik secara langsung yang mengubah dan dapat membentuk karakter seorang sebagai aktor politik, misalnya agama, keluarga, sekolah, dan kelompok pergaulan.
3. Struktur kepribadian yang tampak dalam sikap perorangan, yang dapat dipengaruhi oleh fungsi suatu kepentingan, misalnya pemilihan kepada seseorang dengan ditentukan oleh minat dan kebutuhan terhadap obyek tersebut, fungsi penyesuaian diri yaitu penilaian terhadap suatu obyek ditentukan oleh keinginan yang sesuai dengan objek tersebut, dan fungsi eksternalisasi dan pertahanan diri, misalnya pemilihan seseorang dengan dipengaruhi oleh keinginan dalam mengatasi tekanan yang bersifat tidak nyata (batin), misalnya sikap mempertahankan diri.
4. Faktor lingkungan. Faktor ini dibagi 2 yaitu faktor lingkungan sosial politik langsung berbentuk keadaan yang dapat mempengaruhi aktor politik secara

langsung dalam suatu kegiatan, misalnya suasana keluarga, suasana kelompok, serta suasana ancaman. Selanjutnya faktor lingkungan politik sosial yang tidak langsung dapat mempengaruhi lingkungan sosial politik melalui kegiatan sosialisasi, internalisasi, dan politisasi.

9. Partisipasi Politik

Partisipasi Politik menurut Faulks (Handoyo, 2010: 227) merupakan suatu kegiatan aktif dari perorangan atau kelompok dalam kegiatan pemerintahan yang berakibat kepada pola kehidupan mereka. Misalnya keterlibatan masyarakat dalam pembuatan kebijakan dan keputusan politik baik secara langsung maupun secara tidak langsung. Selanjutnya Partisipasi Politik itu bersifat aktif, misalnya saja warga Negara bisa saja menjadi anggota atau pengurus sebuah partai tetapi tidak memiliki peran aktif dalam organisasi.

Partisipasi Politik berkaitan erat dengan kesadaran politik. Semakin banyak yang sadar dengan politik maka semakin besar pula masyarakat menuntut diberikan hak suara dalam pemerintahan (Budiarjo, 2008: 369).

Selanjutnya Gabriel Almond membagi Partisipasi Politik dalam 2 bentuk yaitu konvensional dan non konvensional. Bentuk partisipasi politik konvensional yaitu diskusi politik, voting, kelompok kepentingan, komunikasi individual, dan lain-lain. Partisipasi politik non konvensional misalnya mogok, kudeta, pengajuan petisi, demonstrasi, perang, kekerasan politik, dan lain sebagainya (Handoyo, 2010: 233).

Indonesia yang merupakan Negara Demokrasi menempatkan Partisipasi Politik yaitu sebagai hak warga negara. Menurut Ramlan Surbakti dalam

realitanya level Partisipasi Politik warga negara berlainan di tiap negara. Hal itu terjadi karena didorong oleh 4 tipe (1999: 184-185), yaitu tingkat kepercayaan tinggi aktif, tingkat kepercayaan rendah, tipe militan radikal, dan tipe partisipasi pasif.

10. Politik dan Ekonomi

Perseorangan dan warga Negara berupaya memperoleh untuk memenuhi kebutuhan hidup secara normal. Dimana kegiatan ekonomi warga Negara dengan cara memenuhi kebutuhan rumah tangga dan memenuhi kebutuhan masyarakat. Kegiatan ini pada prinsipnya berkenaan dengan kegiatan memproduksi dan mendistribusikan barang dan jasa. Menurut Ramlan (1999: 212), Negara berhubungan dengan ekonomi dalam hal merupakan peranan pemerintah dalam membuat perencanaan dan koordinasi serta kepemilikan barang dan jasa dalam berbagai sistem ekonomi berupa sosialis, komunis, sistem ekonomi pasar, ataupun sistem kapitalisme. Peranan besar pemerintah terhadap jalannya ekonomi membuat pemerintah membuat kebijakan ekonomi. Kebijakan ekonomi ini adalah keputusan politik yang akan mempengaruhi distribusi kekayaan dan pendapatan dalam masyarakat.

Berangkat dari uraian di atas, apabila dipandang dari 2 defenisi politik dan pemikiran, dapatlah penjelasan di mana pemikiran politik yaitu suatu konsep penyelidikan terutama pada pencarian jalan keluar dari problema politik yang meliputi konsep mengenai politik dalam mewujudkan tujuan politik itu sendiri.

Pemikiran politik yang hangat sampai sekarang pada hakikatnya dimunculkan oleh pemikiran Yunani Kuno. Sejarah telah mencatat dimana politik

dan sosial yang ada dan digunakan di Eropa Barat itu merupakan pemberian dari pemikiran dan kebudayaan Yunani Kuno. Pemberian tersebut berbentuk gagasan pemerintahan demokratis yang di dalamnya ada kebebasan manusia, keadilan, hak mendasar, yang semuanya itu tetap berlangsung, bahkan ditanamkan dan dipelihara dalam peradaban Barat (Suyahmo, 2014: 54). Studi tentang pemikiran politik itu terbagi menjadi bermacam-macam waktu, yaitu waktu klasik, waktu pertengahan, dan waktu modern.

11. Pemikiran Politik Klasik

Yunani adalah bangsa yang mempunyai kebudayaan tinggi dan tokoh pemikir yang ulung yang telah banyak menyumbangkan bermacam-macam pemahaman bidang politik maupun pengetahuan lainnya dengan mengembangkan berbagai bentuk pemikiran yang menghasilkan pemahaman yang diperlukan oleh tokoh pemikir politik lainnya. Tokoh pemikir politik Yunani acap kali menggunakan filsafat sebagai acuan dalam pembahasan pemikiran politiknya. Pemikiran Politik Yunani berciri sistematis dalam penyelidikan karakter dari institusi politik.

Masa berikutnya adalah Pemikiran Politik Yunani berpengaruh pada unsur budaya dan intelektual Eropa Barat maupun dunia Islam. Sokrates misalnya merupakan tokoh pemikir politik terkemuka era Yunani Kuno. Doktrin politik Sokrates yaitu kebijakan adalah sebuah pengetahuan yang ide dasarnya adalah pemikiran politik Sokrates tentang negara. Sokrates sebenarnya tidak banyak menulis tentang pandangan politiknya tetapi keberadaan konsep pemikiran Sokrates itu telah membentuk banyak tokoh pemikir Yunani lain, misalnya Plato.

Socrates menitikberatkan pada perhatiannya secara penuh pada kemajuan ilmu metode menuju sebuah kebenaran. Bagi Socrates (Rapar, 1996: 100), asas politik harus berorientasi pada etika berupa kebaikan pengetahuan.

Selanjutnya Socrates berpendapat dimana asas-asas etika yang stabil dan bersifat universal yang ada pada norma-norma dan adat istiadat yang beraneka di belahan dunia. Socrates menjelaskan bahwa hukum kebenaran tersebut adalah bebas nilai dan berguna dalam pendapat secara perorangan. Menurut Socrates, negara adalah bertugas mewujudkan kebahagiaan masyarakatnya dan membentuk pribadi yang bermoral yang baik.

Socrates juga tidak menyetujui konsep Demokrasi yang didasarkan pada suara mayoritas karena menurutnya tidak semua orang dalam mayoritas memiliki pengetahuan baik. Setelah kematian Socrates yang terkenal dengan pemikirannya tentang suatu kebajikan (virtue). Pemikiran Socrates diturunkan oleh seorang muridnya yang bernama Plato. Plato merupakan murid setia Socrates yang banyak mewarisi keilmuan dan filsafat Socrates.

Menurut Plato Negara ideal menganut prinsip mementingkan kebajikan. Karena kebajikan menurut plato sebuah pengetahuan. Segala hal yang dilakukan atas nama Negara haruslah dimaksudkan untuk mencapai kebajikan itu. Berdasarkan karyanya yang berjudul Republic (Osborne, 2001: 15), Plato menggariskan mengenai negara kota idealnya, Plato menggabungkan kekuasaan absolut dengan kekuasaan orang banyak, yang merupakan campuran antara monarki dengan demokrasi. Terdapat empat konsep fundamental yang menjadi dasar pemikiran politik Plato, yaitu:

- 1) Kebajikan adalah pengetahuan,
- 2) Manusia mempunyai bakat, kecerdasan, dan kemampuan yang tidak sama,
- 3) Negara adalah lembaga yang alami dan
- 4) Tujuan masyarakat Politik adalah kebaikan bersama.

Pemikiran Politik Plato kemudian dikembangkan lagi oleh Aristoteles. Kemunculan negara menurut Aristoteles tidak dapat dipisahkan dari watak manusia sendiri atau ini merupakan insting sosial seseorang. Karena itu penyebutan manusia adalah *zoon politikon* atau makhluk berpolitik.

Dengan definisi seperti ini, sebuah negara merupakan kepastian, karena merupakan sebuah sarana agar makhluk berpolitik tersebut dapat berinteraksi dan beraktualisasi (Osborne, 2001: 17). Negara ideal menurut Aristoteles (Suhelmi, 2001: 45) adalah polis atau negara kota. Negara bentuk polis memiliki bayangan sebuah negara yang tidak terlalu besar dan kecil. Tentang kekuasaan negara polis, Aristoteles berpendapat bahwa karena negara merupakan tingkat tertinggi maka ia memiliki kekuasaan mutlak atau absolut. Dalam karyanya yang berjudul *Politics* (Oxford University, 1995), menetapkan beberapa bentuk negara yaitu: Negara monarki, apabila kekuasaan di tangan satu orang, bertujuan untuk kebaikan dan kesejahteraan semua. Kedua, adalah bentuk aristokrasi dimana kekuasaan negara dipegang oleh beberapa orang dan bertujuan baik demi kepentingan umum. Ketiga adalah oligarki di mana kekuasaan kelompok kaya menjadi dominan dan penyaluran pada masyarakat umum menjadi terhambat.

Pemikiran Politik Abad Pertengahan Pemikiran politik abad pertengahan pada awalnya sangat dipengaruhi oleh agama, banyak muncul pemikiran politik

dari pemikir-pemikir Nasrani seperti Thomas Aquinas dan dari Islam seperti Al Mawardi. Pada akhir abad pertengahan mulai muncul pemikiran politik yang menolak tradisi politik abad pertengahan seperti Machiavelli dan Martin Luther. Sejak abad keempat pemikiran Kristiani di Eropa Barat sangat dipengaruhi sosok Agustinus dengan konsep Negara Tuhan. Negara sekuler dianggap sebagai penyelewengan oleh para penguasa yang arif dan bijaksana sehingga kekuasaan bagaikan keangkuhan dengan berbagai kejahatan. Negara Tuhan menghargai segala sesuatu yang baik dan mengutamakan nilai kebenaran. Kemudian muncul pemikiran Thomas Aquinas yang mengungkapkan tentang pembagian negara baik dan Negara buruk yang menerapkan sumber teori politik. Menurut Thomas Aquinas (Suhelmi, 2001: 90), Tujuan negara yang identik dengan tujuan manusia dalam hidup yakni mencapai kemuliaan abadi dalam hidup.

Untuk mencapai kemuliaan abadi maka diperlukan pemerintah yang berbentuk Monarki. Negara memerlukan adanya hukum abadi yang berakar dari jiwa Tuhan yang mengatur alam semesta dan hukum alam manusia untuk merasionalkan manusia mentaati hukum. Hukum Positif yang merupakan pelaksanaan hukum alam dan untuk menyempurnakan pikiran manusia maka

Abad Pertengahan juga merupakan perkembangan yang pesat dari dunia Islam. Dalam konsep politik Islam, Ibnu Khaldun (Satori, 2016: 122) berpendapat Teori tentang negara yang dikategorikan atas pengertian pemerintah manusia dan keterbatasan manusia dalam negara yang disebut negara modern. Setiap warga negara perlu memiliki Askabiyah untuk menumbuhkan kesatuan dalam negara.

Untuk itu dikembangkan Teori Politik Askabiyah dan rasa keagamaan oleh pemimpin negara.

Perkembangan negara harus didasarkan pada solidaritas dengan keyakinan agama untuk dapat menstabilkan negara. Hal ini perlu didukung oleh penguasa yang memiliki perangkat dominasi pemerintah dan kekuasaan untuk mengatasi manusia-manusia yang memiliki sifat-sifat kebinatangan.

Tokoh lain yang adalah Al-Mawardi yang di kemudian hari terkenal dengan karena pemikiran politik melalui bukunya yang berjudul Al Ahkam as-Sulthaniyyah yang dianggap sebagai buku pertama yang disusun khusus tentang pemikiran politik Islam. Karya ini antara lain telah diterjemahkan ke dalam bahasa Inggris dan Perancis. Selain dari Al-Ahkam as-Sulthaniyyah, terdapat beberapa karyanya tentang politik Islam, antara lain: Qawanin al-Wizarah (ketentuan-ketentuan kewaziran atau kementerian), Siyasa al-Mulk (strategi kepemimpinan raja), Adab ad Dunya wa ad-Din (kata krama kehidupan politik duniawi dan agamawi).

Akhir periode abad pertengahan muncul pemikiran politik Machiavelli. Machiavelli adalah sebagai ahli teori dan figur utama dalam realitas teori politik, ia sangat disegani di Eropa pada masa renaissance. Dua buku yang terkenal adalah Discorsi sopra la prima deca di titolivio (Diskursus tentang Livio) dan Il Principe (Sang Pangeran). Secara umum pemikiran politik Machiavelli adalah mengenai kekuasaan.

Berdasarkan bukunya berjudul Sang Penguasa (1991), Machiavelli menyatakan bahwa ada atau pimpinan negara boleh berbuat apa saja asalkan tujuan bisa tercapai maka negara perlu dapat menindak kepentingan individu.

12. Pemikiran Politik Modern

Thomas Hobbes, salah satu pemikir politik era kontrak sosial (1992, 32) menyatakan, pada dasarnya manusia itu mementingkan dirinya sendiri dan bersifat rasional. Oleh karena itu, secara alamiah manusia cenderung berkonflik dengan sesamanya. Sifat mementingkan diri sendiri tampak dalam persaingan memperebutkan kekayaan, ketidakberanian demi keselamatan, kemuliaan demi reputasi. Hobbes menegaskan pula bahwa hasrat manusia itu tidaklah terbatas. Untuk memenuhi hasrat atau nafsu yang tidak terbatas itu, manusia mempunyai kekuasaan. Oleh karena setiap manusia berusaha untuk memenuhi hasrat dan keinginannya dengan menggunakan kekuasaannya, maka yang terjadi adalah benturan kekuasaan antar sesama manusia. Kondisi alamiah terdapat perjuangan untuk kekuasaan dari manusia atas manusia yang lain. Dalam kondisi alamiah seperti itu manusia menjadi tidak aman dan ancaman konflik yang terus berlangsung.

Cara menghindari konflik yang terus berlangsung maka dibentuklah pemerintahan yang absolut dalam masyarakat yang berada dalam pemerintah yang berdaulat. Sehingga dapat disimpulkan bahwa menurut pandangan Hobbes kebebasan individu hanya dapat dipelihara oleh suatu pemerintahan yang memiliki kewenangan mutlak.

Hakikatnya teori-teori kontrak sosial yang ada di masa pencerahan ini merupakan usaha untuk mendobrak dasar dari pemerintahan absolut dan menetapkan hak-hak politik rakyat. Tokoh yang mencetuskan gagasan ini adalah John Locke dan Montesquieu. Menurut John Locke hak-hak politik meliputi hak hidup, hak atas kebebasan, dan hak milik. Sedangkan Montesquieu mencoba menyusun suatu sistem yang dapat menjamin hak-hak politik itu, yang kemudian dikenal dengan istilah trias politika yaitu legislatif, eksekutif, yudikatif. Ide-ide bahwa manusia mempunyai hak-hak politik menimbulkan revolusi Prancis pada akhir abad ke 18 serta revolusi Amerika melawan Inggris (Budiardjo, 2008: 111).

JJ Rousseau berpendapat negara adalah berasal dari kontrak sosial antara individu jadi negara merupakan representasi kepentingan individu-individu di dalamnya, negara harus berusaha mewujudkan kehendak umum bila kehendak itu diabaikan oleh negara, rakyat dapat mencabut mandatnya terhadap penguasa. Rousseau mendambakan suatu sistem pemerintahan yang bersifat demokrasi langsung di mana rakyat menentukan penguasa atau pemimpin mereka, membuat tata negara dan peraturan secara langsung. Demokrasi langsung hanya dapat dilaksanakan pada wilayah yang tidak terlalu luas (Suhelmi, 2001: 237).

E. Nilai Fundamental Empat Pilar Kebangsaan dalam Perspektif Politik

1. Nilai ketuhanan

Sebelum penulis membahas lebih jauh penulis ingin sedikit membahas bagaimana pentingnya nilai-nilai ketuhanan dalam politik atau dalam sebuah negara. Pada abad pertengahan di Eropa yang ditandai oleh dominasi agama Kristen dalam kehidupan bernegara. Pada masa itu muncul negara teokrasi mutlak

dari Agustinus. Bahwasannya berpendapat, negara di bumi seperti layaknya negara iblis yang hanya akan memberikan kesengsaraan bagi manusia. Untuk itu, ia mendambakan negara yang mempunyai nilai-nilai ketuhanan yang bisa mendatangkan kedamaian dan ketentraman (Ayi Sofyan, 2012: 77).

Menurut masyarakat Indonesia nilai ketuhanan adalah keniscayaan, karena secara faktual historis masyarakat bangsa Indonesia terkenal dengan masyarakat yang taat beragama atau menjunjung tinggi nilai-nilai religiusitas dan spiritualitas. Hal ini sebagaimana yang dijelaskan Roghib As-Sirjani sebelumnya, bahwa ketaatan beragama dan diperankan diberbagai persoalan kehidupan berbangsa tidak lain merupakan implikasi dari pengakuan dan keyakinan akan adanya Tuhan (Munawir Sjadzali, 2003: 162). Hal tersebut berkaitan dengan masyarakat Indonesia yang terkenal sebagai masyarakat yang beragama. Adalah masyarakat yang bertuhan dan masyarakat yang menganut nilai-nilai ketuhanan.

Berdasarkan uraian di atas, maka dipertegasakan lagi bahwa dalam perspektif politik, sumber paling tertinggi bagi bangsa Indonesia adalah nilai ketuhanan. Nilai ketuhanan seharusnya diposisikan sebagai nilai tertinggi dan sentral, dan harus mengalir dan menjiwai seluruh kebijakan dan peraturan yang ditetapkan oleh penguasa atau pemerintah dalam menjalankan kehidupan berbangsa dan bernegara. Dengan demikian semua komponen anak bangsa (rakyat) Indonesia haruslah betul-betul menyadari sepenuhnya, bahwa nilai ketuhanan yang terkandung dalam pancasila adalah nilai yang sangat strategis dan niscaya untuk dijadikan sebagai landasan dasar yang harus tercermin dalam setiap langkah kegiatan pembangunan bangsa.

Kesadaran semacam ini sangat penting agar hubungan antara rakyat dan penguasa negara, ataupun sebaliknya pemerintah dengan rakyatnya dapat terwujud dalam suatu keharmonisan. Perwujudan nilai ketuhanan dalam seluruh kebijakan, peraturan dan perundang-undangan selain sesuai dengan hakikat kemanusiaan, harus juga berimplikasi terhadap terbangunnya kekuasaan dan pemerintahan yang bersih dan berwibawa, serta kekuasaan yang berpihak kepada kepentingan rakyatnya (Munawir Sjadzali, 2003: 163).

Pendapat tersebut di atas secara interpretasi menunjukkan suatu relevansi, bahwa Tuhan adalah yang mutlak dan sumber dari seluruh yang ada di alam semesta. Ini artinya secara kausalitas Tuhan menjadi penyebab adanya segala sesuatu yang ada, baik ada dalam kenyataan, ada dalam ide, maupun ada dalam kemungkinan.

Konsep tanggung jawab yang dimaksud adalah bahwa semua perbuatan dan tingkah laku manusia adalah kongkrit sebagai bentuk amal shaleh yang sesuai dengan nilai ketuhanan, sehingga menampilkan tatanan sosial kenegaraan yang adil dan damai (Munawir Sjadzali, 2003: 165). Pengesahan akan nilai ketuhanan niscaya memunculkan nilai-nilai kebersamaan serta persamaan. Bahwasanya seluruh manusia pada hakikatnya harus dalam kebersamaan dan kesamaan karena manusia sejatinya adalah makhluk Tuhan (Munawir Sjadzali, 2003: 166).

2. Nilai Persatuan dan Kesatuan

Memadukan perbedaan tersebut Indonesia sudah mempunyai semboyan kebangsaan yang di rumuskan oleh pendiri Negara Indonesia. Yaitu Bhineka Tunggal Ika (berbeda-beda tetapi satu jua). Bhinneka tunggal ika oleh pendiri

bangsa Indonesia diberikan penafsiran baru karena dinilai relevan dengan keperluan strategis bangsa Indonesia. Seperti penulis bahas di atas bahwa bangsa Indonesia ini bangsa yang beragam, terdapat banyak suku, agama, ras, budaya, adat dan bahasa, walaupun begitu tetap satu kesatuan sebangsa dan setanah air (Pimpinan MPR, 2017: 66).

Keanekaragaman masyarakat Indonesia ini dianggap penting oleh para leluhur, dijadikan sebagai modal untuk membangun bangsa ini menjadi bangsa yang besar. Menurut sejarah bahwa seluruh anak bangsa yang berasal dari berbagai suku semua terlibat dalam memperjuangkan kemerdekaan Indonesia, semua ikut berjuang dengan mengambil peran masing-masing (Pimpinan MPR, 2017: 66). Tanah nusantara adalah tempat lahirnya sumpah pemuda pada tanggal 28 Oktober 1928, juga mengikrarkan untuk bersatu padu mendirikan Negara kesatuan republik Indonesia, serta cita-cita membangun sebuah masyarakat Indonesia yang bersatu serta mengungkapkan rasa persatuan dan kesatuan yang berasal dari keberagaman (Pimpinan MPR, 2017: 67).

Berdasarkan hal yang telah digambarkan pada pembahasan sebelumnya bahwa manusia sebagai makhluk individual dan makhluk sosial (kedua tunggalan), menimbulkan keharusan untuk memahami diri sendiri dan sosial masyarakat atau hidup bermasyarakat, untuk mewujudkan kebersamaan, saling hormat menghormati satu sama lain, baik sesama manusia, maupun terhadap alam lingkungannya. Artinya nilai individual dan nilai sosial sangat erat kaitannya dengan aktivitas kehidupan lahir dan batin, material dan immaterial, moral dan spiritual yang harus dilakukan sesuai daya-daya yang dimiliki manusia.

Kepentingan sebuah nilai tersebut karena selain merupakan kodrat manusia, juga merupakan perintah agama, serta sekaligus sebagai perbuatan amal shaleh, khususnya dalam menciptakan kedamaian, kenyamanan, keamanan, kesejahteraan lahir dan batin terhadap rakyat sebagai warganegara.

3. Unsur Kemanusiaan

Sebenarnya, prinsip-prinsip mendasar telah sangat diperlukan seperti perlunya persatuan manusia dan usaha manusia untuk mewujudkan kemaslahatannya juga menolak kemudharatan, seperti keadilan, kebebasan, musyawarah, dan persamaan hak (Farid Abdul Khalik, 2005: 225).

Titik terang dalam unsur kemanusiaan ini adalah bagaimana dalam konteks pemerintahan yang baik, kebijakan dan putusan penguasa merupakan wujud untuk memanusiakan manusia. Sejatinya kata atau istilah memanusiakan manusia cukup sederhana untuk sekedar diucapkan, namun untuk realisasi secara mendasar itu sangat sulit dilakukan.

Memanusiakan manusia hanya dapat dilakukan secara kongkrit apabila dijiwai oleh nilai persatuan dan kesatuan atau nilai kebersamaan dan kesamaan sebagaimana yang telah dikemukakan sebelumnya. Artinya memanusiakan manusia harus berawal dari nilai persatuan dan kesatuan, kebersamaan dan kesamaan, sehingga ada kesetaraan pandang terhadap seluruh umat manusia di seluruh dunia khususnya di negara Indonesia.

Pendapat Kaelan yang dikutip oleh Himyari Yusuf mengemukakan, bahwa kemanusiaan itu adalah kesesuaian dengan hakikat manusia. Adapun unsur-unsur hakikat manusia adalah susunan kodrat yang terdiri atas raga yang terdiri atas

unsur benda mati, unsur binatang dan unsur tumbuhan, kemudian jiwa terdiri dari unsur akal, rasa dan kehendak.

Berbagai macam penjelasan serta pandangan tersebut secara esensial telah menggambarkan bahwa hakikat nilai-nilai kemanusiaan. Secara fungsional nilai-nilai kemanusiaan adalah untuk menentukan garis pemisah perilaku manusia supaya tidak bersimpangan dengan tujuan hidup manusia, dan juga supaya tetap berperilaku positif yang sesuai dengan paham kedua tunggalan (materi dan immateri) (Farid Abdul Khalik, 2005: 172).

4. Berkeadilan Sosial

Berkeadilan sosial, menurut Masdar Farid yang dikutip oleh Himyari Yusuf ia menjelaskan. Adil secara harfiah berarti lurus atau seimbang, dan dalam fikih, adil pertama berarti memperlakukan setiap orang secara merata, tanpa diskriminasi. Dengan kata lain keadilan adalah kesetaraan.

Perbedaan agama, suku, ras, budaya misalnya tidak boleh dijadikan sebagai alasan atau dasar perlakuan yang diskriminatif. Pandangan Masdar Farid ini dapat diinterpretasikan bahwa keadilan adalah keseimbangan dan kesetaraan. Keseimbangan dan kesetaraan tersebut bisa diartikan sebagai keadilan yang tauhid. Artinya nilai keadilan sosial adalah suatu keseimbangan antara lahir dan batin (Himyari Yusuf, 2014: 177).

Berkeadilan sosial berarti keadilan yang berlaku dalam masyarakat disegala bidang kehidupan, baik materil maupun spiritual (Himyari Yusuf, 2014: 42). Nilai keadilan yang terbentuk dari asas ketuhanan inilah yang menurut filsafat politik Islam keadilan yang harus diperjuangkan dan diaktualisasikan oleh pemegang

kekuasaan di suatu negara yang sedang berkuasa, karena hanya dengan prinsip keadilan semacam inilah yang dapat melahirkan keadilan yang merata bagi seluruh umat manusia.

Sebenarnya berkeadilan sosial ini seperti yang dinyatakan dalam alenia kedua dalam pembukaan UUD 1945.

“...Negara Indonesia yang merdeka, bersatu, berdaulat, adil, dan makmur...”.(Himyari Yusuf, 2014: 43).

Tanda tanya yang paling mendasar adalah apakah keadilan sosial ini sudah terwujud di negeri ini? Jawabannya adalah belum. Nilai kemanusiaan yang berkeadilan pada hakikatnya belum terwujud secara nyata dinegeri ini, demikian menurut Ramsi Nur'at yang dikutip oleh Himyari Yusuf. Padahal menurut hakikat yang terkandung didalamnya adalah mewajibkan semua anggota masyarakat mulai dari pemimpin negara sampai rakyat jelata untuk menjunjung tinggi nilai-nilai etika, moral agar mampu berbuat adil serta bijaksana.

Nilai kemanusiaan yang adil dan beradab harus dijadikan sebagai dasar untuk mengetaskan persoalan moralitas dan ketidakadilan yang terjadi di negeri ini. Pandangan Ramsi tersebut mengisyaratkan bahwa nilai kemanusiaan dan keadilan harus menjadi perhatian yang serius untuk direalisasikan secara baik dan konsekuen, sehingga keadilan sosial yang merupakan bagian dari hakikat kemanusiaan dapat dirasakan secara kongkrit dan merata oleh seluruh masyarakat bangsa dan Negara Indonesia.

5. Nilai musyawarah dan Perwakilan/ demokrasi

Demokrasi perwakilan, aspirasi masyarakat atau warga didelegasikan kepada anggota parlemen atau kongres yang mengikuti pemilihan sebagai wakil partai politik. Selain itu juga politisi mempunyai tujuan untuk mendapatkan suara yang sebesar-besarnya, sedangkan tujuan konstituen (pendukung) adalah memaksimalkan perolehan neto dalam kebijakan fiskal. Dengan demikian, konstituen akan memilih para wakil yang mampu mewakili kepentingan mereka, sedangkan para politisi akan menawarkan program-program yang mampu memenuhi kepentingan para pendukungnya (Hudiyanto, 2008: 16).

Bermusyawarah bukan hanya sebuah pengakuan akan adanya pluralisme, melainkan juga kesadaran dan peraktek memperlakukan orang perorang sederajat. Menurut isi musyawarah mencerminkan monopoli “kebenaran”. Mengenal ikhwal peri kehidupan, yang tidak mungkin dilakukan, karena masing-masing orang atau kelompok masyarakat berbeda pandangan dalam satu hal strategis. Oleh karena itu, musyawarah adalah sebuah mekanisme operasional dalam menemukan common platform diantara keberagaman itu (Hudiyanto, 2008: 329).

Dalam kajian ke-Indonesiaan nilai musyawarah ini diambil dari alenia keempat pembukaan UUD 1945 dan Pancasila, yaitu kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan/perwakilan. Sebetulnya pada pembahasan sebelumnya sudah di bahas bahwa nilai yang terkandung adalah nilai musyawarah itu sendiri (Hudiyanto, 2008: 180).

Tetapi tidak sampai disitu, ada beberapa lagi nilai-nilai yang terkandungnya. Seperti nilai kedaulatan rakyat, dan yang menjadi perwakilan untuk musyawarah juga adalah rakyat, oleh karena itu kedaulatan negara disebut juga kedaulatan

rakyat, yang terkenal dengan istilah dari rakyat, oleh rakyat dan untuk rakyat. Inilah sejatinya demokrasi pancasila untuk bangsa Indonesia.

Indonesia ini bukan sebuah negara untuk satu orang saja atau golongan tertentu, tapi kita mendirikan negara, semua untuk semua, satu buat semua, semua buat satu (Hudiyanto, 2008: 181). Misalnya pidato Soekarno. “dasar itu ialah dasar mufakat, dasar perwakilan, dasar permusyawaratan... kita mendirikan negara ‘semua buat semua’, satu buat semua, semua buat satu. Saya yakin, bahwa syarat mutlak untuk kuatnya negara Indonesia ialah permusyawaratan, perwakilan... apa-apa yang belum memuaskan, kita bicarakan di dalam permusyawaratan” (Hudiyanto, 2008: 30).

Penyampaian yang dijelaskan di atas oleh Soekarno menegaskan bahwa Negara Indonesia memilih sistem permusyawaratan, perwakilan. Ini artinya Indonesia bukan negara feodal dan bukan negara otoriter (Hudiyanto, 2008: 181). Oleh Karena itu demokrasi Indonesia bukanlah demokrasi model barat yang liberalism kapitalisme dan sosialisme komunisme, tetapi demokrasi pancasila yang isinya permusyawaratan, perwakilan.

Menurut Nurcholish Sikap keterbukaan ini adalah membuka pintu partisipasi rakyat umum. Artinya, pemimpin dalam masyarakat diciptakan melalui proses pemilihan terbuka, dengan cara apa pun pemilihan itu dilakukan dalam kenyataan dan menyesuaikan keadaan. Oleh karena itu, masyarakat bisa dikatakan sebagai rumah demokrasi. Dengan keterbukaannya, terbuka pula partisipasi rakyat umum sebagai hak untuk memberikan suara secara bermakna dan bebas dari paksaan.

Keterbukaan dalam masyarakat, menurut Nurcholish dengan mengutip Robert N. yang dikutip oleh Ayi Sofyan, menunjukkan adanya konsep tentang aturan politik berdasarkan partisipasi umum, termasuk keterlibatan dari kalangan rakyat jelata sebagai anggota masyarakat. Oleh karena itu, dalam pandangan Nurcholish, keterbukaan memberikan kepada setiap orang untuk menyatakan pendapatnya sebagai penilaian (Hudiyanto, 2008: 87). Mengenai kedudukan kepemimpinan atau apa pun terhadap sesama manusia pada umumnya. Keterbukaan ini, jika dilaksanakan dengan baik, akan melahirkan budaya musyawarah dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara.

Sikap keterbukaan dari masing-masing manusia, dalam bentuk yang tulus untuk saling menghargai pemikiran dan pendapat, sehingga menemukan solusi atau pendapat yang otentik. Kemudian mengambil dan mengikuti mana yang terbaik, menurut Nurcholish Madjid, adalah makna yang sebenarnya dari demokrasi (Hudiyanto, 2008: 88). Oleh sebab itu konsep demokrasi yang ada di negara kita Indonesia ini adalah demokrasi Pancasila. Yang menurut Zuhri yang dikutip oleh Masykuri Abdillah, bahwa konsep demokrasi Pancasila adalah sebagai suatu bentuk demokrasi yang mempunyai standar moral tinggi, karena demokrasi ini mempertahankan nilai ketuhanan serta nilai-nilai yang lainnya (Masykuri Abdillah, 2015: 181).

Kemudian dari pada itu Nurcholish, yang dikutip oleh Ayi Sofyan menjelaskan. Keterbukaan adalah kerendahan hak untuk tidak merasa selalu benar, kemudian kesediaan mendengarkan pendapat orang lain yang untuk kemudian diambil dan diikuti yang terbaik. Dalam masyarakat atau negara,

keterbukaan seperti inilah yang berimplikasi pada terwujudnya musyawarah yang pada hakikatnya merupakan interaksi positif sebagai individu dalam masyarakat yang saling mengakui adanya kewajiban mendengarkan pendapat itu (Masykuri Abdillah, 2015: 189).

Keterbukaan dan keikhlasan serta menerima pendapat yang terbaik menjadi semangat yang mewarnai jalannya musyawarah. Oleh karena itu, paradigma tersebut dalam pandangan filsafat politik Islam merupakan ikhwal yang sangat penting dalam politik yang dilakukan oleh suatu kekuasaan, karena hanya dengan sikap keterbukaan dan keikhlasan itu dalam suatu permusyawaratan dapat melahirkan kebijakan-kebijakan yang berkualitas dan bermanfaat bagi masyarakat bangsa dan negara.

Pelaksanaan musyawarah semacam ini mendorong untuk terbangun sikap saling menghargai, saling menghormati dan saling mempercayai (Masykuri Abdillah, 2015: 182-183). Nurcholish Madjid menjelaskan sebagaimana dikutip oleh Ayi Sofyan, bermusyawarah pada hakikatnya adalah interaksi positif sebagai individu dalam masyarakat yang saling member hak untuk menyatakan pendapat, dan saling mengakui adanya kewajiban mendengarkan pendapat itu. Dengan kata lain, musyawarah ialah hubungan interaktif untuk saling mengikatkan kebenaran dan kebaikan serta ketabahan dalam mencari penyelesaian masalah bersama dalam suasana persamaan hak dan kewajiban antarwarga masyarakat (Masykuri Abdillah, 2015: 91). Yang tak lain akan menghancurkan harkat dan martabat kemanusiaan. Karena sistem pemerintahan semacam itu tidak sesuai dengan pandangan yang menempatkan nilai ketuhanan sebagai landasan dan pendorong

untuk kebersamaan, kesamaan dan sistem permusyawaratan dan perwakilan (Masykuri Abdillah, 2015: 184). Oleh sebab itu dalam pandangan Islam, seorang pemimpin harus bermusyawarah dengan bawahannya untuk menyerap aspirasi.

Inilah makna demokrasi yang muncul dari pemerintahan dengan sistem musyawarah (Masykuri Abdillah, 2015: 259). Oleh sebab itu menurut Nurcholis Madjid yang dikutip oleh Himyari Yusuf, mengemukakan bahwa, musyawarah merupakan suatu keharusan karena manusia mempunyai kekuatan dan kelemahan yang tidak sama dari individu keindividu lainnya.

Pandangan Nurcholish ini, memberikan suatu pandangan bahwa musyawarah merupakan suatu keharusan, yang paling utama adalah dalam membangun kekuatan dan kesamaan, karena di dalam permusyawaratan antar anggota akan saling memberikan dan menerima pandangan yang terbaik diantara yang baik, sehingga satu sama lain akan saling menguatkan. Karena dengan adanya musyawarah perbedaan pendapat dapat disatukan dalam suatu perbedaan (bhineka tunggal ika) (Masykuri Abdillah, 2015: 184).

Pendapat S Prajudi Atmosudirjo dan kawan kawan yang dikutip oleh Ahmad Sukardja dan Ahmad Sudirman Abbas, ia mengatakan bahwa hakikat musyawarah untuk mufakat dalam kemurniannya adalah suatu tata cara khas yang bersumber pada inti paham kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan/perwakilan untuk merumuskan serta memutuskan suatu hal berdasarkan kehendak rakyat, dengan jalan mengemukakan hikmat kebijaksanaan yang tiada lain dari pada pikiran (rasio) yang mempertimbangkan

persatuan dan kesatuan bangsa (Ahmad Sukardja dan Ahmad Sudirman Abbas, 2015: 148).

Umpamanya dalam melaksanakan musyawarah niscaya ada nilai kesatuan dan persatuan, nilai kesamaan dan kebersamaan, dapat dipastikan musyawarah semacam ini akan berjalan sebagaimana mestinya. Tidak kalah penting juga adalah nilai kemanusiaan, karena yang diperjuangkan dalam permusyawaratan itu adalah untuk kepentingan dan kesejahteraan manusia (rakyat) Indonesia, dan manusia yang menjadi wakil harus memegang komitmen kemanusiaan secara mantap (Abdul Razak Nawfal, 1999: 189-190). Yang penting nilai musyawarah dijiwai oleh nilai-nilai ketuhanan, dan memang nilai ketuhanan ini dijadikan sebagai sentral yang menjiwai seluruh nilai-nilai di atas.

6. Nilai Toleransi

Sikap toleransi ini sangat penting untuk selalu diimplementasikan dalam hidup bermasyarakat maupun bernegara, dengan tujuan untuk mencegah dari pada sikap diskriminasi yang mengakibatkan perpecahan hanya karena adanya perbedaan suku, ras, budaya, bahasa, dan agama.

Kaitan dengan pendapat Himyari Yusuf bahwa nilai ketuhanan ini haruslah diposisikan sebagai sumber dari seluruh kebijakan dan berbagai peraturan. Bahkan dapat dipastikan dengan berdasarkan nilai ketuhanan inilah semua aktivitas masyarakat, berbangsa dan bernegara akan berjalan sesuai dengan tujuan serta hakikat daripada kemanusiaan (Abdul Razak Nawfal, 1999: 160).

Sangat pentingnya nilai ketuhanan dalam peraturan dan kebijakan negara. Karena untuk mewujudkan nilai kemanusiaan haruslah terlebih dahulu

mengamalkan nilai ketuhanan sehingga akan terwujud nilai kemanusiaan, mengakui persamaan derajat, persamaan hak dan kewajiban serta saling menyayangi sesama manusia dan menjunjung tinggi nilai-nilai kemanusiaan. Dari sinilah akan terwujud nilai toleransi, nilai persatuan, nilai permusyawaratan/demokrasi, dan keadilan sosial.

Kesamaan hak, dan kebebasan menganut agama ini nampaknya sudah diatur oleh Undang-Undang Dasar 1945 pada BAB XA Tentang Hak Asasi Manusia (HAM), Pasal 28A dan Pasal 28E yang berbunyi.

Pasal 28A:

“Setiap orang berhak untuk hidup serta berhak mempertahankan hidup dan kehidupannya” (Abdul Razak Nawfal, 1999: 176).

Pasal 28E

“Setiap orang bebas memeluk agama dan beribadah menurut agamanya, memilih pendidikan dan pengajaran, memilih pekerjaan, memilih kewarganegaraan, memilih tempat tinggal di wilayah negara dan meninggalkannya, serta berhak kembali” (Abdul Razak Nawfal, 1999: 177).

Maksudnya untuk setiap, atau seluruh warga negara Indonesia tanpa harus membedakan satu etnis ke etnis lainnya, berhak untuk mempertahankan hak untuk hidup atau berkehidupan sebagai warga negara Indonesia. Dalam pandangan politik Islam nilai toleransi adalah dipandang sebagai perwujudan dari pada Islam Rahmatan lil’amin, Islam yang membawa kedamaian. Yang mana Indonesia adalah negara yang pluralistik, beragam, namun mayoritas Islam. Tentunya Islam

sebagai mayoritas haruslah mampu menjadi garda terdepan untuk memperjuangkan keutuhan negara kesatuan republik Indonesia (NKRI).

Nilai toleransi dalam pandangan filsafat politik Islam tidak lain adalah untuk mewujudkan kerukunan antar umat beragama serta membentuk persatuan dan kesatuan serta keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Penjelasan di atas sangat relevan dengan pendapatnya

Toto Suryana menurutnya:

“Urgensi kerukunan adalah untuk mewujudkan kesatuan pandangan dan kesatuan sikap, guna melahirkan kesatuan perbuatan dan tindakan serta tanggung jawab bersama, sehingga tidak ada lagi pihak-pihak yang melepaskan diri dari tanggung jawab atau menyalahkan pihak lain. Dengan kerukunan umat beragama menyadari bahwa masyarakat dan negara adalah milik bersama. Dan menjadi tanggung jawab bersama untuk memeliharanya. Karena itu, kerukunan hidup umat beragama bukanlah kerukunan sementara, bukan pula kerukunan politis, tetapi kerukunan hakiki yang dilandasi dan dijiwai oleh agama masing-masing” (Toto Suryana, 2011: 134-135).

Pasal 16 misalnya “orang Yahudi yang mengikuti kita, berhak atas pertolongan dan bantuan” (Toto Suryana, 2011: 99). Sebagaimana terdapat dalam Pasal 37 “bagi kaum Yahudi ada kewajiban biaya, dan Kaum Muslimin ada kewajiban biaya. Mereka bantu membantu dalam menghadapi musuh. Mereka saling memberi sarandan nasehat” (Toto Suryana, 2011: 5).

Dari uraian teori tersebut, maka teori yang digunakan untuk menjawab rumusan masalah, dalam hal ini peneliti memakai teori Nasionalisme atau paham kebangsaan sebagai alat analisis, atau pembanding dalam hasil penelitian di bab 5.

BAB III

BIOGRAFI TAUFIQ KIEMAS

A. Di Tengah Kancah Revolusi Kemerdekaan

Berdasarkan kelahiran H. Taufiq Kiemas dilahirkan di Pulau Pisang, Pesisir Barat, Provinsi Lampung, tepatnya dilahirkan pada tanggal 31 Desember 1942. H. Taufiq Kiemas meninggal dunia luar negeri yaitu di Outram, Singapura, pada tanggal 8 Juni 2013, meninggal dunia genap berumur 70 tahun. H. Taufiq Kiemas merupakan seorang politikus sekaligus sebagai negarawan Indonesia (Batuah" *Liputan6.com*, 22 Desember 2003). Negarawan pernah dipercaya menjabat sebagai Ketua MPR-RI cukup lama yaitu masa bakti atau periode 2009–2014, secara mengejutkan beliau manakala dipercaya memegang amanat berupa jabatan, beliau dipanggil yang Maha Kuasa yang panah ini, keluarga sekaligus masyarakat Indonesia pada 8 Juni 2013 (sebagaimana sudah dijelaskan di atas), meninggal beliau bersamaan Hari Sedunia, yaitu hari laut. Beliau adalah suami dari anak proklamator dan sekaligus merupakan Kepala Negara (Presiden) ke-lima Indonesia yakni Ibu Megawati Soekarnoputri.

Tahun 1950, setelah pemerintah kerajaan Belanda secara resmi mengakui kedaulatan Republik Indonesia Taufiq Kiemas dan orang tua nya pindah ke Jakarta, di menamatkan SD, kemudian melanjutkan ke SMP, tetapi ketika naik ke kelas dua tahun 1957 dia dikirim orang tuanya ke SMP Mardiyuana di Sukabumi Jawa Barat. Sayangnya Taufiq hanya setahun sekolah disana lalu dia pindah ke Palembang. Taufiq Kiemas pun melanjutkan SMP di Kota Palembang

setelah lulus dia masuk di SMA Negeri 2 Palembang, kemudian pindah ke SMA N Tanjung Enim (Dhani Irawan, 2013).

H. Taufiq Kiemas lahir dari pasangan yang terkenal di desa Tanjung Raman di Kabupaten Muara Enim. Ayahnya bernama Tjik Agus Kiemas dan ibunya bernama Hamzathoen Roesyda. Tjik Agus Kiemas berasal dari Provinsi Sumatera Selatan asli, sedangkan Hamzathoen Roesyda berasal dari Minang (Sumatera Barat). Ayahnya adalah seorang pencatat nikah (istilah lain disebut penghulu). Taufiq Kiemas menyelesaikan sekolah tingginya di Universitas Sriwijaya tepatnya pada Fakultas Hukum Palembang dan semasa mahasiswa beliau sempat mengabdikan diri sebagai GMNI (Gerakan Mahasiswa Nasional Indonesia). (Dhani Irawan, 2013: 6)

Ketika pertama kali Taufiq belajar soal politik dan pemerintahan, dia sering diajak ayahnya mengikuti rapat para pemimpin Masjumi yang berlangsung di rumah Kasman Singodimedjo, meski tak mengerti apa yang dibicarakan ayah dan kawan-kawannya dia selalu mendengarkan percakapan mereka dengan seksama. Sampai menjadi aktivis mahasiswa, kebiasaan tersebut masih dia lakukan. Seiring dengan masa itu rasa cinta Taufiq terhadap tanah air semakin mendalam. Pada saat itu, ayahnya dimasukkan ke penjara oleh belanda, setahun lebih Taufiq hidup bersama ibu dan adik-adiknya, Taufiq mengira ayahnya sudah wafat ternyata pada tanggal 27 desember 1949 ayah taufiq dibebaskan dari penjara dan kembali kerumahnya.

B. Menjadi Seorang Nasionalis

Kekaguman Taufiq Kiemas kepada Presiden Soekarno dengan berpidato pada tanggal 19 Agustus tahun 1960, dimana Taufiq Kiemas setelah mendengarkan pidato yang disampaikan oleh Soekarno yang mengumumkan membubarkan organisasi yang bernama Masjumi serta PSI (Partai Sosialis Indonesia), pidato ini didengar rakyat Indonesia termasuklah yang mendengarnya adalah kedua pengurus organisasi partai tersebut. "Hebat juga presiden kata Taufiq Kiemas, membubarkan partai politik langsung di depan para pemimpin partai tersebut," (Imran Hasubuan, 2012: 26)

Berawal dari pidato Presiden Soekarno itu, membuat Taufiq Kiemas penasaran dengan Presiden Soekarno dengan segala pemikirannya. Bahkan literatur-literatur yang menceritakan Bung Karno dibaca sampai habis tatkala mengenyam pendidikan SMA. Tetapi ketika Taufiq Kiemas yang mampu mengagungkan Soekarno yang dikemudian harinya, orang yang dikagumi itu menjadi bapak mertua yang jatuh oleh rezim Soeharto akibat kesewenang-wenangan politik ORBA itu.

Pilihan tepat dimana Taufiq Kiemas memilih Fakultas Hukum sebagai pilihannya, yang membuat kekaguman Taufiq pada Soekarno bertambah karena banyak belajar sejarah dan perjuangan Soekarno. Taufiq Kiemas pernah dipercaya sebagai ospek (pengenalan kampus bagi mahasiswa baru) atau Bahasa ketika itu adalah perploncoan, Taufiq Kiemas yang merangkap sebagai pengurus GMNI (Gerakan Mahasiswa Nasional Indonesia) yang berhubungan dengan organisasi PNI (Partai Nasional Indonesia). Djohan Hanafiah, mendengar cerita tentang Taufiq yang populer dengan gang Don Quixotte-nya. "Begitu tahu Taufiq ikut

perploncoan, Djohan dan pengurus GMNI Palembang segera saja memutuskan merekrut Taufiq". Beliau tanpa banyak pertimbangan panjang lagi, karena angapan Djohan bahwa Taufiq Kiemas orang yang tepat dan memiliki kemampuan untuk menggerakkan organisasi yang bernama GMNI (Imran Hasubuan, 2012: 30).

Akhirnya Taufiq Kiemas bergabung dengan GMNI. Dimana Taufiq Kiemas mempunyai misi untuk menjadi ketua PNI dan bisa berkenalan dan akrab sama sang Proklamator yang sangat diagungkan. "PNI itu kan partai orang Jawa. Aku ingin tunjukkan bahwa orang Sumatera juga bisa memimpin partai orang Jawa,". Tanpa disangka-sangka Taufiq Kiemas dan bapak Djohan bergabung dalam satu organisasi, termasuklah kawan-kawanya dalam organisasi GMNI walaupun Sebagian besar berlatar belakang dari keluarga Masjumi ((Imran Hasubuan, 2012: 31).

Tjik Agus Kiemas (Ayahnya Taufiq Kiemas) sempat bersedih setelah mendengar Taufiq Kiemas, masuk bukan organisasi kemahasiswaan yaitu GMNI. Kenapa tidak memilih organisasi berasaskan Islam seperti Himpunan Mahasiswa Islam (HMI)." (Imran Hasubuan, 2012: 30).

Namun dalam waktu yang tidak lama ayahnya dapat memahami sikap politik putranya yang tertuanya itu. Ayahnya tak lupa memberikan nasihat untuk putranya akibat dari pilihannya dengan segala resikonya. Alhamdulillah Hubungan ayah dan anak kemudian menjadi membaik lagi. Setelah melihat hubungannya baik dengan ayahnya Taufiq Kiemas memberanikan diri untuk menjadikan rumahnya sebagai tempat pertemuan aktivis GMNI Palembang.

Taufiq Kiemas dibesarkan pada era kolonial Jepang dan ketika masa agresi militer Belanda II, bukan menjadi anak yang takut tetapi justru beliau (Taufiq Kiemas) mampu menjalankan cita-citanya menjadi seorang memiliki semangat cita dengan Negara Indonesia. Walaupun dibentuk pada lingkungan kerabat yang islami dan partai Masjumi, namun beliau bersekolah di lingkungan pendidikan umum, bukan sekolah bernuansa Islami, misalnya madrasah. Selanjutnya Taufiq Kiemas dimasa remaja semangat untuk mengikuti partai belum tumbuh, sebagaimana dijelaskan oleh penulis buku yaitu Rustam F Mandayun, Muhammad Yamin, Helmy Fauzy dan Imran Hasibuan yang berjudul "Jembatan Kebangsaan: Biografi Politik Taufiq Kiemas" yang diterbitkan pada 19 Februari 2009.

Ketika duduk di SMA, Taufiq Kiemas berhasil membentuk kelompok yang diberi nama *Don Quixotte* (sebuah kumpulan anak muda). Nama ini diambil nama tokoh yang terkenal dalam sebuah novel klasik Miguel de Cervantes. (Imran Hasubuan, 2012: 30).

Karier politik Taufiq Kiemas dimulai dari jenjang Pendidikan tinggi yang berstatus mahasiswa dengan menjadi anggota GMNI. Selain itu juga Taufiq Kiemas berkiprah dalam sebuah partai yang besar yaitu PDI (Partai Demokrasi Indonesia) dan dari partai inilah membawa beliau dipercaya memegang amanat sebagai anggota DPR/MPR-RI tahun 1992. Pada era ORBA (Orde Baru), dunia politiknya tidak berjalan mulus banyak menemui kendala yang dilakukan oleh pihak penguasa. Namun kariernya mulai muncul lagi setelah rezim Soeharto tumbang tahun 1998. Pelaksanaan pemilu pertama pada tahun 1999, secara tidak disangka-sangka PDI Perjuangan dinyatakan partai pemenang setelah melalui

perhitungan yang ketat. Keberuntungan memihak kepada keluarga Taufiq Kiemas dimana keberuntungan ini dapat memilih istrinya menjadi Wakil Presiden, dan setelah Gus Dur diberhentikan oleh MPR yang diketui Amin Rais dan kemudian Ibu Megawati menjadi Presiden Indonesia kelima (Dhani Irawan, 2013: 7).

Keberuntungan ini disusul oleh Taufiq Kiemas dipercaya mendapat amanat sebagai Ketua Dewan Pertimbangan Pusat (Deperpu). Disamping itu juga Taufiq Kiemas kembali terpilih menjadi anggota DPR untuk 5 tahun masa jabatan yaitu masa bakti 2009–2014 dari PDI-Perjuangan pada Daerah Pemilihan Jawa Barat II (Dhani Irawan, 2013: 7).

Ternyata banyak penulis yang mengangkat Taufiq Kiemas dari sisi karir politiknya, misalnya buku yang berjudul “Jurus Dan Manuver Politik Taufiq Kiemas: Memang Lidah Tak Bertulang” ditulis oleh Derek Manangka yang terbit pada tahun 2009.

Disamping kesibukannya sebagai politikus yang handal Taufiq Kiemas. Disamping itu beliau diberi gelar Datuk Basa Batuah. Gelar ini adalah gelar yang diperuntukkan kepada beliau yang merupakan keturunan Palembang-Minangkabau.

Ayahnya berasal dari Tanjung Raman Kabupaten Muara Enim Sumatera Selatan merupakan seorang guru yang mengembara dari desa Tanjung Raman ke Kota Palembang. Adapun ibunya bernama Hamzathoen Roesyda, seorang ibu yang memiliki darah Minangkabau tepatnya dari kanagarian Sabu kecamatan Batipuah Ateh kabupaten Tanah Datar provinsi Sumatera Barat. Taufiq Kiemas adalah seorang politikus yang dekat dengan rakyat ini dan beliau dalam sejarah

pernah mendapat posisi sebagai Bapak Negara RI ke-5 ini dan akibat kecerdasan dan kecekatannya sempat juga dipercaya sebagai anggota DPR RI dengan masa bakti 2 periode berturut-turut dari PDIP untuk daerah pemilihan Jawa Barat II, yaitu untuk periode 1999-2004 dan 2004-2005.

Sikap kecintaan Taufiq Kiemas kepada PDI Perjuangan yang didirikan oleh ibu Megawati (yang tak lain adalah istrinya). Taufiq Kiemas telah dipercaya menduduki jabatan PP PA GMNI (Dewan Kehormatan Pengurus Pusat Persatuan Alumni Gerakan Mahasiswa Nasional Indonesia), disamping itu pernah dipercaya sebagai Ketua MPR pada periode 2009-2014. Di kala itu beliau merangkap sebagai Ketua Dewan Pertimbangan DPP PDI-P.

Ketika berulang tahun dengan usia 70 tahun, beliau sempat menerbitkan buku biografinya yang berjudul “Gelora Kebangsaan Tak Kunjung Padam”. Karya ini memiliki ketebalan isi sampai 471 halaman yang menceritakan perjalanan hidup beliau dimulai dari kecil, merantau ke kota pelajar yaitu Yogyakarta, serta ceritanya dimulai Ketika terjun pada dunia politik level nasional, dan terakhir dipercaya menjabat sebagai ketua MPR.

C. Biografi Taufik Kiemas

Nama: Taufiq Kiemas	PENDIDIKAN
Nama lain: Kiemas Taufik	-SMA N 2 Palembang
Profesi : Politisi	-S.1 Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya
Agama : Islam	Palembang, tahun 1966
Tempat Lahir : Jakarta	KARIR

Tanggal Lahir : Kamis, 31 Desember 1942	-Sebagai Ketua MPR periode 2009-2014 -Anggota DPR periode 1987-1992, 2004-2009 dan 2009–2014
Kebangsaan : Indonesia	PENGHARGAAN
Nama anak : Puan Maharan	
Nama Istri : Megawati Soekarnoputri	Tahun 2003, mendapat gelar Datuk Basa Batuah

D. Mendampingi Megawati

Persahabatan Taufiq Kiemas dengan Guntur berjalan dengan baik. Pada awal Juli 1971, suami Megawati yaitu seorang militer Angkatan laut yaitu Letnan Penerbang Surindro Suprijarso, suaminya pertama ini dipanggil yang Maha Kuasa diakibatkan mengalami musibah yaitu kecelakaan pesawat di pulau Biak. Berkaitan hubungan antara Taufiq Kiemas dengan Guntur diawali dengan berziarah ke makam Soekarno di Belitar, sempat mampir ke Madiun, kompleks perumahan AURI tempat Megawati tinggal. Di Saat itulah perkenalan Taufiq Kiemas dengan Megawati dimulai. Padahal ketika itu pada akhir maret 1973 itu suasana politik orde baru mengeluarkan yang tidak sedap yaitu sikap anti Soekarno, kemudian Taufiq Kiemas dan Megawati melangsungkan pernikahan secara sederhana. (Imran Hasubuan, 2012: 66).

Babak baru perjalanan Taufiq Kiemas pun di mulai. Jauh-jauh hari Taufiq sudah punya firasat bahwa dia akan menikahi Megawati. Megawati sendiri mengakui bahwa bergabung dengan keluarga Taufiq tidaklah sulit. Karena ibunya berasal dari Bengkulu. Pernikahan pasangan suami istri ini, dapat dijelaskan bahwa Ketika itu kehidupan yang penuh gejolak, karena keduanya merupakan musuh politik orde baru. Megawati ketika itu sudah mempunyai dua orang putera,

kemudian setelah menikah dengan Taufiq Kiemas dianugerahi seorang putri yang cantik yaitu Puan Maharani. Taufiq Kiemas telah menganggap dua anak Megawati itu sebagai anak kandungnya sendiri.

Situasi dan kondisi politik yang sedang berlangsung tidak terlepas dari rumah tangga Taufiq Kiemas dan Megawati. Julukan Soekarnois diberikan kepada Taufiq Kiemas, disamping sebagai mantan tahanan politik, dan juga Ibu Megawati adalah putri tertua dari Proklamator menyebabkan tekanan politik yang diperankan oleh orde baru berjalan mulus atau tidak mendapat kendala. Sehingga kehidupan rumah tangganya berdampak pada faktor ekonomi, meskipun demikian rumah tangga Taufiq Kiemas dan Megawati masih tetap bertahan atau langgeng dan mereka menghadapinya dengan tabah (Imran Hasubuan, 2012: 68).

E. Terjun ke Partai Demokrasi Indonesia (PDI)

DPP baru PDI dibentuk tahun 1978 karena campur tangan pemerintah, menjelang pelaksanaan kongres ke dua PDI 1981 muncul kelompok empat, kelompok ini mempertanyakan keabsahan kongres karena utusan tidak dipilih melalui konferensi cabang. Mekanisme ini dinilai berlawanan dengan AD dan ART. Kelompok empat terdiri dari Usep Ranuwidjaja, Abdul Madjid, Ny.D. Walandouw dan Zakaria dalam perkembangannya mereka berkoalisi dengan Soenawar Soekowati melalui serangkaian pertemuan yang melibatkan pemerintah (Imran Hasubuan, 2012: 76).

Konflikpun terjadi setelah kelompok empat membuat keputusan memecat Soekowati dari kursi ketua umum. Ditengah situasi yang tidak menentu itu ada ajakan Mh. Isnaini dan Djon Pakan (dari Partai Murba) untuk Taufiq Kiemas

masuk PDI. Awalnya Taufiq masih bimbang dengan tawaran tersebut, namun setelah melalui konsultasi bersama kawan dekatnya, ajakan masuk partai itu akhirnya dia terima. Beberapa bulan setelah kongres kedua PDI berakhir, Taufiq resmi masuk partai berlambang banteng itu. Bung Karno pernah mengajarkan bahwa berpolitik itu harus terbuka. Caranya harus lewat partai politik. Awalnya Taufiq lebih banyak bersikap sebagai junior tetapi lalu memanfaatkan keterlibatannya di partai untuk memperluas jaringan politik, dia semakin rajin mendekati kekuatan politik untuk tujuan praktis, sampai PDI menggelar kongres ke tiga pada tahun 1986. Setelah kongres ketiga PDI menjelang pemilihan umum pemerintah berupaya mengajak keluarga Bung Karno terlibat dalam kampanye yang diharapkan mampu menyedot massa dan mendongkrak perolehan suara dalam pemilu (Imran Hasubuan, 2012: 77).

Awal tahun 1987 Megawati Soekarnoputri masuk ke PDI disusul dengan Guruh Soekarnoputra. Meski baru terjun ke dunia politik praktis, sebagai anak Bung Karno, Megawati bukanlah sosok "hijau" di dunia politik. Masa lalunya telah banyak mengajarkan dan memberikan berbagai hal positif bagi dirinya. Taufiq Kiemas ditawarkan menjadi ketua umum PDI, untuk ikut mendaftar sebagai calon legislatif. Soerjadi ketika itu hubungannya dengan Taufiq menjadi renggang karena Soerjadi masih ingin menjadi Ketua Umum PDI untuk satu periode lagi, Taufiq kurang setuju. Menjelang kongres, dukungan terhadap Soerjadi memang masih besar namun berubah setelah memasuki hari awal kongres (Imran Hasubuan, 2012: 80). Beberapa cabang yang semula mendukung Soerjadi tiba-tiba menentang hal ini terjadi setelah ada isyarat terbuka dari pemerintah dan

ABRI mereka sudah tidak lagi menghendaki Soerjadi. Dalam situasi seperti itu Taufiq Kiemas mencoba menjaga jarak, setelah berbagai pihak mendorong Megawati menjadi kandidat ketua umum di KLB Surabaya, Taufiq bersama Panda Nababan membentuk tim sukses yang solid, profesional, dan bekerja dalam kecepatan yang tinggi. Tim sukses ini kemudian diberi nama sandi Tim Garuda. Hasilnya pada tahun 1993 sebanyak 71 cabang mendukung Megawati.

Pemerintah orde baru tidak rela dan menjadi paranoit melihat fenomena itu. Rintangan untuk menjegal laju Megawati segera dipasang oleh pemerintah, antara lain menghambat pendukung Megawati datang ke kongres, pengurus PDI di daerah agar mendukung calon yang dipilih pemerintah dan ABRI. Pemerintah ikut campur tangan akhirnya kongres luar biasa PDI gagal. Campur tangan pemerintah dan ABRI untuk menjatuhkan Megawati semakin tak terbantahkan lagi karena penghianatan Fatimah Ahmad dan sejumlah fungsionaris PDI, melihat kenyataan itu Taufiq sering datang ke kantor PDI dan aktif memfasilitasi, memobilisasi dan mengorganisasi massa menentang kekuasaan Soeharto. Taufiq menata kekuatan arus bawah dan langsung berbaur dengan massa karena kekuatan ini tidak akan mampu dibendung oleh kekuatan manapun termasuk penguasa negara. Akhirnya pemerintah melarang kegiatan apapun dimarkas PDI lalu menyegel kantor tersebut pada 27 september 1996 (Imran Hasubuan, 2012: 91).

F. Mendirikan PDI Perjuangan

PDI Megawati tidak punya kantor lagi, akhirnya markas partai pindah kerumah Mega dan Taufiq di jalan Kebagusan. Taufiq Kiemas tetap membantu berbagai perlawanan yang dilakukan para pendukung Megawati di daerah.

Menurut Mangara Siahaan, kondisi partai setelah peristiwa penyegelan menjadi kacau-balau semua fungsionaris partai dipusat maupun didaerah menghadapi teror dari pemerintah (Imran Hasubuan, 2012: 106).

Menghadapi pemilu 1997 PDI Megawati tetap solid, meski pemerintah hanya mengakui PDI dibawah kepemimpinan Soerjadi, tetapi PDI Megawati tetap mengajukan daftar calon anggota legislatif, karena pihak lembaga pemilu hanya memberikan formulir kepada PDI Soerjadi dalam beberapa putaran kampanye pemilu PDI Soerjadi dibuat tak berkutik oleh massa pendukung Megawati, rencana PDI Soerjadi melakukan konsolidasi selalu berhasil digagalkan oleh para pendukung Megawati. Hasilnya perolehan suara PDI Soerjadi dalam pemilu 1997 merosot tajam. Sementara itu, Golkar meraih suara sukses sebanyak 325 kursi (74,51%) di DPR RI. Akhirnya Soeharto kembali menjadi Presiden yang ketujuh kalinya. Namun kemenangan itu hanyalah semu, karena gelombang reformasi yang sesungguhnya dating menerpa dunia politik Indonesia (Imran Hasubuan, 2012: 108).

Awal tahun 1998, Indonesia mengalami krisis ekonomi aksi unjuk rasa kian marak setelah Presiden memberitakan bahwa adanya menaikkan harga BBM dan tarif dasar listrik, rakyat turun kejalan menuntut agar BBM diturunkan, bahkan meminta kepada Presiden meletakkan jabatannya, demo itu berujung 21 mei 1998 Presiden Soeharto meletakkan tahtahnya. DPP PDI Soerjadi menggelar kongres di Palu, kongres itu diwarnai dengan kekerasan oleh simpatisan PDI Megawati. Akhirnya PDI Megawati melaksanakan kongres di Bali dan massa rakyat memberikan kata "perjuangan" setelah nama PDI dibawah kepemimpinannya.

Inilah pernyataan resmi pertama penggunaan nama PDI Perjuangan sebagai pengganti nama PDI Megawati dan kepala banteng sebagai lambang PDI menggunakan moncong putih dan bermata merah untuk membedakan partainya dengan PDI pimpinan Soerjadi (Imran Hasubuan, 2012: 109).

G. Di Puncak Kekuasaan

Sikap arif yang ditunjukkan oleh Taufiq Kiemas berusaha meredam pertentangan yang semakin tajam di parlemen ia mengajak semua pihak untuk berkepala dingin menyelesaikan masalah. Sikap Taufiq ini berkaitan dengan hormatnya terhadap Gusdur. Niat baik Taufiq ini tidak selamanya diterima semua kalangan. Isu dan tuduhan miring bahwa Taufiq mempunyai hubungan khusus dengan konglomerat hitam tapi, Taufiq tidak menanggapi isu tersebut (Imran Hasubuan, 2012: 102).

Akibat dari hubungan Gusdur dengan Megawati merenggang karena Gusdur mencopot laksamana dan Gusdur membentuk tim monitoring untuk mengawasi kinerja menteri koordinator ekonomi, keuangan, dan industri yaitu Kwik Kian Gie. Tindakan ini dipandang meremehkan kemampuan kader PDI Perjuangan. Karena tindakan Gusdur memfitnah Taufiq Kiemas terlibat jaringan penyelundupan mobil mewah, Taufiq mulai merasa tak nyaman dengan maneuver Gusdur, apalagi ia dituduh ingin menjatuhkan Gusdur. Hal ini, menyebabkan PDI Perjuangan merasa dikhianati Gusdur sebab Presiden tidak pernah melaksanakan ketetapan MPR No. VII/2000 dan keputusan Presiden No. 121/2000 tentang pemberian tugas sehari-hari pemerintahan kepada Wakil Presiden (Megawati) tidak pernah diajak berunding (Imran Hasubuan, 2012: 124).

Sebagai seorang tokoh nasional, sebuah langkah Gerilya politik tetap dilakukan Taufiq, ia rajin melakukan pendekatan kepada tokoh bangsa Amin Rais (Ketua MPR RI), Buya Ahmad Syafi'i Ma'arif (selaku Ketua Umum Pusat Muhammadiyah), serta sejumlah petinggi TNI. Untuk menarik simpati dunia ia pergi ke Amerika Serikat didampingi beberapa pengurus PDI Perjuangan dan bertemu dengan senator dari Deputy Menteri Pertahanan AS (Paul Wolfowitz). Taufiq Kiemas memiliki misi yang besar untuk negara ini dan beliau juga berupaya dengan mengusahakan bantuan ekonomi, termasuk juga dalam hal pemulihan hubungan militer. Kaitan dengan misi Taufiq Kiemas mampu menakrabkan antara TNI dengan kubu Megawati.

Sikap yang ditampilkan oleh Presiden Gusdur yaitu menolak hadir untuk memberikan laporan pertanggung jawaban dalam sidang istimewa MPR. Maka MPR mencabut mandatnya tepatnya terjadi 23 Juli 2001, Ibu Megawati resmi dipilih menjadi Kepala Negara (Presiden) RI yang ke-5 melalui proses pemilihan yang damai, demokratis, dan konstitusional. Dalam sidang istimewa tersebut 591 anggota MPR secara bulat memilih Megawati (Imran Hasubuan, 2012: 131).

Selanjutnya keuletan Taufiq Kiemas pun sebagai bagian Partai PDI berupaya membenahi partai, kemudian ditunjuk untuk menjadi Ketua Dewan Pertimbangan Pusat PDI Perjuangan. Dengan kedudukan tersebut, tanggung jawab Taufiq Kiemas untuk membesarkan partai semakin besar. Secara formal Taufiq terlibat langsung dalam berbagai kebijakan yang digariskan PDI Perjuangan. Semua itu dilakukannya dengan penuh tanggung jawab dan langkah-

langkah strategis dilakukannya sehingga citra partai dalam persepsi masyarakat semakin membaik (Imran Hasubuan, 2012: 138).

BAB IV

HASIL DAN PEMBAHASAN GAGASAN KEBANGSAAN DI INDONESIA OLEH TAUFIQ KIEMAS

Pemikiran Taufiq Kiemas Terhadap Konsep Gagasan Kebangsaan di Indonesia

Menurut Taufiq Kiemas dalam salah satu karya tulisnya, bahwa harus ada kesadaran partai politiklah yang harus berada didepan dan menjadi pengamal dan menjunjung tinggi Pancasila sebagai pedoman hidup sehari-hari yang dimuat dalam sebuah perundang-undangan (Imran Hasibuan, 2015: 308). Disamping itu, kepemimpinan partai politiklah yang juga harus berada paling depan sebagai *executing policy* atau pelaksana peraturan perundang-undangan yang dibuatnya itu untuk dapat membimbing massa atau rakyat agar dapat bersama-sama mencapai tujuan bernegara kita yaitu mencapai masyarakat yang aman, sentosa dan penuh ampunan dari Tuhan atau masyarakat yang *gemah ripah lohjinawi* berdasarkan nilai dalam yang tinggi dari Pancasila dan bersandarkan pada UUD 1945 di dalam wadah serta bingkai Indonesia dalam suatu sistem sosial dan budaya yang bersemboyan dengan Bhinneka Tunggal Ika.

Pijakan yang terkandung pada 4 Pilar dalam hidup warga Negara Indonesia, selain 4 pilar itu juga UUD 1945, NKRI, serta Bhineka Tunggal Ika (Imran Hasibuan dkk, 2012: 304). Prinsip yang empat tersebut apabila diamati yaitu nilai-nilai yang dasar yang terkandung pada sila-sila Pancasila yang juga terdapat pada Pembukaan UUD 1945.

Konsep pluralitas dan multikulturalitas bagi bangsa Indonesia bukanlah barang baru dan sejarah telah mencatat bahwa bangsa dan negara yang sangat

kental dikenal dengan konsep tersebut, namun sayangnya tidak bisa bertahan lama mengalami keputaran pada era sekarang. Tidak kekerasan yang sering terjadi di tengah masyarakat daerah, benih peperangan antar kelompok (suku) bermuculan di beberapa daerah, misalnya peristiwa di Papua dan di Sampit (Kalimantan Tengah), disamping itu juga munculnya konflik mengatasnamakan agama acap kali terjadi. Peristiwa yang memilukan dan sekaligus memperingatkan inilah menarik dan menjadi dasar lahirnya gagasan Taufiq Kiemas dalam berbangsa dan bernegara. Gagasan kebangsaan Taufiq Kiemas yang berasal dari kemajemukan pluralisme dan toleransi (Imran Hasibuan, 2015: 145). Dampak dari pemikiran Taufiq Kiemas secara bertahap masyarakat menyambut baik dan tidak sedikit masyarakat kembali menjadi seorang nasionalisme yang cinta dan rela berkorban untuk Indonesia.

Selanjutnya secara rinci dapat dibahas satu persatu dari empat (4) pilar tersebut sebagai berikut:

a. Pilar Pancasila.

Pancasila adalah ideologi dasar dari negara Indonesia. Sebagaimana telah dijelaskan pada bab sebelumnya bahwa Pancasila itu merupakan kata yang dari bahasa sanskerta, apabila diterjemahkan panca memiliki arti 5, sedangkan kata sila mempunyai makna asas (prinsip). Maka dengan demikian Pancasila itu adalah acuan bagi kehidupan bangsa Indonesia.

Dari perspektif hukum Pancasila itu populer diistilahkan dengan sumber dari segala sumber hukum, disamping itu Pancasila memiliki makna secara filosofis. Yaitu sebagai pijakan dalam berfilosofi dalam kehidupan berbangsa

dan bernegara. Atau dengan kata lain bahwa Pancasila adalah pola pikir dalam bernegara dan merupakan pedoman kehidupan berbangsa dan bernegara.

Oleh karena itu Pancasila merupakan fondasi negara dan pedoman kehidupan yang memiliki harkat dan derajat yang tinggi yang wajib dijalankan dan diamalkan segenap lapisan masyarakat Indonesia dalam hidup warga Negara, beragama, dan bernegara. Sehingga Pancasila seharusnya merupakan ciri warga Negara dan sekaligus merupakan identitas masyarakat Indonesia.

Mengingat eksistensi serta manfaat Pancasila yang mendasar untuk bangsa dan negara Indonesia, maka Pancasila merupakan landasan utama utama dalam membangun karakter anak bangsa. Disamping itu Pancasila adalah cermin, pedoman, dan merupakan tujuan pada bidang pembangunan identitas warga Negara.

Secara substansi, pembentukan karakter bangsa bermakna membentuk manusia dan masyarakat Indonesia yang mengacau nilai-nilai pada Pancasila. Bangsa Indonesia mempunyai karakter, karakter serta sifat seperti keagamaan, ramah, jiwa kemanusiaan, kebangsaan, rela berkorban, dan mementingkan kepentingan bersama di atas kepentingan pribadi. Karakter seperti ini merupakan nilai yang tinggi dan luhur dalam pengembangan karakter masyarakat.

Selaku kader PDIP yang senior ini bapak Taufiq Kiemas menjelaskan dimana empat Pilar, yang paling paling utama adalah Pancasila adalah cerminan keinginan dari masyarakat Indonesia. “Pancasila adalah dorongan hati manusia Indonesia ke dalam dimensi sosial-politik. Dalam Pancasila, bangsa Indonesia melihat sebagaimana ia mencita-citakannya,” (Imran, 2012: 45). Taufiq Kiemas

menjelaskan Pancasila itu merupakan acuan dalam memandang potret ekonomi, sosial-politik, dan budaya bangsa Indonesia. Taufiq Kiemas menjelaskan bahwa masyarakat Indonesia merupakan masyarakat moderat-toleran, namun sangat sedikit yang berperilaku ekstrim.

Ada 5 pilar sebagai pijakan perumusan Pancasila yaitu: adanya keyakinan kepada Tuhan, Kemanusiaan, adanya unsur persatuan, Kerakyatan, serta sisi keadilan. (Widjaja, A.W, 2004: 12).

Adapun apabila dijabarkan dari nilai-nilai dalam Pancasila, dapat diuraikan sebagai berikut:

1) Kedamaian

Kata kedamaian dapat didefinisikan yaitu situasi yang tercipta penuh rasa aman, damai dan tertib serta jauh dari konflik dan kekerasan. Semua elemen masyarakat berfungsi dalam proses interaksi sosial dan berjalan secara serasi, selaras, serta seimbang, sehingga tercipta suasana ketertiban, keteraturan, dan ketenteraman. Setiap keperluan masyarakat yang dibutuhkan ada (terpenuhi). Masyarakat jauh dari sikap pertikaian untuk memperebutkan sesuatu.

2) Keimanan

Kata keyakinan dalam Agama disebut dengan kata Keimanan diaman artinya sebuah perilaku yang melukiskan suatu kepercayaan bahwa adanya kekuatan dari dalam (batin) akan Tuhan Yang Maha Kuasa. Keimanan ini manusia akan muncul suatu keyakinan dimana Tuhan Yang Maha Esa yang menjadikan, memelihara, dan mengatur alam jagat raya ini. Dimana semua yang

terjadi merupakan kemauan atau kehendak Yang Maha Kuasa, oleh karena itu adanya kewajiban dalam batin menerima dengan sepenuh hati tanpa ragu-ragu.

3) Ketaqwaan

Adapun kata Ketaqwaan merupakan perwujudan dari sikap tawakal atau berserah diri secara utuh serta adanya sikap ikhlas diatur Tuhan Yang Maha Esa, disamping itu bersikap taat dan siap melaksanakan semua perintah-Nya serta tidak akan melakukan semua yang bertentangan dengan aturan Tuhannya.

4) Keadilan

Kata Keadilan dapat bermakna sikap dalam mendudukkan segala sesuatu sesuai dengan hak dan kewajiban secara benar sesuai berdasarkan status dan kedudukannya.

5) Kesetaraan

Kata kesetaraan dapat bermakna perilaku yang bijak dari sikap warga Negara tanpa melihat agama, jender, kedudukan, budaya dan lain-lain. Dimana sikap kesetaraan memberlakukan siapa saja dinilai setara di mata pemerintah, hukum dan mendapat peluang yang setara dalam kehidupan sesuai dengan keahlian, dan kemampuannya.

6) Keselarasan

Sikap keselarasan dapat dimaknai sebagai keadaan yang melukiskan ketertiban, kerapihan, keteraturan dan ketaatan dimana orang melakukan fungsi dan peran secara benar dan proporsional, yang akhirnya muncul suasana yang tenteram, damai dan harmoni.

7) Keberadaban

Gambaran dalam hidup Bersama dengan berpedoman pada ketentuan yang ada dan menjunjung tingginya dan ini merupakan nilai luhur budaya bangsa disebut Keberadaban. Dan tentunya Pancasila sebagai pedoman utama dalam melakukan berfikir dan bertindak.

8) Prinsip Persatuan

Prinsip Persatuan merupakan situasi masyarakat yang beraneka ragam tetapi dapat mewujudkan kesatuan yang utuh atau tidak terpecah-pecah. Disamping itu semua elemen menghormati dan menjaga secara Bersama bagian integral yang merupakan satu kesatuan yang utuh.

9) Hasil secara Mufakat

Mufakat adalah suatu sikap terbuka untuk menghasilkan kesepakatan bersama secara musyawarah. Keputusan sebagai hasil mufakat secara musyawarah harus dipegang teguh dan wajib dipatuhi dalam kehidupan bersama.

10) Kebijaksanaan

Kebijaksanaan adalah sikap yang menggambarkan hasil olah pikir dan olah rasa yang bersumber dari hati nurani dan bersendi pada kebenaran, keadilan dan keutamaan. Bagi bangsa Indonesia hal ini sesuai dengan nilai yang terkandung dalam Pancasila.

11) Kesejahteraan

Kesejahteraan adalah kondisi yang menggambarkan terpenuhinya tuntutan kebutuhan manusia, baik kebutuhan lahiriah maupun batiniah sehingga terwujud

rasa puas diri, tenteram, damai dan bahagia. Kondisi ini hanya akan dapat dicapai dengan kerja keras, jujur dan bertanggungjawab.

Mencermati kandungan Pancasila dari sisi nilai, konsep, dan prinsip dapat disimpulkan bahwa nilai, konsep, dan prinsip akan dapat berubah dan beradaptasi dengan budaya dan kehidupan bangsa Indonesia. Tetapi yang perlu diperhatikan yaitu dari nilai, konsep dan prinsip itu dapat praktekkan secara sempurna nilai-nilai terutama dalam pergaulan sehari-hari.

Adapun perumusan Pancasila sebagai berikut:

Dalam sejarah mencatat beberapa saran dan usulan-usulan yang diusulkan tokoh sebagai berikut:

Mr. Muhammad Yamin, dalam pidatonya pada 29 Mei 1945 dengan rumusan, yaitu:

- peri kebangsaan;
- peri kemanusiaan;
- peri ketuhanan;
- peri kerakyatan; dan
- kesejahteraan rakyat.

Sedangkan Mr. Supomo, dalam pidatonya 31 Mei 1945 dengan rumusan, yaitu:

- paham Negara Kesatuan;
- perhubungan Negara dengan Agama;
- sistem Badan Permusyawaratan; dan
- sosialisasi Negara, dan hubungan antar Bangsa.

Selanjutnya Ir. Soekarno, dalam pidatonya 1 Juni 1945, dengan rumusan yaitu:

- kebangsaan Indonesia;
- internasionalisme atau peri kemanusiaan;
- mufakat atau demokrasi;
- kesejahteraan sosial; dan
- ketuhanan yang berkebudayaan.

Kemudian beliau beri nama Pancasila.

Kemudian tanggal 22 Juni 1945 panitia kecil yang telah terbentuk melaksanakan pertemuan dengan merumuskan asas Negara:

1. Ketuhanan dengan berkewajiban menjalankan syariat Islam bagi pemeluk-pemeluknya
2. Kemanusiaan yang adil dan beradab
3. Persatuan Indonesia
4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan
5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia

Selanjutnya sebuah konsep dasar itu dinamakan dengan “Piagam Jakarta” atau “Jakarta Charter”. Tetapi rancangan rumusan dasar ini memunculkan problema yang tidak kecil disebabkan dimana warga Negara tidak semua beragama Islam, akhirnya dengan kesepakatan sila ini dirubah menjadi “Ketuhanan Yang Maha Esa”. Setelah dirubah sila pertama itu secara resmi diterima sebagai dasar negara, adalah: (Widjaja, A.W, 2004: 14)

- Rancangan Pertama: Piagam Jakarta (Jakarta Charter) pada tanggal 22 Juni 1945,
- Rancangan Kedua: Pembukaan Undang-undang Dasar - tanggal 18 Agustus 1945
- Rancangan Ketiga: Mukaddimah Konstitusi Republik Indonesia Serikat - tanggal 27 Desember 1949
- Rancangan Keempat: Mukaddimah Undang-undang Dasar Sementara – tanggal 15 Agustus 1950
- Rancangan Kelima : Rumusan Kedua yang dijiwai oleh Rumusan Pertama (merujuk Dekrit Presiden 5 Juli 1959)

Dari uraian di atas dapatlah disimpulkan dimana Pancasila itu dipandang sudah cukup syarat diakui sebagai pilar untuk kehidupana bangsa dan Negara Indonesia yang majemuk dan Negara yang berbentang luas. Disamping itu Pancasila dapat memenuhi muatan keberagaman baik agama, suku, ras, kedudukan dan kelas yang dimiliki oleh bangsa dan Negara Indonesia. Sila pertama, memiliki asas yang mendasar yang ada pada setiap agama dan kepercayaan yang dianut bangsa Indonesia.

Sila kedua, mengandung makna suatu penghargaan kepada status semua orang. Orang diposisikan kepada harkat dan martabatnya masing-masing, tentu tidak hanya setara, namun juga dinilai dari sisi keadilan dan peradaban. Konsep Pancasila pada prinsipnya menghormati kedaulatan rakyat yang tinggi, tetapi dalam pelaksanaannya penuh dengan hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan/perwakilan. Selanjutnya untuk perikehidupan bermasyarakat

bertujuan untuk merealisasikan konsep sila ke lima, baik kesejahteraan secara individu maupun orang banyak. Maka benarlah apabila dikatakan bahwa Pancasila itu sebagai pilar yang tepat bagi bangsa dan Negara yang majemuk.

b. Pilar Undang-Undang Dasar 1945

Kita telah mengetahui bahwa UUD 1945 adalah aturan dasar yang tertulis (*basiclaw*) Indonesia sampai sekarang. Konstitusi ini disahkan secara hukum menjadi pijakan atau dasar negara oleh PPKI yaitu 18 Agustus 1945. Sejarah telah mencatat dimana 27 Desember 1949 kita memberlakukan Konstitusi RIS, UUDS 1950 berlaku pada 17 Agustus 1950. Kemudian Dekrit Presiden 5 Juli 1959 memberlakukan kembali UUD 1945 melalui sidang secara aklamasi oleh DPR yaitu tanggal 22 Juli 1959.

Konstitusi telah mengalami 4 kali amandemen mulai tahun 1999 sampai dengan tahun 2002, dimana telah mengubah struktur institusi Negara dalam ketatanegaraan Negara Republik Indonesia.

Asas yang ada dalam UUD 1945:

1. Sumber Kekuasaan

Pada paragraf tiga dijelaskan dimana “kemerdekaan bangsa Indonesia itu atas berkat rahmat Allah Yang Maha Kuasa,” yang mengandung makna dimana kebebasan (kemerdekaan) dari penjajah itu merupakan anugerah Tuhan yang Maha Esa. Atau dapat dikatakan bahwa kebebasan yang didapat masyarakat Indonesia merupakan pemberian dari Allah Yang Maha Kuasa. Pernyataan ini dijelaskan pada dasar negara yaitu sila Ketuhanan Yang Maha Esa.

Dalam paragraf empat dijelaskan bahwa “Negara Republik Indonesia tersusun dalam bentuk kedaulatan rakyat,” yang memiliki arti dimana rakyatlah yang memegang kedaulatan Negara. Pernyataan tersebut diperjelas pada Bab I pasal 1 ayat (2), yang menjelaskan dimana “rakyatlah yang memiliki Kedaulatan “.

Berdasarkan uraian penjelasan di atas dapat disimpulkan dimana Ketuhanan dan rakyat adalah asal kedautan menjalankan sistem pemerintahan dalam mengatur jalannya negara Indonesia.

Dalam ketatanegaraan Indonesia dimana pola pelaksanaan negara dan pemerintahan haruslah menagcu kepada Tuhan Yang Maha Pencipta dan Rakyat. Oleh karena itu dibutuhkan suatu pemikiran tajam untuk menyatukan antara dua sumber kekuasaan itu sehingga tidak bertentangan antara kedua sumber tersebut.

2. Hak Asasi Manusia

Di bawah ini dijelaskan tentang kepedulian para pendiri Negara (*founding fathers*) dalam hal yang menyangkut hak yang mendasar yang termuat pada Pembukaan UUD 1945:

Perjuangan suatu kebebasan (kemerdekaan) masyarakat dan Negara Indonesia adalah merupakan tujuan dalam “menciptakan kehidupan kebangsaan yang bebas,” diantaranya dalam hal yang berkenaan dengan hak asasi manusia.

Adapun ciri-ciri dari adanya kemerdekaan yaitu adanya kebebasan (merdeka), berdaulat, bersatu, adil dan makmur yang mengangkat hak yang dasar dari manusia. Misalnya hak memiliki harta, jabatan dan mendapat pengajaran yang diakui di Indonesia.

Pada paragraf satu dari Pembukaan UUD 1945 adalah sebuah pernyataan yang menyangkut hak asasi manusia, misalnya suatu kesetaraan dalam gender. Kebebasan, perikeadilan dan perikemanusiaan adalah perwujudan kenyataan dalam hak kesetaraan.

Dalam batang tubuh UUD 1945 yaitu pasal 27, 28, 29, 30 dan 31 yang merupakan pasal-pasal yang menjelaskan hak asasi manusia.

Dalam Pembukaan UUD 1945 dan pasal-pasal dalam UUD 1945 menjelaskan tentang ketentuan hak dasar dari manusia. Bahkan dalam UUD 1945 yang belum mengalami amandemen sudah dapat menampung masalah hak dasar dari manusia dalam bermasyarakat dan bernegara.

3. Sistem Demokrasi

Pada paragraf empat dijelaskan dimana sistem pemerintahan Indonesia:” Oleh karena itu disusunlah kemerdekaan Indonesia di dalam sebuah UUD, yang tersusun dimana rakyatlah yang berkedaulatan yang berdasar kepada Pancasila”. Pernyataan ini mencerminkan bahwa demokrasi adalah merupakan sistem pemerintahan.

Kata lain dari kedaulatan rakyat yaitu demokrasi. Tetapi dalam pelaksanaan demokrasi beradaptasi dengan sosial budaya yang tumbuh di Indonesia. Konsep demokrasi itu berasal dari Tuhan Yang Maha Kuasa dan juga bersumber dari rakyat. Dalam perkembangannya demokrasi di Indonesia pernah berlaku “demokrasi terpimpin, di era orde lama” disusul dengan “demokrasi Pancasila” pada Soeharto yang mengacu pada aliran liberalisme.

4. Faham Rasa Kebersamaan dan sikap kegotong-royongan

Faham ini berada di:

Misi dari Negara Indonesia yaitu “melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia,” Memberikan perlindungan kepada semua orang.

Adapun tujuan terbentuknya Negara Kesatuan republik Indonesia yaitu;” mewujudkan keadilan masyarakat yang merata.” Bukan hanya kepentingan individu tetapi kebutuhan setiak warga Negara Indonesia.

Adapun tujuan dari UUD1945, yaitu: landasan Konstitusional yang ideal yaitu Pancasila, alat pengendalian mayarakat, alat untuk mengubah masyarakat, alat untuk menertibkan sosial, sarana dalam mewujudkan keadilan masyarakat lahir maupun batin, dan sarana penggerak pembangunan,

Sedangan fungsi dari UUD 1945 yaitu: 1) fungsi pedoman atau acuan dalam penyusunan peraturan perundang-undangan, 2) fungsi alat kontrol terhadap norma hukum yang lebih rendah sesuai atau tidak dengan norma hukum yang lebih tinggi, dan fungsi alat kontrol terhadap norma hukum yang bertentangan dengan UUD 1945.

c. Pilar Bhinneka Tunggal Ika

Selanjutnya semboyan Indonesia yaitu Bhinneka Tunggal Ika. Kalimat ini memiliki arti “Berbeda-beda tetapi tetap satu”. Adapun kata bhinneka bermakna “beraneka ragam”. Dalam istilah Sanskerta kata aneka bermakna “macam” dan yang akhirnya masuk ke dalam Bahasa Indonesia yang baku. Kemudian istilah tunggal bermakna “satu”. Sedangkan ika bermakana “itu”. Menurut etimologi (bahasa) Bhinneka Tunggal Ika diartikan “Beraneka Satu Itu”, yang berarti

walaupun berlainan namun pada satu kesatuan. Slogan ini melukiskan suatu kesatuan Bangsa dan NKRI yang beraneka ragam agama, ras, budaya, bahasa, suku bangsa, dan keyakinan.

Kalimat semboyan di atas bersumber pada sebuah kakawin Jawa Kuno yakni kakawin milik Sutasoma, tulisan dari Mpu Tantular hidup di masa kerajaan Majapahit (abad 14). Konsep kakawin ini memiliki ajaran toleransi di lingkungan pemeluk agama Hindu berfaham Siwa dengan pemeluk agama Buddha. Penjelasan ini secara lengkap dapat dijelaskan yaitu:

- Rwāneka dhātu winuwus Buddha Wiswa,
- Bhinnêki rakwa ring apan kena parwanosen,
- Mangka ng Jinatwa kalawan Śiwatatwa tunggal,
- Bhinnêka tunggal ika tan hana dharma mangrwa

Bermakna:

- Konon Buddha dan Siwa merupakan dua zat yang berbeda.
- Mereka memang berbeda, tetapi bagaimanakah bisa dikenali?
- Sebab kebenaran Jina (Buddha) dan Siwa adalah tunggal
- Terpecah belahlah itu, tetapi satu jugalah itu. Tidak ada kerancuan dalam kebenaran.

Apabila diamati bahwa momentum kebebasan (Kemerdekaan) Indonesia dan asas Negara yaitu Pancasila dengan semboyan Bhinneka Tunggal Ika tidak terpisah. Penjelasan tersebut senada sama elemen yang terdapat pada Burung Garuda. Dalam Peraturan Pemerintah No. 66 tahun 1951 pasal 1 diterangkan bahwa: Burung Garuda memiliki tiga unsur, yaitu:

1. Burung Garuda yang melihat dengan kepalanya lurus ke sebelah kanannya;
2. Perisai berupa jantung yang digantung dengan rantai pada leher Garuda,
dan
3. Semboyan yang ditulis di atas pita yang dicengkeram oleh Garuda.

Tulisan berupa huruf Latin ada di atas pita merupakan semboyan menggunakan istilah Jawa Kuno yaitu: BHINNEKA TUNGGAL IKA.

Burung Garuda tersebut memiliki makna:

Tenaga pembangunan yang ada pada burung garuda yang terletak disamping melukiskan kokoh dan kuat, disamping itu melukiskan hari bersejarah yaitu tanggal kemerdekaan Indonesia yang dilukiskan dengan bulu yang berjumlah 17 helai pada Burung Garuda tersebut bermakna tanggal 17, jumlah bulu pada ekor sebanyak 8 melukiskan bulan 8, jumlah bulu dibawah perisai sebanyak 19, sedang jumlah bulu pada leher sebanyak 45. Sehingga jumlah bulu-bulu burung garuda tersebut melukiskan tanggal hari kemerdekaan bangsa Indonesia, yakni 17 Agustus 1945.

Kemudian ada lagi sebuah benteng di leher yang ada burung garuda melukiskan Negara Republik Indonesia yang menempati garis khatulistiwa, dilukiskan garis hitam horizontal yang berfungsi membelah perisai, lalu ada 5 segmen melukiskan sila-sila dalam Pancasila. Selanjutnya sila pertama dilukiskan dengan bintang bersegi 5 yang ada di tengah perisai yang melukiskan cahaya (nur) Tuhan Yang Maha Kuasa. Sila kedua dilukiskan dengan rantai yang tersambung dari bulatan dan persegi, yang juga melukiskan mono dualistik masyarakat Indonesia. Pohon beringin sebagai tempat berlindung melukiskan kebangsaan,;

Banteng melukiskan kekuatan dan kedaulatan rakyat merupakan makna sila keempat. Terakhir sila kelima dilambangkan dengan kapas dan padi yang melukiskan dari sejahtera dan makmur.

d. Pilar Dari Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI)

Bentuk Negara Republik Indonesia yaitu NKRI, menjelaskan bahwa Negara Republik Indonesia yang merupakan negara kepulauan, disamping itu juga bentuk negaranya adalah republik.

Sejarah dalam memproklamkan hari Kemerdekaan 17 Agustus 1945 berkaitan erat dengan keberadaan Negara Kesatuan Republik Indonesia, hal ini disebabkan perjuangan dalam mencapai proklamasi dimana bangsa Indonesia sukses membentuk negara dengan mengumumkan ke bangsa luar dimana mulai 17 Agustus 1945 telah terbentuk sebuah negeri yang baru bebas dari penjajahan . Negara itu adalah NKRI.

NKRI yang lahir dari sudut pandang Hukum Tata Negara tepatnya 17 Agustus 1945 tetapi masih ada kekurangan, sehingga dapat dikatakan Negara Indonesia belum lengkap (sempurna) menjadi sebuah negara, karena di waktu itu NKRI baru saja berdiri. PPKI telah melaksanakan sidang tepatnya 18 Agustus 1945, sehingga memenuhi secara hukum menjadi sebuah Negara berupa adanya pemerintah yang berdaulat dengan menunjuk (mengangkat) seorang Presiden dan Wakil Presiden, akhirnya dalam sejarah PPKI adalah merupakan institusi pembentuk Negara serta telah mengesahkan sebuah konstitusi yang disebut UUD 1945, yang merupakan dasar negara dan tujuan negara.

Tokoh nasional yang disebut dengan Proklamator telah membentuk Negara berupa Negara kesatuan. Hal ini disebabkan Negara berupa negara kesatuan itu dinilai sangat sesuai dan cocok bagi masyarakat Indonesia yang plural ini, dengan memiliki paham negara persatuan, dalam rangka mengantisipasi semua paham baik perorangan atau kelompok serta negara mengutamakan kepentingan umum.

Semangat kebangsaan merupakan modal dalam pembentukan NKRI, yang melindungi segenap bangsa dan seluruh tumpah darah Indonesia, memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa dan ikut serta melaksanakan ketertiban dunia berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan sosial.

Tujuan dari NKRI

Adapun tujuan dari NKRI termaktub pada Pembukaan UUD 1945 pada paragraf empat yakni “Kemudian dari pada itu untuk membentuk suatu pemerintah Negara Indonesia yang melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia dan untuk memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi, dan keadilan sosial”.

Berangkat dari formula yang telah dijelaskan, memiliki suatu tujuan Negara yang akan mewujudkan dan dilakukan Negara, yaitu:

- Melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia;
- Memajukan kesejahteraan umum;
- Mencerdaskan kehidupan bangsa;

- Ikut serta melaksanakan ketertiban dunia berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi, dan keadilan sosial.

Konsep empat pilar berbangsa dan bernegara adalah momentum yang bersejarah dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Selanjutnya bahwa Pancasila merupakan pedoman hidup dan merupakan dasar Negara Indonesia, disamping itu juga Pancasila adalah instrumen pemersatu bangsa, serta UUD 1945 adalah sebuah norma yang mengatur perikehidupan bangsa dan negara.

Konsep 4 pilar berbangsa dan bernegara adalah pondasi yang permanen bagi bangsa Indonesia dalam sistem bernegara, namun Taufik Kiemas konsep dua pilar ini dipandang belum sempurna, sehingga Taufiq Kiemas memunculkan ide 4 Pilar Berbangsa yaitu, Pancasila, UUD 1945, Bhineka Tunggal Ika dan NKRI. Selanjutnya menurut Taufiq Kiemas Empat Pilar adalah alat untuk menyatukan elemen bangsa (tidak bisa dipisahkan antara satu dengan yang lainnya) untuk memelihara dan mengembangkan keberlangsungan Negara.

Dalam pelaksanaannya 4 pilar belum dapat dipahami dan diamalkan secara sempurna oleh segenap masyarakat. Bahkan 2 pilar dari Pancasila dan UUD 1945 telah dimasukkan ke dalam mata pelajaran sekolah, namun isi amanat UUD 1945 masih terabaikan. Hal ini disebabkan oleh karena keinginan untuk bersatu, yang akhirnya akan menghancurkan NKRI.

Suatu kondisi dimana adanya kehancuran persatuan dan kesatuan bangsa tersebut yang menjadi hal yang mendasar seorang Taufik Kiemas menerbitkan suatu gagasan yang disebut dengan Empat Pilar Kebangsaan. Apabila diamati secara mendalam dimana empat pilar ini merupakan tiang yang kuat untuk

menyelamatkan semangat bersatu, serta konsep 4 pilar tersebut yang merupakan motivasi yang kuat bagi pejuang kemerdekaan Republik Indonesia.

Keadaan yang sangat memprihatinkan dari Negara ini adalah para pemimpin sudah mengalami penurunan yang drastis baik moral maupun perilaku. Misalnya melakukan tindak pidana korupsi yang tidak sedikit merugikan uang Negara. Hal ini sangat memalukan dan memprihatinkan, bahkan kejahatan korupsi sudah dianggap budaya untuk menjadi orang kaya, disamping itu mengumpulkan kekayaan merupakan tugas utama para penguasa negara, yang selanjutnya mengakibatkan tugas negara kurang terurus secara baik.

Apabila menyaksikan tindakan korupsi lewat media cetak atau elektronik dimana para koruptor yang tidak ada lagi rasa malu ditonton oleh banyak orang. Hal ini menggambarkan bahwa para koruptor sudah tidak memperhatikan 4 pilar sebagai acuan kehidupan berbangsa dan bernegara yang dikemukakan Taufiq Kiemas. Barangkali sudah waktunya konsep ide dari 4 pilar Taufik Kiemas seyogianya dipahami dan dijalankan secara sempurna dan mendalam, niscaya empat pilar dapat mengantisipasi dari tindakan yang bertentangan dengan hukum dan keinginan masyarakat Indonesia. Oleh sebab itu empat pilar itu wajib dilaksanakan oleh semua elemen masyarakat Indonesia. Adapun fungsi dari Empat Pilar Kebangsaan, yaitu (Imrani, 2012: 126):

- Merupakan tombak untuk tetap kokohnya berdirinya bangsa
- Menginspirasi rakyat Indonesia untuk kembali ke revolusi atau tujuan yang benar
- Menjaga kemurnian UUD 1945

- Membangun kepehaman tentang jiwa bangsa secara utuh
- Membangun karakter bangsa
- Membentuk watak dan peradaban bangsa yang bermartabat dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa
- Sarana pembangunan hukum bangsa
- Sarana pembaharuan masyarakat
- Sebagai landasan hidup bermasyarakat, berbangsa dan bernegara
- Alat ketertiban dan pengaturan masyarakat

Wujud sikap yang mencerminkan 4 pilar kebangsaan, yaitu:

- Setia dan cinta tanah air
- Mengembangkan persatuan dan kesatuan atas dasar Bhinneka Tunggal Ika
- Tidak menjadi koruptor
- Tidak membuat pernyataan atau keputusan yang merugikan bangsa
- Tidak membedakan ras, suku, agama, adat, maupun bahasa
- Tidak menyalahgunakan kekuasaan
- Menjaga ketertiban dan keamanan
- Peduli terhadap bangsa dan Negara
- Saling tolong menolong
- Saling menghormati antar sesama manusia

Dari penjabaran empat pilar kebangsaan itu dapat disimpulkan bahwa 4 penyangga yang menjadi contoh dan acuan dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Adapun 4 pilar itu berupa Pancasila, UUD 1945, Bhineka Tunggal Ika, dan NKRI.

A. Pancasila dan Kebangsaan

Munculnya pemikiran yang brilian, gagasan yang jitu, dan pemikiran tentang dasar-dasar negara yang merdeka, untuk kesempurnaan Pancasila yang merupakan dasar falsafah negara oleh Bung Karno. Usulan ini disampaikan oleh Soekarno pada 1 Juni 1945 di depan BPUPKI. Setelah pengesahan secara yuridis (hukum) tepatnya 18 Agustus 1945, maka Pancasila merupakan dasar negara, ideologi nasional, pedoman hidup, dan alat dalam menyatukan kehidupan masyarakat Indonesia (Imran Hasibuan dkk, 2012: 300). Sehingga Pancasila merupakan dasar yang ampuh dalam mempersatukan. Selain dari itu Pancasila merupakan acuan dan penuntun yang efektif dalam mencapai tujuan nasional. Dengan kata lain dapatlah disimpulkan bahwa Pancasila adalah asal dari jati diri, etik, perilaku, dan haluan dalam menciptakan kedamaian bangsa.

Dalam sejarah tanggal 1 Juni 1945 Bung Karno menyampaikan pemikiran pada asas-asas dasar bernegara, selanjutnya prinsip dasar tersebut dimuat dalam kesepakatan yang disebut dengan “piagam Jakarta” pada tanggal 22 Juni 1945, juga terdapat dalam pembukaan UUD 1945 dan kemudian PPKI mengesahkannya pada tepatnya 18 Agustus 1945, peristiwa tersebut merupakan proses terbentuknya Pancasila yang menjadi pedoman dan ideologi negara.

Pada hakikatnya Pancasila merupakan ideologi dan dasar negara adalah hasil pemikiran dan usulan Bung Karno lewat pidato beliau tepatnya 1 Juni 1945. Hal ini dapat diketahui dari pidato Notonegoro pada momen yang penting yaitu acara promosi penganugerahan gelar HC (Honoris Causa) kepada Soekarno dari UGM (Universitas Gajah Mada) yang dilaksanakan pada tanggal 19 September 1951. Pidato Notonegoro menjelaskan tentang suatu pengesahan terhadap

Pancasila 1 Juni 1945, yang merupakan dasar dan defenisinya yang masih utuh merupakan dasar filsafat negara. Sehubungan itu, penyampaian Soekarno tanggal 1 Juni 1945 merupakan momen penting untuk diperingati setiap tahun, sikap seperti ini merupakan perwujudan dari penghormatan atas perjuangan Soekarno dan orang yang berjasa dalam melahirkan Negara Indonesia berupa proses perancangan, perumusan, pembahasan serta pengesahan dari Pancasila sebagai dasar negara Indonesia.

Memaknai kembali nilai-nilai Pancasila berarti menegaskan bahwa Pancasila yang memiliki nilai-nilai yang tinggi dalam rangka acuan untuk kelangsungan hidup bermasyarakat dalam berbagai bidang kehidupan, berupa bidang agama, politik, hukum, ekonomi, pemerintahan, maupun kebudayaan dan sebagainya (Taufiq Kiemas, 2009:301). Selain itu isi kandungan Pancasila harus menjiwai semua pelaksana pemerintahan, hubungan antar negara, penegakan hukum, maupun dalam pelaksanaan demokrasi dinegara kita.

Memaknai nilai-nilai Pancasila tersebut bermakna dimana Negara Indonesia merupakan Negara yang tidak kecil karena memiliki dasar filosofi kebangsaan. Sebagai bangsa yang besar Indonesia harus bangga memiliki Pancasila, maha karya para pendiri bangsa yang sangat kokoh dalam berbagai kemajemukan, yang memiliki beragam etnis, bahasa, budaya, dan agama. Bahkan bangsa-bangsa lain pun sangat kagum dengan Pancasila, mereka takjub karena dengan keragaman etnis, agama, bahasa, dan budaya yang dimilikinya, bangsa Indonesia masih bisa bersatu sampai saat ini.

Selanjutnya Pancasila dengan nilai-nilainya yang tinggi mudah dimengerti lewat beberapa pemahaman dari masyarakat. Sebagai contoh dari sisi pemahaman UUD 1945, negara kesatuan, termasuk juga dalam kebhinekaan. Dari sisi pemahaman UUD 1945, Pancasila dengan segala nilai-nilainya baik berupa pandangan hidup, dasar Negara, ideologi negara, maupun falsafah hidup bangsa sampai sekarang masih kuat menjadi pondasi dalam bernegara (Imran Hasibuan dkk, 2012: 303). Selanjutnya Pancasila masih ada tercantum dalam UUD 1945 walaupun sudah ada amandemen berkali-kali. Hal ini memberikan makna bahwa Pancasila itu adalah hasil kesepakatan yang bersifat nasional dan semua pihak menerima dengan sepenuh hati. Kemudian Pancasila yang mengandung nilai-nilai melambangkan kuatnya kesatuan dalam bingkai NKRI. Apabila dilihat dari kebhinekaan, dapat dipahami dimana negara Indonesia memiliki beraneka agama, bahasa, budaya, suku, etnik, maupun bahasa yang dapat mudah terpisah-pisah.

Nilai-nilai Pancasila diharapkan dapat menjadi perekat perbedaan-perbedaan yang kita miliki (Imran Hasibuan dkk, 2012: 303), sehingga keberagaman itu indah dan bisa dijadikan sebagai sumber kekuatan negara Indonesia dalam mengantisipasi bermacam-macam permasalahan yang menghalangi dalam perubahan. Kuatnya Pancasila tentunya berkaitan erat dengan segala kandungannya yang tinggi yang sudah ada sejak era yang lalu oleh bangsa Indonesia yang merupakan nilai luhur ala keIndonesiaan, misalnya masyarakat yang beragama, beradab, bermartabat, memiliki cinta kebangsaan yang tinggi dan lain-lain. Untuk menumbuh kembangkan nilai luhur tersebut maka upaya pembudayaan nilai Pancasila pada setiap kehidupan perlu dan wajib dilakukan.

Pengkristalan nilai Pancasila bukan sebatas slogan saja tetapi pada sendi kehidupana masyarakat, sebagai contoh pada tingkat kematangan mental kejiwaan seseorang dimana berakhir di level akal, rasa dan kehendak manusia.

Pembudayaan nilai Pancasila diimplementasikan bertujuan untuk dapat dipahami dan dipraktekkan oleh setiap masyarakat, baik secara individu maupun dalam kehidupan kelompok sehingga melahirkan insan-insan Pancasila yang unggul, bertanggungjawab dalam peembangan ke arah kemajuan. Pancasila merupakan dasar fundamental negara yang menjadi pilar pertama dan utama

Dalam kerangka itu, Majelis Permusyawaratan Rakyat senada tujuan Undang-undang Nomor 27 tahun 2009 sedang melakukan gerakan pemasyarakatan tentang nilai empat pilar dalam bernegara melewati berbagai metode pemasyarakatan. Pemasyarakatan empat pilar oleh MPR juga dilakukan dengan menggalang kerja sama dengan berbagai instansi pusat/daerah, organisasi masyarakat, media cetak/elektronik, agar secara simultan dan akseleratif pemasyarakatan empat pilar kehidupan bernegara dapat menyentuh seluruh lapisan masyarakat.

Pancasila dalam konteks keteladanan berbangsa dan bernegara tidak dapat dipisahkan dari hubungan kepemimpinan dan kepeloporan partai politik. Dalam buku mencapai Indonesia Merdeka, Bung Karno pernah mengatakan bahwa politiklah yang berperan, politiklah yang menempati garda depan, partailah juga menjadi terang (Soekarno, 2015: 87). Politiklah yang menentukan pemimpin dalam perjuangannya.

Pada permulaan kebebasan (kemerdekaan) bangsa Indonesia tepatnya 17 Agustus 1945, menjelaskan dimana Negara yang dibentuk atau dilahirkan ini adalah sebuah negara demokrasi yang berdasarkan Pancasila. Hal itu bisa dibaca pada Mukadimah UUD 1945. Posisi Pancasila sebagai ideologi negara telah memberikan panduan sebagai nilai filosofis dalam mencapai tujuan bernegara. Nilai-nilai filosofis Pancasila itulah yang kemudian dijabarkan lebih lanjut dalam UUD. Pada tingkat operasionalisasinya Pancasila dan UUD 1945 dirumuskan dalam aturan pada tingkat bawahnya, dimulai peraturan Undang-undang sampai dengan aturan yang dibuat di daerah (Perda) (Imran Hasibuan, 2015: 306).

Fungsi merumuskan dan mengesahkan jenis-jenis peraturan perundang-undangan tersebut menurut sistem politik yang di anut dilaksanakan oleh partai-partai politik melalui fraksi-fraksinya di parlemen bersama-sama dengan pemerintah. Pemerintah yang dimaksud adalah Kepala Negara dan Wakilnya yang terdapat pada pasal 6A UUD 1945 diusung organisasi partai politik atau beberapa partai politik dan diserahkan kepada rakyat untuk memilihnya lewat sebuah penyelenggaraan pemilu. Kepala daerah yang kita maksudkan juga adalah pimpinan yang ada pada provinsi atau kabupaten/Kota yang dipercaya partai politik atau sejumlah partai politik yang dipilih melalui penyelenggaraan pemilukada (pemilihan kepala daerah) .

Semua aturan yang dibuat oleh partai politik bersama pemerintah itu berlaku sebagai norma yang mengikat seluruh warga negara. Norma dalam setiap peraturan perundang-undangan itulah yang dijadikan panduan perilaku, sikap dan perbuatan yang mengatur hak serta kewajiban setiap masyarakat.

Berpijak kerangka berfikir itulah dimana pada hakikatnya partai politik lah yang dijadikan sebagai asal mulanya terjadi norma lewat legislasi berupa perundang-undangan. Karena partai politik merupakan sumber pembentuk norma, maka sudah seyogyanya keberadaan partai politik ada di depan yang bertugas penerang, dan menjadi contoh bagi masyarakat yang dipimpinnya menuju pelaksanaan nilai-nilai Pancasila yang telah diterjemahkan dalam aturan yang berlaku. Oleh sebab itu, sebagai partai politik kita dituntut untuk tetap konsisten menjadikan Pancasila sebagai bahan galian yang berasal dari hukum negara, sebagaimana diatur dalam pasal 2 UU Nomor 12 tahun 2011 tentang peraturan pembentukan perundang-undangan.

Situasi Indonesia tersebut di atas membuat beberapa tokoh atau elite politik mencetuskan atau menyampaikan gagasan-gagasannya seperti: gagasan kebangsaan terhadap perilaku seseorang menunjukkan kebebasan untuk mengadakan pergaulan dengan siapa saja walaupun keyakinannya tidak sama. Gagasan kebangsaan dalam pola berfikir merupakan kesiapan untuk mengambil dan memberikan gagasan pada kelompok lain, gagasan kebangsaan yang digagas oleh Taufik Kiemas adalah gagasan kebangsaan dalam bertindak dan berfikir. Perilaku yang semacam itu adalah sebuah kenyataan dari pendapat secara demokratis, toleransi dan kemajemukan dari Taufik Kiemas (Imran Hasibuan, 2015: 310). Perilaku demikian dapat memahami yang luas dari pengalaman dan wawasan Taufik Kiemas dalam realitanya berasal dari berbagai paham atau ajaran, nilai etik, dan sosial budaya yang hidup, misalnya bentuk pendidikan yang

diperoleh pada tingkat daerah dan Nasional yang dipahaminya kepada keaktifannya dalam sebuah organisasi kemasyarakatan.

Indonesia merupakan Negara yang besar, patutlah masyarakat Indonesia bersyukur dengan kaya dengan beraneka agama, budaya, etnis, ras, dan bahasa. Disamping itu juga kaya dengan nilai-nilai yang fundamental yang semua elemen masyarakat menerima dengan slogan Bhinneka Tunggal Ika. Slogan atau semboyan itu ada dalam kandungan Pancasila yang ditemukan Bung Karno yang berasal nilai-nilai yang dianut oleh masyarakat Indonesia sejak dulu dan ini merupakan budaya asli bangsa Indonesia. Oleh sebab itu patutlah masyarakat Indonesia untuk selalu bekerja dan berkarya dalam rangka mengisi kemerdekaan ini dan harus bisa mengantisipasi semua kemungkinan yang berkaitan dengan kemajemukan dalam beragama, paham dan golongan ditengah kehidupan bangsa Indonesia.

Sejarah telah mencatat dengan tinta emas mengenai tantangan dari sekelompok orang untuk merubah keutuhan nilai-nilai Pancasila. Di Era digitalisasi seperti ini tentunya semua akibat yang akan berpengaruh terhadap nilai-nilai ke-Indonesiaan. Untuk itu menjaga ke-Indonesiaan itu, seharusnya secara berkesinambungan dan sekaligus untuk memperkokoh pilar-pilar kebangsaan yaitu Pancasila, UUD 1945, NKRI, dan Bhinneka Tunggal Ika. Oleh sebab itu, "revitalisasi" terhadap empat pilar itu merupakan suatu keniscayaan bersama yang wajib diusahakan untuk mampu memelihara nilai-nilai ke-Indonesiaan, agar tetap terjaga sepanjang waktu.

B. Empat Pilar Satu Indonesia

Merupakan kebanggaan bahwa bangsa Indonesia saat ini masih tegak berdiri, meskipun zaman berubah dan pemerintahan berubah silih berganti. Semua itu karena nilai-nilai persatuan dan kesatuan bangsa masih terus kita jaga dan dilestarikan. Kesenambungan dari generasi ke generasi dalam memelihara dan melestarikan persatuan dan kesatuan bangsa dalam berbagai bentuk dan dinamikanya adalah usaha bangsa yang menciptakan tidak adanya ruang bagi timbulnya benih-benih perpecahan bangsa. Namun, ditengah-tengah keprihatinan terhadap menurunnya rasa persatuan dan kesatuan bangsa, masih juga dihadapkan pada persoalan politik, ekonomi, sosial dan budaya, serta persoalan penegakan hukum yang semakin jauh dari keadilan.

Keberadaan media pers sebagai pilar demokrasi menjadi sangat penting dalam membangun kesadaran semua bangsa, sehingga masalah-masalah yang muncul tidak semakin berkembang dan semakin melemahkan semangat dan harapan masyarakat. Diminta juga kalangan wartawan mampu menjadi bagian dari jalan keluar untuk mengatasi dari bermacam masalah bangsa tersebut, dan melakukan usaha bersama dengan MPR untuk membangun pemahaman 4 pilar dalam hidup bermasyarakat (Imran Hasibuan, 2015: 329). Apabila 4 pilar dalam hidup bermasyarakat tersebut diimplementasikan secara benar dan sempurna oleh semua lapisan masyarakat, akan mampu bersama-sama menyelesaikan berbagai masalah bangsa dan negara dengan lebih baik.

Beban akan menjadi lebih ringan apabila ditanggulangi bersama. Masalah demi masalah yang muncul akan segera diselesaikan, sehingga tidak ada lagi

masalah terpendam yang dapat menjadi bom waktu yang akan muncul kemudian hari. Konflik sosial dengan berbagai ragam akar masalahnya yang dipicu oleh persoalan-persoalan masalah pertanahan dan kandungan alam yang kaya harus mampu dikelola, sehingga tidak menimbulkan masalah baru yang dapat mengancam keutuhan NKRI. Insan pers sebagai warga negara lebih meningkatkan profesionalitasnya, mempunyai cinta tanah air, serta menjadikan empat pilar dalam berbangsa dan bernegara sebagai acuan dalam mengembangkan demokrasi (Imran Hasibuan, 2015: 330).

C. Kebudayaan NKRI (Negara Kesatuan Republik Indonesia).

Indonesia yang tidak kecil dan pluralistik merupakan suatu realita yang harus diterima dan disyukuri atas pemberian Tuhan Yang Maha Esa, di wilayah yang sangat luas, sumber-sumber daya yang potensial, bermacam kebudayaan adalah kekuatan yang mampu merangkum dan mengikat ikatan secara nasional di wilayah NKRI dengan slogan Bhinneka Tunggal Ika.

Berdasarkan spirit yang tinggi tersebut para pendiri bangsa dengan penuh cinta terhadap bangsanya ingin mewujudkan Indonesia menjadi jaya dan gemilang, namun tetap kokoh berpegang pada nilai budaya asli yang tinggi, karakter diri bangsa. Karena itu seluruh komponen bangsa harus tetap berada dalam kesadaran bahwa nilai-nilai tersebut adalah esensi kehidupan berbangsa yang harus berada dalam setiap gerak dan langkah dalam membangun masyarakat dan Indonesia tercinta.

Soekarno dan para pendiri bangsa telah menghasilkan karya yang besar yaitu Rumusan Pancasila yang berisi akar budaya dan jati diri bangsa Indonesia,

lahir dari kesucian nilai-nilai agama dan keagungan moralitas bangsa (Soekarno, 2015: 68). Berdasarkan hal tersebut nilai-nilai budaya sudah tergalai dan terangkum serta harus dipelihara dan jaga agar dapat mengawal bangsa Indonesia dalam mewujudkan keinginan seperti tertulis dalam Pembukaan UUD 1945.

Upaya pembangunan bangsa menuju masa depan yang sejahtera, harus terus dijiwai oleh nilai asli budaya Indonesia yang ada dalam nilai-nilai empat pilar utama yang disebut Pancasila sebagai falsafah serta asas negara, UUD 1945 merupakan pijakan konstitusional, NKRI sebagai alat pemersatu bangsa, Bhinneka Tunggal Ika merupakan semangat perekat persatuan dalam pluralistik bangsa.

Bung Karno, Bung Hatta, merupakan sosok penting dalam lahirnya wawasan kebangsaan di negeri ini, selain sebagai aktivis kemerdekaan, mereka juga sebagai intelektual yang pandai. Semangat patriotisme mereka kokoh dalam melapangkan jalan kemerdekaan. Mereka menggunakan berbagai macam cara untuk menyadarkan dan memberdayakan rakyat betapa pentingnya wawasan kebangsaan. Pada mulanya sebuah bangsa lahir karena ide dan semangat juang yang tinggi. Salah satu media yang efektif dalam membangun wawasan kebangsaan yaitu melalui karya seni. Namun, usaha menggabungkan karya seni dan Nasionalisme saat ini tidak begitu banyak dilakukan oleh para seniman.

Indonesia merupakan Negara yang besar yang menghormati sosial budaya. Patut disyukuri Indonesia merupakan negara yang memiliki budaya yang banyak, setiap warga negara mempunyai semangat dan kecintaan yang mendalam untuk merestorikan budaya yang terhampar luas dari sabang sampai merauke. Inilah

berkah yang sangat berharga bagi bangsa Indonesia. Dengan beragamnya kebudayaan yang tersaji dapat memperteguh persatuan dan kesatuan bangsa. Ke-Bhinnekaan budaya menjadikan bangsa ini saling belajar, saling menghormati, dan saling menghargai, sehingga dapat menjadi kekuatan besar dalam membangun bangsa yang beradab, adil dan makmur (Imran Hasibuan, 2015: 349).

Berbagai bentuk ekspresi seni khususnya seni rupa Indonesia lahir sebagai tuntutan sekaligus media bagi pemanfaatan budi dan akal manusia yang dapat menghasilkan karya yang menyentuh jiwa spiritual manusia. Jiwa, rasa dan semangat kebangsaan harus selalu diukir, dikreasikan, dan dilukiskan dalam setiap tahapan proses penciptaan seni rupa Indonesia dan kreatifitas kalangan pengetahuan bangsa. Maha karya yang bersumber dari nilai-nilai agama, moralitas dan sumber asli masyarakat Indonesia ini tertera pada empat pilar kehidupan bernegara.

Masyarakat Indonesia saat ini sedang menghadapi globalisasi. Secara faktual era globalisasi menyediakan harapan sekaligus ancaman. Lunturnya semangat kebangsaan dan bela negara adalah salah satu yang jangan dipandang sebelah mata karena menghapus jejak sejarah perkembangan suatu bangsa.

Empat Pilar Kebangsaan, Berkaitan dengan jatuhnya kekuasaan rezim Soeharto dipertengahan Mei 1998 silam, Dapat dikatakan Pancasila sebagai pedoman dan dasar Negara hampir pudar dan luntur dari ingatan masyarakat Indonesia sendiri.

Selaku ketua MPR RI Taufiq Kiemas pada bulan Maret 2013, mendapat amanat dari lembaga yang dipimpinnya, mendapat penghargaan berupa

penganugerahan doktor kehormatan HC (honoris causa) dari Universitas terkemuka yaitu Trisakti berkat pemikirannya yang melahirkan ide sosialisasi 4 pilar kebangsaan Indonesia, yaitu: Pancasila, Bhineka Tunggal Ika, UUD 1945, NKRI.

Tiang penyangga dari suatu bangunan itulah disebut dengan Pilar. Pilar tersebut berperan yang sangat menentukan dan vital, oleh sebab itu apabila pilar itu lemah bahkan roboh akan mengakibatkan runtuhnya bangunan yang disangganya. Tiang memegang peran yang penting yaitu membuat rasa aman, nyaman, dan selamat dari ancaman dan gangguan.

Begitu juga bentuk bangunan negara-bangsa, memerlukan tiang yang merupakan penyangga yang kuat dalam mendiami rumah dengan rasa aman, nyaman, sejahtera, dan tenteram, agar jauh dari setiap ancaman dari bencana alam. Tiang dari suatu negara dan bangsa merupakan suatu sistem keyakinan, yang memiliki nilai, konsep, asas, dan prinsip yang dipegang setiap masyarakat, nusa dan bangsa yang memiliki kekuatan dan keyakinan sebagai acuan dan pedoman hidup berbangsa dan bernegara.

Tiang sebagaimana dijelaskan di atas berguna dalam pijakan dalam menyusun rencana kerja dan pedoman kegiatan. Tiang dari NKRI digunakan sebagai pijakan bahkan penyanggah dalam membuat rencana kerja dan pedoman segala aktivitas dikerjakan pemerintah dan masyarakat.

D. Kaitan Pemikiran Taufiq Kiemas Tentang Gagasan Kebangsaan Dengan Teori Nasionalisme.

Pemikiran Taufiq Kiemas diatas ditinjau dari teori nasionalisme. Untuk menentukan apakah pemikiran seorang Taufiq Kiemas memiliki kaitan dengan Teori Nasionalis atau sebaliknya. Maka dibawah ini diuraikan terlebih dahulu tentang defenisi nasionalisme dan teori nasional. Menurut Sarman (1995) betapa dangkalnya kerangka pikir yang dimiliki oleh masyarakat dalam hal yang berkaitan nasionalisme. Selanjutnya Sarman berpendapat bahwa nasionalisme, yang kadang-kadang diartikan dengan sikap cinta tanah air tanpa pamrih. Hal ini merupakan sikap pahlawan sejati semata.

Selanjutnya Hara (2000), konsep nasionalisme itu meliputi suatu kondisi lingkup lebih luas dimana titik persamaan dari kewarganegaraan dari latar belakang semua etnis dan budaya pada suatu bangsa. Nasionalisme juga membutuhkan sikap berupa kebanggaan dan berani dalam menjelaskan identitasnya sebagai suatu bangsa. Kebanggaan tersebut adalah muncul disebabkan dituntut dan tanpa perjuangan atau berupa warisan yang didapat secara turun temurun yang berkesinambunagn (terus menerus). Apabila tidak memiliki dan tidak memahami nasionalisme berdampak kepada sikap yang tidak membutuhkan identitas nasional.

Telah dijelaskan di atas bahwa sikap nasionalisme merupakan suatu menilai dan sikap evaluasi pada sikap cinta tanah air dengan penuh keinsafan serta bertanggung jawab selaku warga Negara yang baik. Pelaksanaan yang berkaitan dengan sikap nasionalisme paling tidak dapat direalisasikan dengan jalan terpenuhi unsur-unsur nasionalisme, misalnya rasa cinta kepada tanah air, ikut

serta dalam mengisi kemerdekaan ini dengan pembangunan, menjunjung keadilan sosial, supremasi hukum dan, menggunakan sumberdaya, meraih berprestasi, serta penuh dengan tanggung jawab dengan sikap menghargai orang lain, serta siap bersaing dengan Negara lain dan juga bersedia kerjasama internasional. Konsep nasionalisme yang benar adalah akan dapat menuju masyarakat yang sejahtera berkualitas tinggi.

Kembali kepada konsep Nasionalisme. Dimana “Nasionalisme adalah sekeping mata uang yang mempunyai dua sisi politik dan etnik. Kenyataannya nasionalisme selalu mengandung aspek politik dan aspek etnik. Ide kebangsaan adalah ide politik dan tidak ada nasionalisme tanpa unsur politik. Tetapi, substansinya sama saja dengan etnik. Hubungannya dapat dinyatakan sebagai satu kesatuan dari satu jiwa politik yang menggerakkan satu tubuh etnik” (Nodia, 1992: 3-22).

Penjabaran dengan uraian yang luas dapatlah dikatakan bahwa pemikiran Taufiq Kiemas memiliki kaitan dengan teori nasionalisme, dimana di dalam pemikiran Taufiq Kiemas memiliki unsur cinta tanah air atau bangsa dan disamping itu juga Taufiq Kiemas masa hidupnya serta sikapnya mengindikasikan dengan cinta tanah air. Dibawah ini fakta yang mendukung bahwa pemikiran Taufiq Kiemas cenderung cinta tanah air dan cinta tanah air itu ciri dari nasionalis.

Sebagaimana dijelaskan dalam tulisan berupa karya yang berjudul Gelora Kebangsaan Tak Kunjung Padam: 70 Tahun Taufiq Kiemas mengisahkan perjalanan hidupnya selama rentang waktu tersebut; pemikiran, gagasan, dan

terobosan politiknya, serta perhatiannya yang besar terhadap nilai 4 pilar hidup di masyarakat. Hal terakhir memang fokus tugas beliau adalah Ketua MPR RI periode 2009-2014. Semua itu dipaparkan dalam tiga bab pertama buku ini.

Lebih lanjut beliau dapat menciptakan bermacam agama, suku, ras, bahasa dan sosial budaya di Negara yang besar ini merupakan suatu kekuatan dalam bernegara dan berbangsa Taufiq Kiemas dalam gagasannya perlu ditarik keluar dari sarangnya. Sikap otiriter secara sadar Taufiq Kiemas menghindarinya budaya egoisme, kesukuan dan dasar sempit, bahkan beliau mengajak komponen masyarakat harusnya lebih memilih pada cita-cita keindonesiaan yang lebih mendalam. Pemikiran beliau ini memberi warna baru dalam pembicaraan dalam perkembangan nasionalisme di Indonesia.

Pemikiran dan gagasan adalah merupakan respon positif dari Taufiq Kiemas dalam kaitan perkembangan situasi politik di masyarakat. Taufiq Kiemas mempunyai keinginan dalam rangka menguatkan kedudukan, mengutkan konsolidasi posisi, serta menguatkan karir selaku politikus, baik di internal partai (PDI Perjuangan) maupun politik nasional. Dalam istilah lain yang sering disampaikan Taufiq Kiemas bahwa: “Seorang politisi sejati itu nggak ada matinya”.

Berkenaan dengan itu, diantara gagasan Taufiq Kiemas yang patut disimak yaitu mengenai membuat partainya PDIP merupakan “Rumah Besar Kaum Nasionalis”. Semboyan “Rumah Besar Kaum Nasionalis” ini semestinya menjadi suatu konsep yang hangat dari pemikiran Soekarno mengenai konsep keindonesiaan dan nasionalisme. Soekarno selalu menjelaskan bahwa masyarakat

haruslah menerima Pancasila dan menerima Indonesia dengan konsep majemuk. Sehingga Pancasila adalah alat pemersatu yang ampuh untuk menyatukan bangsa yang beraneka ragam.

Kalau mencermati dari perjuangan Taufiq Kiemas dalam mendapat amanat dalam jabatan public, misalnya sebagai Ketua MPR, Taufiq Kiemas, beliau tidak mudah mendapatkannya, tetapi melalui perjalanan yang tidak mulus bahkan banyak mendapatkan tantangan yang tidak sedikit. Sebenarnya konsep Empat Pilar sudah lama dikenal masyarakat Indonesia, bahkan sudah menjadi motivasi baru yang kuat bagi bangsa untuk meyakini kebenaran ideologinya. Inilah gambaran dari kehadiran seorang politikus ulung adalah merupakan pengagas 4 Pilar.

Dilain kesempatan Taufiq Kiemas mengatakan dimana setiap masyarakat wajib memiliki sikap bangga sebagai warga negara yang mempunyai Pancasila sebagai falsafah negara. Hal ini berkaitan dengan 3 pilar berbangsa, UUD 1945, NKRI, dan Bhineka Tunggal Ika. Harapan Taufiq Kiemas dengan konsep empat pilar berbangsa, bukan hanya sebatas selogan atau retorika belaka maupun sebagai bahan diskusi dalam suatu seminar, tetapi harus dilaksanakan dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Prinsip dari seorang Taufiq Kiemas mengibaratkan bahwa: “Kekuasaan tanpa ideologi ibarat pernikahan tanpa cinta.”.

Selain dari itu Guru Besar UIN Jakarta (Bachtiar Effendy) mengatakan bahwa beliau sangat memuji pemikiran Taufiq Kiemas mengenai Empat Pilar Bangsa Indonesia. Beliau mengatakan bahwa bukan hal yang mudah untuk memimpin Indonesia yang beranekaragam agama, suku, ras, etnis, bahasa, dan

lain-lain. Tetapi dengan konsep empat pilar Negara, Indonesia dapat menyatukan semua elemen masyarakat yang berbeda sampai kapanpun.

Selain dari itu seorang Budiman Sudjatmiko, mengatakan bahwa beliau yang menerima Bintang RI Adi Pradana juga berkarya yang nyata dan bermanfaat bagi bangsa yang majemuk. “Karena latar belakang keluarga beliau juga majemuk. Ayahnya seorang anggota Masyumi yang beraliran Islam, ibunya aktivis MURBA yang beraliran sosialis”. Diantara peninggalan yang berharga Taufiq Kiemas adalah membuat Pancasila lebih bernilai dinamis, dan progresif. Dengan demikian dasar negara Indonesia dapat diterima oleh semua elemen bangsa dan Negara. “Padahal pada zaman Orde Baru, Pancasila dipakai sebagai legitimasi untuk memenjarakan para aktivis pro demokrasi dan pada era Reformasi, Pancasila dipandang sebelah mata.”

Dalam mengembangkan kebangsaan dan kemakmuran rakyat, Taufiq Kiemas berperan selaku jembatan kebangsaan. Sehingga dengan peran itu, sukses dalam menghilangkan perbedaan antara kelompok Islamis dan Nasionalis. Apalagi Taufiq Kiemas memiliki basis keluarga Masyumi, sehingga baginya tidak mengalami masalah dalam mengenalkan gagasan Mega dilingkungan tokoh Islam. (Haq, 2015: 42)

Sikap Taufiq Kiemas tersebut yang menjadikan beliau bersikap menerima dengan siapapun, dimana pemikirannya selalu majemuk. Bahkan pemikiran tersebut yang akhirnya menerima seorang tokoh Hamzah Haz (dari PPP yang bernafaskan Islam) untuk memangku jabatan orang kedua di negeri ini dipercaya

membantu (mendampingi) Presiden RI Ke 5 Megawati dibanding tokoh yang berasal dari partai nasionalis pemilihan kursi wapres diwaktu itu.

Sikap nasionalis dari Taufiq Kiemas adalah indikasi bahwa menunjukkan kemajemukan dari dua nasionalisme dan ideologi Islam, dapat bersanding dan bekerja sama untuk kemajuan dan kejayaan bangsa. Suatu kesadaran terhadap berbangsa dan bernegara memerlukan sikap yang kuat dari nasionalisme yang mementingkan cita-cita bersama dalam kehidupan berkebangsaan dan bernegara.

Sikap yang terbuka dan nasionalis akan memunculkan budaya yang demokrasi secara bersama-sama, sikap inilah yang melekat pada figur Taufiq Kiemas. Sikap inilah yang membuat beda dengan tokoh nasionalis lain yang mementingkan kelompok apalagi sering menjaga jarak. Sikap dari Taufiq Kiemas ini menepis anggapan bahwa seakan-akan banyak tokoh nasionalis yang cenderung kepada prinsip takut dengan partai yang bernuansa Islam. Untuk dinamakan nasionalis haruslah siap berhadapan dan berdampingan dengan Islam.

Pemikiran dari Taufiq terus berjalan ditengah masyarakat dan Negara dalam gerakan mensosialisasikan kemajemukan, memotivasi semua elemen bangsa mau menerima beraneka perbedaan akan menemukan keberhasilan. Gagasan awal dari Baitul Muslimin Indonesia merupakan suatu alat penghubung ke partai yang menguatkan dan melaksanakan nilai-nilai kemajemukan, yang akhirnya menghilangkan sekat atau dinding yang memisahkan antara nasionalisme dan Islamisme. Harapan dari Taufiq Kiemas, kelompok yang berbasis Islam bersedia secara penuh akan membaur dan bersahabat dengan partai nasionalis. Oleh karena

itu keinginan konsep kemajemukan dalam satu bingkai nasionalisme tersebut telah menemukan solusinya.

Menyikapi keinginan yang mulia di atas Taufiq Kiemas selalu mengenalkan gagasan empat pilar kepada masyarakat Indonesia. Keuletan Taufiq Kiemas dalam mengembangkan komunikasi politik dengan semua orang, dengan tidak melihat latar belakang agama, aliran politik, golongan, suku, dan lain-lain. Sehingga tidak jarang orang mengatakan Taufiq Kiemas sosok teladan bagi masyarakat Indonesia. Beliau merupakan seorang dari satu negarawan yang mempunyai misi ingin memperjuangkan prinsip-prinsip kebangsaan dan kenegaraan di tengah masyarakat Indonesia yang membutuhkan tokoh seperti beliau itu.

Barangkali ada saja orang yang belum mengenal Taufiq Kiemas, akan mengenalnya beliau dari rekam jejak yang telah diperjuangkan dalam perjalanan hidupnya. Politikus PDIP yang sudah populer di masyarakat, tetapi perjuangannya dalam mengenalkan konsep kebangsaan belum semua orang mengetahuinya. Oleh karena itu Taufiq Kiemas berharap agar kiranya masyarakat memahaminya secara bertahap di negeri yang sama-sama masyarakat cintai ini. Memperoleh seorang tokoh politikus yang ulet barangkali bukanlah hal yang sulit. Misalnya politikus menjabat jabatan politis di tingkat nasional maupun daerah mudah ditemukan. Tetapi menciptakan politikus yang negarawan bukanlah hal yang mudah seperti membalik kedua telapak tangan, hal ini perlu memakan waktu yang panjang dan tantangannya tidak sedikit berat.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Pemikiran Taufiq Kiemas Terhadap Konsep Gagasan Kebangsaan di Indonesia yaitu 4 pilar dalam hidup berbangsa dan bernegara, terdiri dari:

1. Pilar Pancasila.

Dari perspektif hukum Pancasila itu populer diistilahkan dengan sumber dari segala sumber hukum, disamping itu Pancasila memiliki makna secara filosofis. Yaitu sebagai pijakan dalam berfilosofi dalam peri kehidupan berbangsa dan bernegara.

Oleh karena itu Pancasila merupakan fondasi negara dan pedoman kehidupan yang memiliki harkat dan derajat yang tinggi yang wajib dijalankan dan diamalkan segenap lapisan masyarakat Indonesia dalam hidup warga Negara, beragama, dan bernegara. Sehingga Pancasila seyogyanya merupakan ciri warga Negara dan sekaligus merupakan identitas masyarakat Indonesia.

Ada lima pilar sebagai pijakan perumusan Pancasila yaitu: adanya keyakinan kepada Tuhan, Kemanusiaan, adanya persatuan, Kerakyatan, serta sisi keadilan

2. Pilar Undang-Undang Dasar 1945.

Asas yang ada dalam UUD 1945: Sumber Kekuasaan, hak asasi manusia, sistem demokrasi, faham rasa kebersamaan dan sikap kegotongroyongan.

Adapun tujuan dari UUD 1945, yaitu: landasan Konstitusional yang ideal yaitu Pancasila, alat pengendalian masyarakat, alat untuk mengubah masyarakat, alat untuk menertibkan sosial, sarana dalam mewujudkan keadilan masyarakat lahir maupun batin, dan sarana penggerak pembangunan,

Sedangkan fungsi dari UUD 1945 yaitu: 1) fungsi pedoman atau acuan dalam penyusunan peraturan perundang-undangan, 2) fungsi alat kontrol terhadap norma hukum yang lebih rendah sesuai atau tidak dengan norma hukum yang lebih tinggi, dan fungsi alat kontrol terhadap norma hukum yang bertentangan dengan UUD 1945.

3. Pilar Bhinneka Tunggal Ika

Bhinneka Tunggal Ika. Kalimat ini memiliki arti “Berbeda-beda tetapi tetap satu”. Apabila diamati bahwa momentum kebebasan (Kemerdekaan) Indonesia dan asas Negara yaitu Pancasila dengan semboyan Bhinneka Tunggal Ika tidak terpisah. Penjelasan tersebut senada sama elemen yang terdapat pada Burung Garuda.

4. Pilar Dari Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI).

Bentuk Negara Republik Indonesia yaitu NKRI, menjelaskan bahwa Negara Republik Indonesia yang merupakan negara kepulauan, disamping itu juga bentuk Negaranya adalah republik. NKRI yang lahir 17 Agustus 1945. Adapun tujuan dari NKRI termaktub pada Pembukaan UUD 1945 pada alinea empat yakni “Kemudian dari pada itu untuk membentuk suatu pemerintah Negara Indonesia yang melindungi segenap bangsa Indonesia

dan seluruh tumpah darah Indonesia dan untuk memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi, dan keadilan sosial”.

Konsep empat pilar berbangsa dan bernegara adalah pondasi yang permanen bagi bangsa Indonesia dalam sistem bernegara, namun Taufik Kiemas konsep dua pilar ini dipandang belum sempurna, sehingga Taufiq Kiemas memunculkan ide 4 Pilar Berbangsa yaitu, Pancasila, UUD 1945, Bhineka Tunggal Ika dan NKRI. Selanjutnya menurut Tuafiq Kiemas Empat Pilar adalah alat untuk menyatukan elemen bangsa (tidak bisa dipisahkan antara satu dengan yang lainnya) untuk memelihara dan mengembangkan keberlangsungan Negara.

Empat pilar ini merupakan nilai-nilai yang tinggi dan luhur yang wajib diketahui dan dipahami oleh segenap masyarakat Indonesia. Disamping itu menjadi pedoman dalam sistem ketatanegaraan Indonesia menuju masyarakat dan Negara yang adil, makmur, sejahtera, berharkat dan bermartabat. Adapun empat pilar kehidupan berbangsa dan bernegara yaitu Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945, Negara Kesatuan Republik Indonesia, serta Bhinneka Tunggal Ika.

Pada dasarnya, Pancasila merupakan keyakinan dan dasar Negara. Keberadaannya berada di atas 3 pilar yang lainnya. Maka sepantasnyalah semua rakyat Indonesia mempunyai pemahaman dan keyakinan dimana empat pilar tersebut adalah landasan moral ke-Indonesiaan dalam

mewujudkan kehidupan bangsa yang merdeka, bersatu, berdaulat, adil dan makmur.

B. Saran

1. Diharapkan kepada Warga negara agar bukan hanya hafal dan faham, tetapi dapat mengamalkan dan menerapkan nilai-nilai 4 pilar pemikiran Taufiq Kiemas Terhadap Konsep Gagasan Kebangsaan di Indonesia dalam kehidupan sehari-hari menuju masa depan yang terjamin, tertib, aman, tentram, sertajauh dari segala gangguan.
2. Perlu adanya gerakan dalam mengenalkan empat pilar kebangsaan yang sangat dibutuhkan oleh masyarakat dan pemegang amanat untuk melaksanakan roda pemerintahan yang belum mengenal dan memahami menhenai nilai-nilai yang ada didalam empat pilar tersebut.

DAFTAR PUSTAKA

- Abdul Razak Nawfal, *Tokoh-Tokoh Cendekiawan Muslim Sebagai Perintis Ilmu Pengetahuan Modern, Penerjemah, Muhammadiyah Ja'far*, (Jakarta, Radar Jaya Offset, 1999).
- Ahmad Sukardja, *Piagam Madinah dan Undang-Undang Dasar 1945 Kajian Perbandingan Tentang Dasar Hidup Bersama Dalam Masyarakat Yang Majemuk*, (Jakarta, UI-Press, 1995).
- Ahmad Sukardja dan Ahmad Sudirman Abbas, *Demokrasi Dalam Perspektif Islam*, (Jakarta, Pedoman Ilmu Jaya Dengan Anglo Media, 2015).
- Ali Abdul Mu'ti Muhammad, *Filsafat Politik Antara Islam dan Barat*, Terjemah, Rosihon Anwar, (Bandung, CV Pustaka Setia, 2010).
- Anderson, Benedict. 2008. *Imagined Communities Komunitas-Komunitas Terbayang*, Yogya: INSIST.
- Ayi Sofyan, *Etika Politik Islam*, (Bandung, CV Pustaka Setia, 2012).
- Backy Krisnayuda, *Pancasila Dan Undang-Undang Relasi Dan Transformasi Keduanya Dalam Sistem Ketatanegaraan Indonesia*, (Jakarta, Prenadamedia Group, 2016).
- Budiardjo, Miriam. 2008. *Dasar-Dasar Ilmu Politik*. Jakarta: Gramedia.
- Bungin, Burhan, *Analisis Data Penelitian Kualitatif, Pemahaman Filosofis dan Metodologis ke Arah Penguasaan Model Aplikasi* (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2003)
- Dj, Fauzan, "Kekalahan Negara atas Kekerasan Berlatar Agama", suara merdeka, Semarang, 20 Februari 2011
- Dryzek, John S., Honig, Bonnie dan Philips, Anne (ed). 2006. *The Oxford Handbook of Political Theory*. New York: Oxford University Press.

- Estriana Fiwka, "5 Pengertian Pancasila Menurut Para Ahli" (On-line), tersedia di: <http://www.masterpendidikan.com> (23 January 2017).
- Farid Abdul Khalik, *Fikih Politik Islam*, Penerjemah Faturrahman A. Hamid, (Jakarta, Sinar Grafika Offset, 2005).
- Gorsby, Steven. 2011. *Sejarah Nasionalisme Asal Usul Bangsa dan Tanah Air*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Harrison, Lisa. 2007. *Metodologi Penelitian Politik*. Jakarta: Kencana. Ichijo, Atsuko dan Uzelac, Gordana (ed). 2005. *When is The Nation? Towards an Understanding of Theories of Nationalism*. New York: Routledge.
- Harahap, Syahrin, *Metodologi Studi Tokoh Pemikiran Islam* (Jakarta: Prenada Media Group, 2011).
- Harun, Nasution, *Islam Ditinjau Dari Berbagai Aspek*, (Jakarta, UI-Press, 1985).
- Herdiawanto, Heri, dan Jumanta Hamdayama, *Cerdas, Kritis, dan Aktif Berwarganegara*, (Jakarta, Erlangga, 2010).
- Himyari, Yusuf, *Dasar-Dasar Aksiologi Pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 Dalam Perspektif Filsafat Politik Islam*, (Bandar Lampung, An-Nuur Press, 2013).
- Himyari Yusuf, *Eksistensi Karakteristik Politik Islam Suatu Inspirasi Bagi Formulasi Politik Kontemporer*, (Jurnal Tapis, Vol, 10 No. 1 Januari-Juni 2014).
- , Yusuf, *Pergumulan Pemikiran Politik Kontemporer Menjelajah Urgensi Politik Islam Pada Era Global*, (Jurnal Tapis, Vol, 8 No. 2 Juli-Desember 2012).
- Hobsbawm, EJ. (1992). *Nasionalisme Menjelang Abad 21*. Yogyakarta: PT Tiara Wacana.
- Hudiyanto, *Ekonomi Politik*, (Jakarta, PT Bumi Aksara, 2008).

- Idrus Ruslan, *Negara Madani Aktualisasi Nila-Nilai Pancasila Dalam Kehidupan Berbangsa Dan Bernegara*, (Yogyakarta, Suka Press, 2015).
- Irawan, Dhani. (8 Juni 2013). "[Jejak Kesetiaan Politik Taufiq Kiemas](#)". Detik.com. Diakses 9 Juni 2013.
- Kaelan, *Pendidikan Pancasila Yuridis Kenegaraan*, (Yogyakarta, Paradigma Offset, 1999).
- Kencana, Inu. 2010. *Ilmu Politik*. Jakarta: Rineka Cipta.
- Laswell, Harold D. 1972, *Politics: Who, Get, What, When, How*. New York: Meridian Books Inc.
- Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia, *Panduan Pemasyarakatan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 Dan Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia*, (Jakarta, Sekretariat Jendral MPR RI, 2017).
- Martaniah, S.M. (1990). *Konsep dan Alat Ukur Kualitas Berbangsa dan Bernegara. Laporan Penelitian*. Tidak diterbitkan. Yogyakarta: Fakultas Psikologi Universitas Gadjah Mada
- Masykuri, Abdillah, *Islam Dan Demokrasi, Respon Intelektual Muslim Indonesia Terhadap Konsep Demokrasi 1966-1993*, Edisi Revisi, (Jakarta, PT Fajar Interpratama Mandiri, 2015).
- Moleong, Lexy J. 2002. *Metode Penelitian Kualitatif*. Bandung: PT. Remaja Rosdakarya. 2010. *Metodologi Penelitian Kualitatif Edisi Revisi*. Bandung: PT Remaja Rosdakarya.
- Mulia, Musdah, "Pentingnya Dialog Agama Dalam Mewujudkan Persatuan Bangsa", Inspirasi.co <http://www.inspirasi.co/post/detail/3439/pentingnya-dialog-agama-dalam-mewujudkan-persatuan-bangsa> (14 Februari 2019).
- Munawir Sjadzali, *Islam dan Tata Negara Ajaran, Sejarah dan Pemikiran*, (Jakarta, UI Press, 2003).

- Mustholih, Achmad, “Konsep Pendidikan Pluralisme Menurut Abdurrahman Wahid Dalam Perspektif Pendidikan Islam”. Skripsi (Semarang: Fakultas Tarbiyah IAIN Walisongo, 2011).
- Panjaitan, Trimedya dan Hasibuhan, Imran (ed). 2012. *Gelora Kebangsaan Tak Kunjung Padam 70 Tahun Taufiq Kiemas*. Jakarta: Q Communication.
- Pimpinan MPR Dan Tim Kerja Sosialisasi MPR Periode 2014-2019, *Materi Sosialisasi Empat Pilar MPR RI*, (Jakarta, Sekretariat Jendral MPR RI, 2017).
- Rahman, Arifin. 2002. *Sistem politik Indonesia dalam Perspektif Fungsi dan Struktur*. Surabaya: SIC
- Rozikin Daman, *Pancasila Dasar Falsafah Negara*, (Jakarta, Rajawali Pers, 1992).
- Rumadi, ed., *Damai Bersama Gus Dur* (Jakarta: PT. Kompas Media Nusantara), 2005.
- Sambutan Pimpinan Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia Periode 2014- 2019.
- Sardo. 2005. *Meruntuhkan Paham Sesat Kebangsaan*. Yogyakarta: Resist Book.
- Sarwono, Jonathan, *Metode Penelitian Kuantitatif dan Kualitatif* (Yogyakarta: Penerbit Graha Ilmu, 2006)
- Sirait, Midian. 1997. *Paham Kebangsaan Indonesia*. Jakarta: Pustaka Sinar Harapan.
- Slamet Sutrisno, *Filsafat dan Ideologi Pancasila*, (Yogyakarta, Hak Cipta, 2006).
- Soekarno, *Filsafat Pancasila Menurut Bung Karno*, (Yogyakarta, Media Pressindo, 2017).
- Soekarno. 2005. *Dibawah Bendera Revolusi Jilid I*. Jakarta: Yayasan BungKarno.
- Strauss, Anselm dan Corbin, Juliet. 2009. *Dasar-Dasar Penelitian Kualitatif Tata Langkah dan Teknik-Teknik Teoritisasi Data*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.

- Sukron Kamil, *Pemikiran Politik Islam Tematik Agama dan Negara, Demokrasi, Civil Society, Syariah dan HAM, Fundamentalisme, dan Antikorupsi*, (Jakarta, PT Kharisma Putra Utama, 2013).
- Sunoto, *Filsafat Sosial Dan Politik Pancasila*, (Yogyakarta, Andi Offset, 1985).
- Surbakti, Ramlan. 1999. *Memahami Ilmu Politik*. Jakarta: Grasindo.
- Syahrial, Syarbaini, *Pendidikan Pancasila (Implementasi Nilai-Nilai Karakter Bangsa) Di Perguruan Tinggi*, (Ciawi-Bogor, Ghalia Indonesia, 2012).
- "Taufik Kiemas Menerima Gelar Datuk Basa Batuah" *Liputan6.com*, 22 Desember 2003. Diakses 18 Juli 2015.
- Thabrani, "Konflik di Lampung" Diakses dari <http://fokus.news.viva.co.id/news/read/363482-lampungselatan-berdarah-siapa-salah>,2009.
- Toto, Suryana, *Konsep Dan Aktualisasi Kerukunan Antar Umat Beragama*, (Jurnal Pendidikan Agama Islam- Ta'lim. 9 No. 2-2011).
- Wahid, Abdurrahman, *Gus Dur Menjawab Perubahan Zaman, Kupulan Pemikiran K.H. Abdurrahman Wahid Presiden ke-4 RI* (jakarta: Kompas, 1999).
- , dkk., *Islam Tanpa Kekerasan* (Yogyakarta: LKiS, 1998).
- Widjaja, A.W, *Penerapan Nilai-Nilai Pancasila dan HAM di Indonesia*, PT Rineka Cipta, Jakarta, 2004.

Lampiran

1. Formulir Bimbingan 1 dan 2



**KEMENTERIAN AGAMA RI
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI (UIN)
RADEN FATAH PALEMBANG
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK**

Jl. Prof. K.H. Zainal Abidin Fikry No.1 Km.3.5 Palembang 30126 Telp: (0711)354668 Website : www.radenfatah.ac.id

**FORMULIR KONSULTASI SKRIPSI
PROGRAM STUDI ILMU POLITIK
PEMBIMBING I**

Nama Mahasiswa : Siti Nabila Humairah
 NIM : 1720702047
 Program Studi : Ilmu Politik
 Fakultas : Ilmu Sosial dan Ilmu Politik
 Judul Skripsi : **Pemikiran Politik Taufiq Kiemas Terhadap Gagasan Kebangsaan Di Indonesia**
 Pembimbing I : Dr. Kun Budianto, M.Si
 Pembimbing II : Vita Justisia, SH., MH, MKn

No.	Hari / Tanggal	Uraian Materi yang Dikonsultasikan	Tandatangan Pembimbing
1.	19-10-20	Bab I Kerangka teori perlu dijelaskan dan Tinjauan pustaka perlu dibuat per- samaan dan perbedaan	↓
2.	26-1-21	Bab II Buat literatur yang dikutip	↓
3.	4-5-21	Bab III Perlu dijelaskan terutama Bidang politik	↓
4	9-6-21	Bab IV Analisis perlu diperjelas	↓
5.	15-6-21	Lanj. Bab IV	↓
6.	17-6-21	Bab V Kahinat simpulan perlu di seder- hanakan	↓
7	21-6-21	Ace. utuhjian	↓



KEMENTERIAN AGAMA RI
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI (UIN)
RADEN FATAH PALEMBANG
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK

Jl. Prof. K.H. Zainal Abidin Fikry No.1 Km.3.5 Palembang 30126 Telp: (0711)354668 Website : www.radenfatah.ac.id

FORMULIR KONSULTASI SKRIPSI
PROGRAM STUDI ILMU POLITIK
PEMBIMBING II

Nama Mahasiswa : Siti Nabila Humairah
NIM : 1720702047
Program Studi : Ilmu Politik
Fakultas : Ilmu Sosial dan Ilmu Politik
Judul Skripsi : **Pemikiran Politik Taufiq Kiemas Terhadap Gagasan Kebangsaan Di Indonesia**
Pembimbing I : Dr. Kun Budiarto, M.Si
Pembimbing II : Vita Justisia, SH., MH, MKn

No.	Hari / Tanggal	Uraian Materi yang Dikonsultasikan	Tandatangan Pembimbing
1.	4 Mei 2021	Bab II pengertian, teori, tambahkan di akhir bab keterangan teori yang di - pahami, sbg alat analisis (pembantu) dalam hasil penelitian .	
2.	s.d.a.	jika biografi di ambil dari buku (ku tipu) hrs buat ke versi sendiri . dan di cantumkan bati note .	
3.	9 juni 21	Bab IV Subman kalimat nya kuzung ke hum usm masalah .	



**KEMENTERIAN AGAMA RI
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI (UIN)
RADEN FATAH PALEMBANG
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK**

Jl. Prof. K.H. Zainal Abidin Fikry No.1 Km.3.5 Palembang 30126 Telp: (0711)354668 Website : www.radenfatah.ac.id

No.	Hari / Tanggal	Uraian Materi yang Dikonsultasikan	Tandatangan Pembimbing
4.	11 Juni 21.	Perbaiki paragraf ttg isi uraian pemikiran politik Taufik Kiemas	
5	14 Juni 21.	Penjelasan ttg pilar : pemikiran Taufik Kiemas .	
6 .	sta .	is da .	
7	15 Juni 21.	Pemikiran Taufik Kiemas di - tinjau dari Teori Nasionalisme.	
8 .	16 Juni 21.	Ace Skripsi .	

2. SK Pembimbing



**KEPUTUSAN DEKAN FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
RADEN FATAH PALEMBANG**
NOMOR : B/77/Un.09/VIII/PP.01/02/2021
Tentang
PENUNJUKAN PEMBIMBING SKRIPSI
DEKAN FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
RADEN FATAH PALEMBANG

MENIMBANG

1. Bahwa untuk dapat menyusun skripsi yang baik, mahasiswa perlu dibimbing oleh tenaga ahli sebagai dosen pembimbing pertama dan pembimbing kedua yang bertanggung jawab untuk membimbing mahasiswa dalam rangka penyelesaian penyusunan Skripsi.
2. Bahwa untuk kelancaran tugas-tugas pokok tersebut perlu dikeluarkan Surat Keputusan Dekan.
3. Lembar persetujuan judul dan penunjukan Pembimbing Skripsi oleh Ketua Prodi Ilmu Politik *a.n. Siti Nabila Humairah*, tanggal 14 Oktober 2020

MENGINGAT :

1. Keputusan Menteri Agama RI Nomor 53 tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Universitas Islam Negeri Raden Fatah Palembang.
2. Keputusan Menteri Agama RI Nomor : 407 tahun 2000;
3. Instruksi Direktur Lembaga Islam Departemen RI Nomor KEP/E/PP.00.9/147/1985 tanggal 5 Juni 1985 tentang pelaksanaan SKS dan Program S1 Universitas Islam Negeri Raden Fatah;
4. Instruksi Menteri Agama RI No.B/152/1994 tentang Pelaksanaan SKS Program S1 Universitas Islam Negeri Raden Fatah;
5. Kep.Menag RI No. 62 tahun 2015 tentang Statuta Universitas Islam Negeri Raden Fatah Palembang;
6. Pedoman Akademik Universitas Islam Negeri Raden Fatah No. 585 tahun 2016;

MEMUTUSKAN

MENETAPKAN:

Pertama : Menunjuk Saudara:

N A M A	NIP/NIDN	Sebagai
Dr. Kun Budianto, M.Si.	197612072007011010	Pembimbing I
Vita Justisia, SH., M.Kn.	2014056902	Pembimbing II

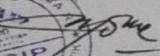
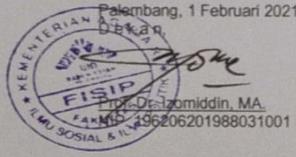
Dosen Fakultas Ilmu Sosial Ilmu Politik Universitas Islam Negeri Raden Fatah Palembang masing-masing sebagai Pembimbing pertama dan Pembimbing kedua Skripsi Mahasiswa Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Saudara:

N a m a : Siti Nabila Humairah
N I M : 1720702047
Prodi : Ilmu Politik
Judul Skripsi :
"Pemikiran Politik Taufik Kiemas terhadap Gagasan Kebangsaan di Indonesia."
Masa bimbingan : Satu Tahun TMT. 01 Februari 2021 s/d 01 Februari 2022

Kedua : Kepada pembimbing pertama dan pembimbing kedua tersebut diberi hak sepenuhnya untuk merevisi Judul/kerangka Skripsi tersebut tanpa mengubah substansi penelitian.

Ketiga : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan bahwa segala sesuatu akan diubah/dibetulkan sebagaimana mestinya apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam penetapannya.

Palembang, 1 Februari 2021



 Prof. Dr. Izomiddin, MA.
 NIS : 196206201988031001

Tembusan:

1. Rektor ;
2. Dosen Penasehat Akademik yang bersangkutan
3. Pembimbing Skripsi (1 dan 2) ;
4. Ketua Prodi Ilmu Politik ;
5. Arsip ;

3.Surat Balasan Penelitian

PEMIKIRAN POLITIK TAUFIQ KIEMAS TENTANG
GAGASAN KEBANGSAAN DI INDONESIA



SKRIPSI

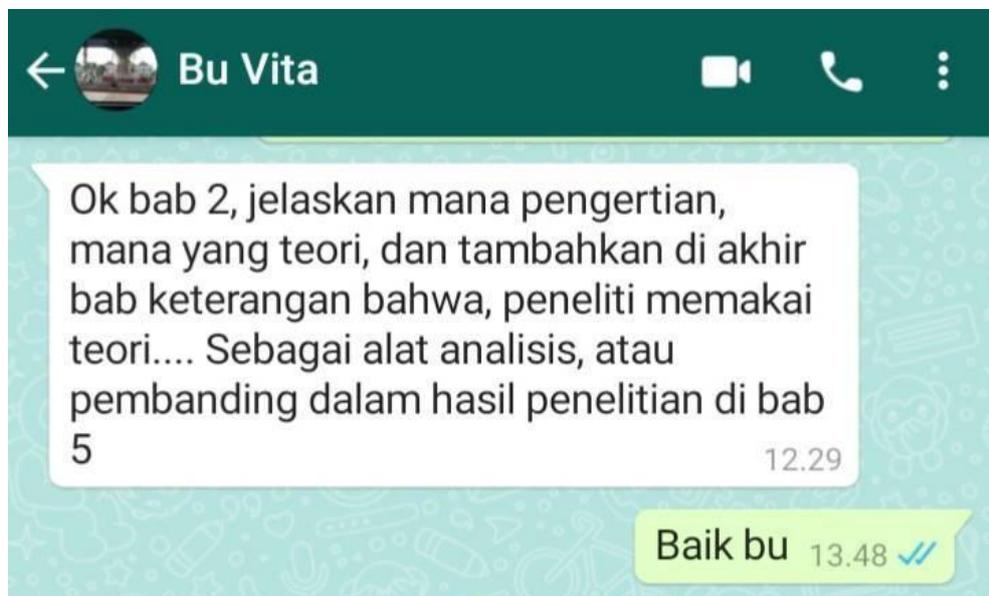
Diajukan Untuk Melengkapi Salah Satu Syarat Guna
Memperoleh Gelar S.Sos Sarjana S1 Dalam Ilmu Politik
Program Studi Ilmu Politik

OLEH:

Siti Nabila Humairah

NIM : 1720702047

PROGRAM STUDI ILMU POLITIK
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI RADEN FATAH
PALEMBANG
1442 H/2021



4. Lembar Persetujuan Perbaikan Skripsi



Universitas Islam Negeri Raden Fatah Palembang
Fakultas Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik
Jln. Prof. KH Zainal Abidin Fikri KM 3,5 Telp. (0711) 353347, Fax. (0711) 354668, Website: <http://radenfatah.ac.id>,
Email: fisip_uin@radenfatah.ac.id

LEMBAR PERSETUJUAN PERBAIKAN SKRIPSI

Nama : Siti Nabila Humairah
NIM : 1720702047
Program Studi : Ilmu Politik
Tanggal Ujian Manaqasah : Senin, 6 September 2021
Judul Skripsi : "Pemikiran Politik Taufiq Kiemas Tentang Gagasan Kebangsaan Di Indonesia"

Menerangkan bahwa penelitian dengan judul diatas telah direvisi sesuai dengan masukan dan saran pada saat diuji, serta telah disetujui oleh Dosen Penguji I dan Penguji II.

NO	DOSEN PENGUJI	KETERANGAN	TANDA TANGAN
1	Ainur Ropik, M.Si	Penguji I	
2	Yulion Zalfa, M.A	Penguji II	

Palembang, September 2021

Mengetahui,

Pembimbing I,

Dr. Kun Budiarto, M.Si
NIP.197612072007011

A.n Pembimbing II,

Kaprodi Ilmu Politik

Vita Jusfisia, SH., M.Kn
NIDN.201405602

5. Berita Acara



**KEMENTERIAN AGAMA RI
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI (UIN)
RADEN FATAH PALEMBANG
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK**

Jl. Prof. K.H. Zainal Abidin Fikry No.1 Km.3.5 Palembang 30126 Telp: (0711)354668 Website : www.radenfatah.ac.id

BERITA ACARA UJIAN SKRIPSI

Pada hari ini Senin tanggal 6 bulan September tahun 2021 telah dilaksanakan sidang ujian skripsi atas nama mahasiswa :

Nama : **Siti Nabila Humairah**
Nomor Induk Mahasiswa : **1720702047**
Jurusan/Program Studi : **Ilmu Politik**
Judul Skripsi : *Pemikiran Politik Taufiq Kiemas Terhadap Gagasan Kebangsaan di Indonesia*

MEMUTUSKAN

1. Setelah mengumpulkan Nilai Teori dan hasil Munaqasyah pada sidang yang telah diselenggarakan maka saudara teruji dinyatakan LULUS / ~~TIDAK LULUS~~, dengan Indeks Prestasi Kumulatif ---. Oleh karena itu saudara berhak memakai gelar Sarjana Strata Satu (S1) Sarjana Sosial (S.Sos).
2. Perbaiki dengan tim penguji selambat-lambatnya 2 (dua) minggu sebelum penutupan pendaftaran wisuda terhitung sejak ditetapkan.
3. Apabila tidak dapat memenuhi ketentuan poin di atas, maka dinyatakan belum bisa diikutsertakan mengikuti wisuda yang diselenggarakan pada periode berjalan.
4. Apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan dalam penetapan ini akan diadakan perubahan sebagai mana mestinya.

Tim Penguji:

No.	Tim Penguji	Jabatan	Tanda Tangan
1	Dr. Kun Budianto, M.Si	Pembimbing I	
2	Vita Justisia, SH.,M.Kn.	Pembimbing II	
3	Ainur Ropik, M.Si.	Penguji I	
4	Yulion Zalpa, MA.	Penguji II	



**KEMENTERIAN AGAMA RI
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI (UIN)
RADEN FATAH PALEMBANG
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK**

Jl. Prof. K.H. Zainal Abidin Fikry No.1 Km.3.5 Palembang 30126 Telp: (0711)354668 Website : www.radenfatah.ac.id

Ditetapkan di Palembang
Pada Tanggal 6 September 2021

Ketua

Dr. Eti Yusmita, S.Ag, M.HI.
NIP. 197409242007012016

Sekretaris

Rvllian Chandra Eka Viana, MA.
NIP. 198604052019031011

6.Surat Keterangan



KEMENTERIAN AGAMA RI
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI (UIN)
RADEN FATAH PALEMBANG
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK

Jl. Prof. K.H. Zainal Abidin Fikry No.1 Km.3.5 Palembang 30126 Telp: (0711)354668 Website : www.radenfatah.ac.id

SURAT KETERANGAN

Ketua Sidang Munaqasyah Fakultas Ilmu Politik dan Ilmu Sosial UIN Raden Fatah Palembang dengan ini menerangkan :

Nama : Siti Nabila Humairah
Nomor Induk Mahasiswa : 1720702047
Jurusan/Program Studi : Ilmu Politik
Judul Skripsi : *Pemikiran Politik Taufiq Kiemas Terhadap Gagasan Kebangsaan di Indonesia*

Telah diujikan pada hari Senin tanggal 6 September 2021 setelah melalui sidang maka dinyatakan LULUS / ~~TIDAK LULUS~~ dengan Indeks Prestasi Kumulatif (IPK) _____

Palembang, 6 September 2021
Ketua Sidang


Dr. Eti Yusrita, S.Ag.,M.HI.
NIP. 197409242007012016

7. Riwayat Hidup

DAFTAR RIWAYAT HIDUP

Nama : Siti Nabila Humairah
Tempat/Tanggal Lahir : Palembang, 28 April 2000
Agama : Islam
Anak : Ke 2 dari 2 Bersaudara
Alamat : Jl. Sapta Marga, Lr Pancasila



No. 61, Rt. 51, Rw. 10, Kota Palembang, Sumatera Selatan

Ayah dan Ibu : Prof. Dr. H. Paisol Burlian, SH, M.Hum dan Dra. Hj. Sumiria, M.Si

Email : nabilahumairah28@gmail.com

No. Telepon : 089523934600

Riwayat Pendidikan

1. 2006-2011 Sekolah Dasar (SD) YSP Pusri Palembang.
2. 2011-2014 Sekolah Menengah Pertama (SMP) YSP Pusri Palembang.
3. 2014-2017 Sekolah Menengah Atas (SMA) YPI Tunas Bangsa Palembang
4. 2017-2021 Universitas Islam Negeri (UIN) Raden Fatah Palembang

Pengalaman Organisasi

2015-2016 Anggota PMR di SMA YPI Tunas Bangsa.

Saya yang bersangkutan

Siti Nabila Humairah
1720702047